



YOUTH PROACTIVE

BERANTAS
KURUPSI



"KURANG CERDAS DAPAT
DIPERBAIKI DENGAN
BELAJAR. KURANG CAKAP
DAPAT DIHILANGKAN
DENGAN PENGALAMAN.
TETAPI BILA KURANG
JUJUR, PAYAH DAN SUSAH
MEMBETULKANNYA"
~ Moh Hatta

Salam jujur!

Kejujuran penting dan membutuhkan keberanian memulai aksi jujur dalam diri. Alasan sederhana itu yang kemudian melahirkan "Berani Jujur Hebat" pada bulan Desember, 2011. Kampanye serentak oleh gerakan antikorupsi ini dilakukan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia. Setahun kemudian, 2012, Transparency International Indonesia (TII) melakukan rangkaian kampanye di sejumlah daerah Indonesia. Sebagai bagian dari gerakan antikorupsi, TII memberikan perhatian

kepada generasi muda.

Lima kota kita kunjungi lewat program **"Youth Proactive Roadshow: 2012"**.

Kota-kota tersebut adalah Makassar, Garut, Batang, Semarang dan Yogyakarta. Youth Department TII memfasilitasi diskusi publik dan workshop kreatif bertemakan integritas. Upaya penting lain yang coba dilakukan pada tahun 2012 adalah pelibatan anak muda untuk menulis pengalaman mereka terkait integritas dan antikorupsi.

Integrity starts from within and your circle, internally.

Bagaimana generasi muda menuturkan integritas dan antikorupsi? Hal ini yang baru dimulai oleh TII. Berangkat dari semangat mendokumentasikan perjalanan serta berbagi pengalaman di lapangan, **Youth Proactive Journal** dibuat. Jurnal ini berisi tulisan-tulisan dari kawan-kawan jurnalis muda, blogger, mahasiswa, dan pegiat sosial muda. Youth Proactive Journal diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak muda menuturkan pengalaman, ide, dan kritisme mereka.

Dalam jurnal perdana kali ini, tiga orang penulis mendapatkan kesempatan ikut rangkaian roadshow Youth Proactive.

Stevie Harrison, Rendi Novalia dan Gloria Fransisca. Tiga kawan muda kita ini mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Youth Department TII. Perjalanan roadshow kemudian menjadi inspirasi tulisan mereka di dalam jurnal.

Ide dan perhatian mengenai pentingnya pendokumentasian sebuah program atau pengalaman dituturkan oleh **Afra Suci**.

Sebagai generasi muda, kreatifitas kita menjadi potensi untuk menghasilkan suatu capaian program yang menarik. Potensi itu tetapi tidak akan ada artinya jika nihil integritas diri. Konsep dan ide Jujur.is.me dituturkan **Usep Hasan Sadikin**. *Jujur adalah saya* (jujurisme) adalah tawaran Usep bagi ideologi antikorupsi.

Youth are those who have spirits to rise and shine

Selamat menikmati edisi perdana Youth Proactive Journal! Semoga jurnal ini bisa menjadi rujukan dan inspirasi bagi pembaca.

In solidarity,



@liatoriana

Creative Program Youth Department TII

Berani Jujur Hebat!



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption

Transparency International Indonesia (TII) adalah chapter otonom dari Transparency International (TI) yang bergerak di lebih dari 90 negara di dunia. TII merupakan jaringan NGO yang berfokus pada perlawanan korupsi dan kemitraan untuk membasmi efek buruk korupsi yang berimbas pada masyarakat di seluruh dunia. Misi utama TII, menciptakan lingkungan bersih praktik korupsi.

CONTENTS

FOREWORD	3
DOKUMENTASI SEJAK DINI	6
ANAK MUDA, PEDULIKAH KITA PADA KORUPSI?	14
KASUS KORUPSI & PEMAHAMAN ANAK MUDA	41
KITA DAN MASA DEPAN INDONESIA: MENABUR INTEGRITAS, MENUAI TRANSPARANSI	62
JUJURISM(E): ANTIKORUPSI DALAM OTAK	82
GALERI FOTO	100

DOKUMENTASI SEJAK DINI

Oleh: Afra Ramadhan

"Kalau kita bicara mengenai institusi, lalu bicara mengenai misi sebagai substansi dari tiap-tiap institusi, maka ketika bicara mengenai transparansi dan akuntabilitas sebenarnya pertanggungjawaban program."

(Revisond Baswir- Problematika LSM di Indonesia)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, inisiatif anak muda Indonesia untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu sosial politik dan lingkungan semakin berkembang. Satu per satu anak muda mulai memiliki kesadaran untuk mengubah kondisi sekitar mereka baik dalam skala komunitas hingga skala kebijakan internasional. Tentunya berbagai faktor pendukung seperti teknologi dan globalisasi menjadi kesempatan bagi anak muda dalam mengakses informasi dan memahami konteks permasalahan sosial.

Meskipun Indonesia memiliki sejarah panjang akan romantisme anak muda sebagai inisiator perubahan, peralihan kondisi sosial politik Indonesia dari rezim otoriter ke era reformasi menyisakan jeda perlawanan dalam gerakan anak muda.

Generasi yang kerap disebut generasi pasca '98 tidak dipandang sebagai kelompok yang cukup militan dan bahkan cenderung pasif. Sehingga kita menemukan ruang kosong pada keterlibatan anak muda dalam gerakan sosial. Namun seiring dengan berjalannya era reformasi, atmosfer kebebasan yang



didukung oleh arus informasi mendorong bangkitnya kesadaran anak muda di Indonesia untuk membuat perubahan. Dalam konteks yang berbeda dengan generasi '98, anak muda saat ini juga mampu merumuskan inisiatif perubahan yang cenderung terfragmentasi atau tidak fokus pada satu persoalan yang sama.

Lebih jauh lagi, tidak sedikit dari anak muda yang punya keinginan untuk memberikan kontribusi nyata dan kemudian membuat kegiatan atau bahkan merencanakan misi untuk mengubah sebuah kebijakan. Inisiatif anak muda yang muncul beberapa tahun terakhir tidak hanya terpaku pada satu bentuk kelompok seperti komunitas, melainkan beragam wujudnya. Ada inisiatif anak muda yang berawal dari kegiatan kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi resmi. Atau contoh lainnya bisa berupa inisiatif satu orang dan komunitas, kemudian berkembang menjadi sebuah pusat koordinasi yang terdiri dari beberapa cabang komunitas. Dengan menyasar agenda perubahan mereka masing-masing, inisiatif anak muda pada akhirnya menemukan bentuk kelompok yang sesuai dengan ruang gerak dan kegiatannya.

Perkembangan inisiatif anak muda juga tidak bisa lepas dari faktor eksternal seperti terbukanya kesempatan anak muda Indonesia untuk menjadi delegasi di konferensi atau pertemuan penting di skala internasional. Dalam situasi tersebut membuka koneksi dan peluang untuk menciptakan kegiatan atau program lanjutan di negara masing-masing. Faktor pendukung lain yang juga berkontribusi dalam perkembangan inisiatif tersebut adalah peluang bantuan dana atau sumber daya lainnya, baik dari lembaga asing

maupun pemerintah. Dengan konteks global yang sejak awal tahun 2000 mulai menganggap pentingnya mengaktifkan peran anak muda dalam perubahan sosial, dorongan bagi lembaga asing atau pemerintah untuk memberikan dukungan sumber daya ke organisasi anak muda atau program yang terkait dengan konstituen muda. Tidak bisa dipungkiri jika kegiatan dan program yang ditujukan dan melibatkan anak muda menjadi sesuatu yang 'seksi' bagi lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Masyarakat luas juga mulai menyadari adanya semangat perubahan dari kegiatan yang dibuat oleh anak muda dan diangkat menjadi wacana oleh berbagai media. Peluang untuk mendapatkan dukungan lewat program-program start up project semacam 'Young Change Maker' oleh Ashoka atau 'Global Changemaker' oleh British Council dan Global Changemaker turut memicu lahirnya inisiatif anak muda tersebut.

Dengan bertambahnya jumlah inisiatif program dan kegiatan dari anak muda ini, muncul kebutuhan bagi kelompok ini untuk mengembangkan inisiatif menjadi sebuah organisasi atau program yang berkelanjutan. Ketika komunitas anak muda tersebut sudah membuat program atau kegiatan yang rutin dan mengelola sejumlah sumber dana dari pihak luar, tentunya perlu diiringi dengan meningkatnya kemampuan manajemen program yang baik bagi para pelakunya. Mengingat seluruh program yang dijalankan harus dipertanggungjawabkan baik ke publik maupun lembaga pendukungnya. Di satu sisi, keterlibatan inisiatif anak muda dalam program-program terkait perubahan sosial yang didukung oleh berbagai pihak belum diiringi dengan

“Dalam konteks yang berbeda dengan generasi ’98, anak muda saat ini juga mampu merumuskan inisiatif perubahan yang cenderung terfragmentasi atau tidak fokus pada satu persoalan yang sama.”

peningkatan kapasitas pengelolaan program yang transparan dan akuntabel. Walaupun sebenarnya prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah dikenal anak muda bahkan sejak di lingkup sekolah

lewat pertanggungjawaban OSIS, tidak semua kelompok anak muda menganggap pertanggungjawaban ini sebagai satu hal penting selain implementasi program.

Upaya Dokumentasi Inisiatif Anak Muda



Banyaknya kesempatan dan dukungan bagi anak muda untuk mengembangkan programnya terbukti telah melahirkan banyak program dan kegiatan yang berhasil membangkitkan kembali peran aktif anak muda di komunitasnya. Berbagai kegiatan berskala nasional dan lokal pun diselenggarakan, dari yang sifatnya pertemuan besar seperti konferensi, pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap beberapa isu sosial

(lingkungan, HAM, anti korupsi, gender, dll), hingga kampanye-kampanye yang memperjuangkan isu spesifik. Kegiatan tersebut ada yang diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi yang sudah mapan sebelumnya, ada juga yang murni dari inisiatif kelompok anak muda itu sendiri. Salah satu inisiatif anak muda yang sudah membuat berbagai kegiatan dan kemudian dilegalkan dalam satu organisasi dengan beberapa

cabang di daerah adalah Indonesian Future Leaders (IFL). Sejak didirikan tahun 2009, organisasi ini sudah menjalankan berbagai program seperti pelatihan, sidang parlemen muda, sharing bulanan, dan beberapa kegiatan lainnya. Sebagai sebuah organisasi anak muda, IFL mempublikasikan dan mendokumentasikan detail organisasi dan seluruh kegiatannya dalam situs mereka www.indonesianfutureleaders.org. Informasi mengenai struktur organisasi, program yang sedang berjalan, laporan program sebelumnya, mitra kerjasama, dan artikel, foto, serta video mengenai kegiatan IFL bisa diakses oleh publik. Mengumpulkan seluruh dokumentasi foto dan deskripsi kegiatan dalam sebuah situs merupakan satu upaya yang cukup baik bagi organisasi anak muda dalam pertanggungjawaban publik.

Selain organisasi anak muda yang sudah cukup baik dalam mengelola manajemen internalnya, masih ada banyak inisiatif anak muda yang memerlukan peningkatan kapasitas dalam pertanggungjawaban publiknya. Tidak perlu berkecil hati karena secara garis besar, ada banyak institusi baik LSM maupun organisasi lain yang masih berproses dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam programnya. Ada komunitas atau organisasi yang menjalankan program kegiatannya dengan baik dan memperoleh respon positif saat pelaksanaan, namun pada saat kegiatan tersebut berlangsung

dan dipersiapkan, organisasi belum mendokumentasikan proses dengan semestinya. Dokumentasi ini tidak hanya dalam hal keuangan semata, tetapi juga mencakup rekam jejak surat-menyurat (atau surel), notulensi pertemuan, rekaman suara, foto atau video kegiatan terkait dan juga pengarsipan dokumen penting.

Ada model inisiatif anak muda yang basisnya cair dan belum terstruktur secara mapan dalam bentuk organisasi dan biasanya dalam model inisiatif seperti ini proses kegiatan belum didokumentasikan dengan maksimal. Misalnya ada sebuah pertemuan bersama yang tidak diiringi dengan pencatatan daftar kehadiran, rekaman suara, ataupun foto kegiatan yang layak untuk dimasukkan ke dalam laporan. Atau contohnya ketika satu kelompok sedang merencanakan pelatihan, surat-menyurat antar penyelenggara dan peserta atau pembicara tidak didokumentasikan dengan baik. Hal-hal tersebut mungkin kesannya bersifat minor dan terdengar rumit atau tidak praktis. Istilah gampangnya 'ribet' padahal kegiatan tinggal dilaksanakan saja. Pada akhirnya, setiap kegiatan pasti diakhiri dengan laporan pertanggungjawaban, biasanya jika sudah tiba waktunya membuat laporan baru kita pontang-panting mencari bentuk-bentuk dokumentasi tersebut. Sedangkan setiap program perlu dijamin transparansi proses dan akuntabilitas pelaksanaannya ke publik.

Dokumentasi Sebagai Verifikasi

Dalam perkembangan organisasi non-profit di Indonesia ketika menjalankan proses transparansi dan akuntabilitas, diperlukan mekanisme pengukuran transparansi dan akuntabilitas sebuah organisasi. Di dalam sebuah panduan yang diterbitkan oleh

Yayasan Tifa "Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas LSM", diperkenalkan sebuah instrumen Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TANGO (*transparency and accountability of NGO*), yang menjadi alat pendukung LSM

untuk menjadi transparan dan akuntabel melalui beberapa jalan. Dalam buku panduan tersebut terdapat klasifikasi yang menjelaskan berbagai elemen yang perlu diperhatikan dalam akuntabilitas dan transparansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta sub elemen dan indikatornya. Keenam Elemen tersebut, yaitu; Elemen Visi

– Misi dan Tujuan Organisasi, Elemen Tata Laksana (*Governance*), Elemen Administrasi, Elemen Program, Elemen Pengelolaan Keuangan, dan Elemen Legitimasi. Di setiap elemen terdapat alat untuk verifikasi indikator yang terdapat di dalamnya, contohnya seperti yang ada di bawah ini:

Indikator	Uraian / Keterangan	Alat Verifikasi-Metode yang direkomendasikan
Sub Elemen : Visi-Misi-Tujuan		
a. Orientasi Visi – Misi – Tujuan Organisasi	Level 1 Berorientasi pada kepentingan organisasi dan anggota (perkumpulan) saja	√ Wawancara atau <i>Focus Group Discussion (FDG)</i> dengan <i>stakeholders</i>
	Level 2 Berorientasi pada kepentingan organisasi dan kelompok dampingan saja	√ AD/ART atau akte Notaris √ Proposal √ <i>Newsletter</i> atau artikel √ Brosur atau <i>Leaflet</i> √ Laporan Tahunan √ Rumusan Perencanaan Strategis dan <i>Assessment</i>
	Level 3 Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas	√ Proposal √ Dokumen organisasi, seperti : rekaman proses, notulensi rapat perumusan rencana strategis dan <i>assessment</i> , notulensi rapat board/dewan pendiri dan pelaksana/ staf

b. Proses perumusan V-M-T organisasi	Level 1 Hanya dirumuskan <i>board</i> / dewan pendiri	✓ Hasil wawancara atau FGD dengan board/ dewan pendiri dan pelaksana/staf ✓ Dokumentasi personalia ✓ FGD ✓ Wawancara ✓ Peraturan organisasi
	Level 2 Dirumuskan (kembali) <i>board/ dewan</i> pendiri dan staf (pelaksana)	
	Level 3 Dirumuskan (kembali) oleh <i>board/dewan</i> pendiri, staf dan <i>stakeholders</i> yang lain	
c. Perspektif gender dalam V-M-T Organisasi	Level 1: Tidak memperhatikan perspektif gender pada perumusan V-M-T	

*Diambil dari panduan “Mengukur transparansi dan akuntabilitas LSM. Suatu Metode Partisipatif” edisi revisi. 2004.

Pada kolom tersebut kita bisa melihat bagaimana pentingnya peran pendokumentasian program baik dari sisi keuangan maupun pencatatan kegiatan sebagai alat verifikasi instrumen pengukur transparansi dan akuntabilitas. Inisiatif anak muda, baik yang sudah terstruktur maupun yang masih cair dinamikanya sangat membutuhkan kemampuan organisasional untuk melakukan pengukuran tersebut. Tentunya upaya dan hasil dokumentasi kegiatan yang sudah dibuat bisa menjadi awal untuk menuju inisiatif yang transparan dan akuntabel. Menyadari kebutuhan akan kemampuan organisasional seperti ini, hendaknya jaringan organisasi anak muda atau organisasi yang sudah mapan dan punya pengalaman lebih bisa berbagi ilmu dan metode terkait penguatan kapasitas internal untuk menerapkan prinsip ini.

Beruntung inisiatif anak muda zaman

sekarang didukung dengan teknologi yang semakin memudahkan proses dokumentasi untuk menjamin transparansi dan menjalankan akuntabilitas. Misalnya penggunaan sosial media seperti Twitter yang bisa didokumentasikan, kemudian *slideshow* yang bisa diunggah dan diakses pihak lain, sistem *cloud document* yang partisipatif dan merekam jejak pengguna juga bisa menjadi perangkat handal untuk pengarsipan. Bahkan dengan kemajuan teknologi tersebut, inisiatif yang sifatnya cair dan terpisah jarak bisa tetap menjalankan proses dokumentasi dengan baik. Bagusnya lagi, melihat sudah banyak inisiatif anak muda yang mengaplikasikan teknologi seperti membuat situs organisasi, blog, akun sosial media, dan publikasi materi multimedia, kita bisa optimis dalam menjamin program inisiatif tersebut bisa dipertanggungjawabkan ke pihak



luar. Hasil-hasil dokumentasi pada akhirnya berguna untuk mendukung keberlangsungan organisasi lewat laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh publik. Hal ini penting tentunya untuk menumbuhkan demokrasi di kalangan

inisiatif anak muda yang akan menciptakan atmosfer transparansi dan akuntabilitas agar menumbuhkan kepercayaan pada kelompok muda, baik dari kalangan yang ada di dalam gerakan anak muda maupun di luarnya.

Referensi:

1. "Mengukur transparansi dan akuntabilitas LSM. Suatu Metode Partisipatif" edisi revisi. 2004. Yayasan Tifa.
2. Abidin, Hamid & MiminRukmini. *Kritik&Otokritik LSM: MembongkarKejujuran danKeterbukaan LembagaSwadaya Masyarakat Indonesia*. 2004. Piramedia.
3. Essai Revrison Baswir "Problematika LSM di Indonesia" diakses di <http://keuanganlsm.com/unduh-berkas/isu-transparansi-dan-akuntabilitas/>

Anak Muda, Pedulilah Kita pada Korupsi?

Oleh: Gloria Fransisca Katharina Lawi

Pendahuluan

Dalam sebuah newsroom menanggapi kolom Bilik Suara pada bulan Maret 2012 berjudul 'Korupsilah Saat Masih Muda?', seorang pembaca, Ary Budi, menulis, *"Generasi (lama) yang korup hanya dapat menurunkan generasi (baru) yang korup (juga). Kalau yang baru korup, siapa yang mengajari? Semoga kelak, kala generasi sekarang sudah menjadi senior, tidak menurunkan generasi yang korup!"*

Coba kita mulai dengan mengurutkan nama beberapa koruptor ternama di Indonesia beserta rentang usia mereka. Ambil saja contoh Gayus Tambunan, M Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Dhana Widyatmika sebagai bagian dari 'generasi baru' atau generasi yang tergolong "terlalu muda" untuk melakukan korupsi. Orang-orang inilah yang dianggap generasi yang seharusnya bisa menjadi pemutus rantai korupsi pada generasi selanjutnya, yaitu

generasi kita, saya dan kamu yang berusia antara 11-25 tahun. Sayangnya, mereka yang dijadikan *role model* anti korupsi bagi kita malah terilit dalam kasus-kasus atau tindakan serupa. Dari survey singkat yang dilakukan sebelumnya, ada 495 orang yang menjawab pertanyaan apakah Anda pernah melakukan aksi korupsi meski kecil-kecilan? 63% atau 311 orang yang menjawab ya, 144 orang atau 29% menjawab tidak, dan sisanya 40 orang atau 8% menjawab tidak tahu.

Sementara dalam survey lain pada 14 Juni 2011, melalui pertanyaan *'Apakah budaya korupsi sudah menyebar di tingkat lingkungan sekitar Anda?'*, kebanyakan mengatakan bahwa korupsi ada di sekitar mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekitar 3671 orang atau 46% responden yang memilih opsi itu. Sekitar 1661 orang atau 21% menjawab ada, tapi tidak ikut serta,

lalu 1028 orang atau 13% mengatakan ada dan sudah berusaha mencoba menegur atau mencegah. Ada 5% atau 432 orang menjawab ada dan ikutan korupsi, sementara 5% lain atau 430 orang menjawab mereka terpaksa ikutan korupsi.

Kita seringkali menyalahkan korupsi sebagai masalah budaya, atau sebagai sistem.



Nah, pertanyaannya kini di mana, tanggung jawab kita, sebagai anak muda untuk memutuskan rantai korupsi tersebut? Jika generasi ini belum bisa terbebas dari korupsi, kira-kira kapan Indonesia bisa bersih dari korupsi?

Pada dasarnya korupsi memiliki keterkaitan yang erat dengan politik. Apa itu politik? Dalam arti harafiah, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Realitas yang tengah terjadi kini adalah sebuah apatisme anak muda terhadap proses politik.

Contoh apatisme politik yang dirasakan oleh anak muda contohnya menurunnya keinginan anak muda untuk mengikuti perkembangan berita sosial politik di media massa. Ini tentu disebabkan oleh terpaan media yang berlebihan dengan konten-konten yang negatif. Hal ini dinyatakan secara langsung di acara Youth Proactive Roadshow, sebuah acara yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi anti korupsi untuk mengajak anak-anak muda ikut melawan korupsi, oleh salah satu peserta asal Garut, Syifa, 15 tahun, bahwa ia lebih memilih non-ton hiburan dibandingkan menonton berita.

Melalui tulisan ini, saya ingin mencari tahu bagaimana hubungan antara anak muda, korupsi, dan politik dengan gerakan sosial? Tujuan saya menulis tentang hal ini adalah

untuk mengetahui apakah apatisme politik berdampak pada gerakan sosial yang seharusnya dilakukan oleh anak muda? Selain itu saya pun ingin mengetahui penyebab apatisme politik hingga membuat anak muda seolah alergi dan tak mengindahkan penyelewengan dalam politik, yakni tindak korupsi itu sendiri.

Semoga saja, perjalanan kita sepanjang lembar demi lembar tulisan saya bisa memberikan manfaat yang baik sepanjang masa dari zaman ke zaman.

Semoga dengan karya ini anak muda Indonesia memahami posisinya sebagai *agent of change* atau agen perubahan. Langkah awal tentu dengan merumuskan '*change*' itu sendiri. Apa *change* yang dimaksud? Tentu saja meminimalisir korupsi dan memutuskan rantai korupsi. *Change* itu haruslah menjadi cita-cita bersama, meskipun masih begitu kontras dengan keadaan sekarang. Saya pun berharap kita bersama-sama meningkatkan reliabilitas dan efektifitas aksi perubahan tersebut melalui gerakan sosial. Anak muda memiliki hak untuk jujur pada diri dan cita-citanya. Selama ini beberapa anak muda Indonesia tengah bertarung melawan degradasi dan keburukan generasi-generasi sebelumnya dengan praktik korupsi yang kian merajalela. Lantas, apakah kita yang lainnya bersedia bergabung?

Pemuda dan irisannya dengan Korupsi

Pemuda. Sebuah pembahasan yang tidak akan mencapai titik klimaksnya. Lantas siapakah sosok yang tergolong anak muda? 'Pemuda' atau 'generasi muda' adalah konsep-konsep abstrak yang dibebani oleh nilai-nilai. Definisi harafiah pemuda sendiri menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, adalah orang dengan usia muda, remaja, taruna, (yang) *akan menjadi pemimpin bangsa*.

Ini dia benang merah yang menjelaskan mengapa pemuda disebut sebagai individu yang terbebani oleh nilai. Dalam hal ini nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur



sebagai harapan bangsa. Akibatnya banyak jargon-jargon yang lahir seperti, 'pemuda harapan bangsa, pemuda pemilik masa depan,' 'pemuda mampu menggoyahkan dunia,' atau 'pemuda harus selalu dibina.'

Sejarah Indonesia memaparkan betapa besar dampak anak muda dalam proses mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Mengapa bisa demikian? Pemuda adalah kumpulan manusia dengan pengalaman yang relatif sedikit namun berbekal idealisme yang banyak. Itu adalah karakteristik pemuda Indonesia secara singkat dari balik kaca mata subjektif saya. Idealismelah yang melahirkan inovasi dan perubahan. Ambil saja contoh ungkapan dari salah satu tokoh revolusi Indonesia, Tan Malaka bahwa 'Idealisme adalah kemewahan terakhir yang pemuda punya.'

Meskipun pemuda seringkali dianggap sebagai suatu kelompok yang terbuang, terkucilkan dari kawan manusia 'normal' dengan subkultur tersendiri semata karena idealisme. Sisi idealisme adalah sisi-sisi yang sangat bertentangan dengan tindakan yang merugikan. Sisi idealisme memiliki kecenderungan bertarung melawan kejahatan dan penyelewengan akan hak-hak kemanusiaan. Sesuai dengan

definisi harafiah dari idealisme itu sendiri, yakni sebuah aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita luhur sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dipahami. Sementara menurut pemahaman etika dan filsafat komunikasi, idealisme adalah menyatakan bahwa keberadaan manusia (kebenarannya) ada pada idenya.³ Oleh sebab itulah, idealisme selalu menghadirkan ide-ide demi mewujudkan kehidupan yang 'sempurna'.

Bila dilihat dari pendekatan psikologis pemuda identik dengan unsur pemberontakan. Pemuda terjerat dalam keberanian, namun sayangnya sering pendek akal, dinamis tetapi seringkali pula hantam kromo. Penuh gairah, tetapi seringkali membuat hal yang aneh-aneh. Pemuda juga lebih suka diposisikan sebagai teman berbagi perspektif dibandingkan harus diberikan nasehat, dan digutui. Unsur kepemudaan harus diakui begitu romantik.

Ada pula *stereotype* tentang aksi pemuda yang dimunculkan dengan istilah menyeramkan dimana pemuda sebagai kelompok aspirasi tersendiri, berbeda dan bertentangan dengan masyarakat. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan aspirasi masyarakat adalah aspirasi orang

***'power tends to
corrupt, absolute
power corrupts
absolutely.'***

**artinya kekuasaan
selalu berpeluang
menjadi korup/
merusak, dan
kekuasaan penuh
pasti akan seutuhnya
bersifat korup.**

tua dan generasi sebelumnya. Tak heran, hambatan-hambatan dari segi *stereotype*, psikologis ini kian menggerus kepercayaan diri dan gelora keingintahuan anak muda. Seolah terjadi penuaan dini pada perjuangan pemuda. Hal itu diperkuat dengan kemunculan persoalan yang membuat frustrasi serta kecemasan karena keinginan, harapan, dan idealisme yang tumbuh dalam dirinya tak sejalan dengan kenyataan.

Kini nampaklah sebuah ide dasar bahwa anak muda adalah individu yang (seharusnya) melawan korupsi dan segala tindakan buruk yang tengah berbanding terbalik dengan cita-citanya. Hal ini didukung pula dengan pernyataan dalam Sosiologi Korupsi bahwa tindakan korupsi mencakup seluruh lapisan masyarakat, terkecuali masyarakat yang masih sangat primitif. Oleh sebab itu memang hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi terjangkit virus korupsi.

Coba kita lihat dalam sejarah, siapakah yang akhirnya berhasil menjatuhkan rezim Soekarno ketika jalannya pemerintah merumit? Pemuda! Siapakah yang menjatuhkan rezim Soeharto dan membumihanguskan semua perkara KKN yang menggerogoti pemerintahan dan masyarakat? Pemuda! Rasa-rasanya hampir semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan berhasil dicegah dan dibubarkan berkat pengawasan dan aksi generasi muda. Pertanyaannya, *dimanakah aksi-aksi tersebut pada masa kini?*

Apa sajakah yang menjadi ciri khas, anak muda selain idealisme ya? Anak muda adalah individu-individu dengan prinsip kebebasan yang tinggi. Ketika manusia memasuki fase kepemudaan, seseorang akan cenderung menolak untuk diatur,

ingin mengawasi, mencontoh, mudah terpengaruh akibat keinginan menemukan jati dirinya. Tak heran anak muda adalah individu yang mudah terpengaruh, termasuk dipengaruhi oleh jargon-jargon.

Kini mari kita beralih kepada KORUPSI. Apa itu korupsi? Korupsi atau *corruption* berasal dari kata latin *corruptio* dengan kata dasar *corrumpere* yang berarti buruk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam ranah lain, korupsi sebagai kata benda merupakan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi; dan *me-ngo-rup-si* sebagai kata kerja memiliki arti menyelewengkan atau menggelapkan (uang).

Menurut Buku Aksi Kita: Panduan Kita Melawan Korupsi, terbitan Transparency International Indonesia bersama ClubSPEAK saya membaca pernyataan dari Lord Acton. Begini bunyinya, *'power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely'*, artinya kekuasaan selalu berpeluang menjadi korup/merusak, dan kekuasaan penuh pasti akan seutuhnya bersifat korup.

Menurut Transparency International Indonesia, sebuah jaringan global organisasi non pemerintah yang selalu mempromosikan minimalisasi korupsi di berbagai negara menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang



dipercayakan kepada mereka.

Ada beberapa modus korupsi.

Contoh seorang pejabat atau pegawai negeri menerima pemberian (entah barang maupun uang) yang disodorkan pihak berkepentingan dengan tujuan mempengaruhi dan memberikan perhatian khusus dalam upaya melancarkan tujuan mereka. Modus ini disebut dengan penyuapan. Ada pula modus korupsi yang disebut pemerasan, yakni permintaan akan hadiah-hadiah sebagai imbalan khusus dalam pelaksanaan tugas publik. Terakhir, adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman, atau rekan-rekan politik yang sepaham pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa, kualitas individu, dan resikonya bagi kesejahteraan publik. Ini adalah nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan jargon pada masa Orde Baru kini mengerucut menjadi satu nama yakni KORUPSI.

Modus korupsi dapat disimpulkan sebagai penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, dibarengi pula dengan kerahasiaan atau ketidaktransparanan, pengkhianatan, pengabaian, penyalahgunaan kepercayaan publik, pelanggaran terhadap norma-norma tugas publik dan pertanggungjawaban di dalam masyarakat, dengan resiko yang terpaksa diemban oleh publik.

Berikut adalah beberapa ciri-ciri korupsi yang perlu ditanamkan dalam sel-sel otak dan hati nurani generasi muda dalam mengidentifikasi kejahatan laten ini. Ciri-ciri ini bersumber dari LP3ES tentang Sosiologi Korupsi, oleh Syed Hussein Alatas. Menurut kajian LP3ES, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, korupsi pada dasarnya memiliki unsur ketidakterbukaan, terkecuali ia begitu mendominasi atau

begitu mengakar, sehingga individu-individu yang berkuasa tidak tergoda menutupi perbuatan mereka hingga seolah menjadi 'budaya.' Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik meskipun tak selalu berupa uang, misalnya saling merahasiakan. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum dan lembaga yang

membawahinya.

Selain itu, para koruptor menginginkan pengambilan keputusan publik yang menguntungkan mereka dalam meluncurkan tindakan korupsi secara berkesinambungan. Dengan kata lain, mereka turut melunakkan sistem dan aturan yang bertujuan untuk menyelamatkan praktik-praktik korupsi. Alhasil selalu memberikan celah tindakan korupsi seringkali tak disadari.

Ada apa dengan Gerakan Anak Muda?

Ketika saya wawancara pemuda asli Garut, Selvi dan Syifa saat Youth Proactive Roadshow hari pertama di Garut, 16 Desember 2012, ada sedikit tes uji pengetahuan dalam rangkaian diskusi kami. Saya menanyakan tahukah mereka siapa ketua KPK? Jawaban teman-teman tersebut diluar dugaan saya, *mereka tidak tahu*. Lalu saya tanya lagi, kalian tahu apa itu KPK? Syukurlah, jawaban mereka kali ini tidak mengecewakan, Komisi Pemberantasan Korupsi, jawab mereka.

Dari contoh kejadian ini, saya mempertanyakan efektivitas media massa dan pendidikan dalam memberikan informasi yang cerdas, benar, terkini, dan komprehensif. Saya memiliki keraguan akan validitas ilmu pengetahuan sosial di Indonesia apakah terbilang cukup mutakhir karena nampaknya belum cukup membawa

dampak signifikan bagi para pelajar dan anak muda di negeri ini. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada saat ini, misalnya, tidak sanggup memberi solusi terhadap peningkatan aspirasi. Mereka pun tidak sanggup menjawab pertanyaan anak muda akan realitas miris hasil laporan media, seperti kasus korupsi. Mereka seolah tak berdaya dalam menciptakan suatu masyarakat yang dinamis dalam proses belajar. Institusi seolah-olah

mengajarkan pemuda-pemuda untuk mengembik, membebek, dan mengekor, bukan untuk berlari dan mengaum. Mungkin pula masyarakat, termasuk pemuda sendiri sebagai komponen di dalamnya belum mengetahui tipologi sosial pemuda

Indonesia secara umum.

Seharusnya ada implikasi antara partisipasi generasi muda terhadap



kehidupan sosial politik di sekitarnya, mengingat semua elemen pemuda Indonesia mengkonsumsi ilmu pengetahuan sosial melalui institusi sekolah, media, dan melalui sosialisasi pengajaran internal dalam lingkungan dan keluarga, ditambah lagi dengan banyaknya peristiwa nasional yang pernah timbul dalam sejarah karena faktor kemunculan gerakan sosial, aksi-aksi, yang diprakarsai oleh pemuda baik dari golongan mahasiswa maupun pelajar.

Tak hanya pendidikan, setiap masyarakat sesungguhnya memiliki alokasi peran yang jelas terhadap golongan pemudanya. Peranan ini dikenakan beban berupa harapan sosial kepada pemuda yang senantiasa dipupuk agar terus subur dan kuat.

Anak muda merupakan elemen terpenting dalam perubahan sosial. Beberapa tanda dari perubahan sosial diawali dengan 'memanasnya' hubungan antara generasi sehingga sistem komunikasi yang diharapkan cukup ampuh menjalin hubungan antar keduanya kian melumpuh.

Tanda-tanda konflik tersebut biasanya karena pemuda memiliki kapasitas kepentingan yang jauh lebih kecil dibandingkan kepentingan dari generasi tua. Tak heran kepentingan-kepentingan tersebut digencarkan melalui institusi pendidikan, baik di sekolah maupun di universitas. Biasanya kepentingan tersebut dikemas dalam undang-undang, kebijakan, maupun sistem. Keduanya dibatasi oleh kesenjangan pola berpikir. Kesenjangan berpikir inilah yang mungkin menjadi tolak ukur pertama mengapa pemuda Indonesia masa kini begitu jauh dari realitas sosial politik di lingkungannya. Kecenderungan untuk pragmatis kian merajalela dan mengikis kepekaan sisi sosial dan humanis

pemuda sedikit demi sedikit.

Banyak ragam pendapat anak muda masa kini menanggapi politik dan korupsi. Ada yang memilih untuk berdiam dengan alasan-alasan yang cukup logis. Contohnya, *'untuk apa ikut campur pada situasi kenegaraan, atau birokrasi? Itu semua urusan orang tua, buat apa kita yang masih muda bercapek-capek ikut mengurusnya?'* Tidak ada yang salah dengan pendapat seperti ini. Namun pernyataan ini cenderung mencerminkan bentuk pelarian dan pengunduran diri pemuda dari tanggung jawabnya.

Sikap-sikap proaktif pada politik dan khususnya pemberantasan korupsi patut ditunjukkan anak muda adalah melalui gerakan sosial. Pernyataan tersebut saya dapatkan melalui hasil wawancara dengan Pak Bram, anggota DPRD kota Batang dari fraksi PDIP. Sejauh ini menurutnya, gerakan sosial anak muda di seluruh Indonesia masih bersifat temporer. Pria yang tengah menjabat sebagai wakil Ketua Komisi A ini merasa gerakan yang populer di kalangan anak muda masa kini tidak pernah fokus pada isu sosial-politik, tidak melahirkan apa-apa, sekedar nama, dan berhenti di tengah jalan, seolah hilang tanpa jejak seperti asap.

Ada indikasi-indikasi sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah sekarang disengajai untuk mengekang kebebasan anak muda. Atau mungkin pengekangan ini sebagian sistem yang diwariskan dari masa Orde Baru dan belum terpatahkan?

Mungkin bisa kita analogikan begini, kalau bukan TII atau ICW yang membuat program workshop anti korupsi kepada anak muda seperti ini, memangnya pemerintah akan membuatnya untuk anak muda? Kalau tidak ada program dari TII ini, apakah bisa membuat anak muda ngeh

pada APBD, ngeh pada politik?

"Kalau tidak diajarkan gimana mau mencari orang baru bisa mengerti kalau tidak dikasih tahu, iya kan?" tutur Pak Bram.

Itu baru satu contoh pendapat mengapa gerakan sosial anak muda melempem. Pendapat lain yang muncul misalnya, peristiwa politik dan hukum di negeri ini sekarang tidak lagi menjadi perhatian anak muda. Kaum mahasiswa misalnya, mereka hanya 'mengamati' melalui pemberitaan di social media umumnya dan tidak beraksi segencar seperti yang terjadi pada tahun 1966 dan 1998. Demonstrasi era kini di DPR atau Istana Negara dinilai memiliki dua pola. Pertama, demonstrasi yang terjadi kini kurang bersemangat dan kurang massa. Kedua, demonstrasi yang sangat greget hingga menimbulkan bentrokan. Semakin hari kecenderungannya mengarah kepada tindakan cuek mahasiswa dengan tak mau terlibat di lapangan, tidak mau bergabung dalam organisasi intra maupun ekstra institusi, dan tidak mau melibatkan dirinya dalam diskusi kecil politik, atau diskusi sosial seputar kehidupan institusinya.

Adakah faktor ekonomi sekarang yang relatif lebih baik, lebih maju, lebih keren dibandingkan kondisi tahun 1966 dan sepanjang masa Orde Baru hingga tahun 1998 menjadi penyebabnya? Apakah keadaan yang serba ada, *instant*, mudah terpenuhi membuat tidak ada alasan bagi kaum muda untuk terjun, melakukan gerakan sosial? Relevansi yang mereka perjuangkan sangat jauh dari realitas kehidupan yang mereka alami sendiri. *Proximity* atau kedekatan dampak korupsi di tengah kehidupan mereka kurang dirasakan.

Padaahal, kalau anak muda mau melirik, beberapa kebobrokan fasilitas umum yang

dirasakan mereka disebabkan oleh korupsi. Bisa juga kerusakan di jalan raya, adalah karena pemotongan anggaran perbaikan yang masuk ke kantong-kantong tak bertanggung jawab. Apalagi? Kemacetan! Macet, merupakan bentuk dampak dari korupsi! Kemacetan karena anggaran regulasi jalan raya dan pembangunan sarana prasaran kabur entah kemana.

Sayangnya tanpa disadari anak muda yang tak menyadari perannya dan memilih berdiam diri ikut pula melenggangkan korupsi. Atau kita secara langsung menyuburkan sistem tersebut dengan mengabaikan beberapa penyelewengan. Contoh, kita memberikan suap kepada polisi ketika ditilang. Kondisi politik dan hukum yang korup sekarang ini kurang menarik karena anak muda juga menikmatinya. Ini persis seperti yang terjadi pada peristiwa 32 tahun Soeharto berkuasa, dimana kalau 'perut kenyang' dan harga-harga barang kebutuhan masih bisa dijangkau dan tidak ada gejolak ekonomi yang berarti, maka para anak muda seolah tak terjadi apa-apa dan 'mendiamkan' saja. Dalam posisi ini, anak muda seolah menjadi antek yang tak disadarinya sendiri. Mereka juga dianggap ikut 'menikmati'. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa ketika kita mendiamkan korupsi, sama saja kita turut mendukung korupsi dan memperburuk situasi bangsa.

Ada beberapa opini publik yang menggelisahkan dan mengecewakan sekarang ini bahwa pendidikan di Perguruan Tinggi diutamakan bagi anak-anak muda yang dilahirkan dari keluarga yang berduit. Akibatnya anak muda pun tidak mempunyai ketertarikan untuk belajar apalagi terlibat dalam perjuangan nasib bangsa seperti gebrakan sejarah yang terjadi pada tahun 1966 & 1998 yang lalu.



Kemandulan institusi pendidikan dalam meningkatkan intelektualitas, memberikan pemahaman sosial, telah membuat apatisisme anak muda kian mengakar. Institusi pendidikan tidak memprakarsai anak muda untuk termotivasi membentuk dan masuk gerakan sosial menanggapi isu dan permasalahan sosial. Mirisnya lagi, untuk tetap menampakkkan fungsinya sebagai lembaga pemicu gerakan sosial dan intelektualitas, anak muda dilibatkan pada beberapa tayangan televisi sebagai penonton. Nah, dimanakah keterlibatan mereka dalam gerakan sosial? Apakah kehadiran mereka dapat disebutkan sebagai gerakan sosial?

Sesungguhnya masih ada beberapa gerakan sosial anak muda di Indonesia. Contoh, Club SPEAK, Suara Pemuda Anti Korupsi, Global Youth Anti Corruption Network, Indonesian Future Leaders. Model-model gerakan ini tak berbau politis seperti beberapa gerakan mahasiswa ternama di Indonesia. Gerakan mahasiswa yang

mengukir sejarah dari masa ke masa, antara lain GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia), atau PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). Ada pula GSNI atau Gerakan Siswa Nasional Indonesia yang bergerak di kalangan pelajar di Indonesia.

Kemandulan aktifitas mahasiswa atau kaum anak muda masa kini apabila dibandingkan dengan aktivitas mahasiswa di masa lalu jelas menimbulkan pertanyaan. Mengapa bisa demikian? Apakah anak muda sudah sebegitu alergi terhadap politik? Penyakit alergi politik anak muda ini saya angkat mengingat pentingnya sebuah 'Masyarakat Sadar Politik' terutama untuk anak muda. Seringkali akibat alergi kronis pada politik anak muda lupa bahwa dirinya adalah komponen terpenting.

Kita bisa mulai membentuk suatu budaya dimana masyarakatnya sadar akan politik melalui penyuluhan dan pendidikan politik

dini. Hasilnya, anak muda bisa membentuk sikap politik, atau setidaknya ketika masa pemilu datang setiap orang tahu mengapa dia memilih si A atau B. Penyuluhan juga mengajarkan tentang modus-modus korupsi sehingga masyarakat belajar menolak untuk bermain uang melalui penyuapan. Masyarakat menghargai satu suara yang dia berikan bisa menentukan masa depan negeri ini dan dirinya. Sikap-sikap sebagai ujung tombak itulah yang akan memicu semangat perubahan. Seperti apa yang telah dilakukan Hugo Chavez di Venezuela, dia membagikan buku kecil undang-undang kepada rakyatnya agar tidak lagi terjebak atau di bodohi politisi yang mau merusak negerinya.

Kita, anak muda Indonesia, janganlah terus menerus mau hidup dalam perangkap pembodohan terselubung. Ingat, sebaiknya kita tidak onggang-onggang kaki saja sementara melihat teman-teman lainnya berusaha melakukan perubahan. Lagipula banyak keuntungan dengan bergabung pada gerakan sosial dengan ideologi yang jelas. Kita bisa menjadi inspirasi banyak orang, mengenal banyak orang dari berbagai sisi dan latar belakang, serta memperoleh ilmu yang lebih banyak dari yang bisa kita terima di sekolah atau universitas. Kita semua mempunyai tugas yang berat tapi bisa dilakukan secara sederhana dengan menciptakan suatu iklim politik yang baik.

Politik = / ≠ Korupsi?

'Generasi kita tak begitu beruntung untuk mengetahui apakah perjuangannya kelak akan membuahkan hasil seperti yang dicapai generasi terdahulu, dan apakah keturunan kita akan mengakui kita sebagai nenek moyang mereka. Kita tak akan berhasil

menghapuskan kutukan yang terlontar kepada kita sebagai pengekor dari suatu era politik yang besar kecuali kita berhasil untuk menjadi sesuatu yang lain.'

Sepenggal kalimat diatas adalah pidato singkat Max Weber, filsuf dan sosiolog asal



Jerman. Pernyataan ini dicetuskan di usianya yang ke 29 tahun, ketika ia merasa sadar harus terlibat dalam masalah-masalah yang aktual di negaranya. Pertanyaannya, apakah kita perlu menunggu hingga usia diatas 25 tahun seperti Max Weber untuk menyadari kewajiban kita terlibat dalam perubahan sosial di bangsa kita sendiri?

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia yang tengah berkepalan enam ini, korupsi telah melanda Indonesia sejak tahun-tahun yang lampau. Korupsi sendiri diidentikkan dengan nafsu untuk hidup mewah dalam komunitas kelompok yang berkuasa dan mereka adalah pihak-pihak yang menempati jajaran pemerintahan.

Stigma bahwa korupsi adalah bagian dari politik karena politik sudah diidentikkan sebagai segala sesuatu upaya yang menghasilkan materi berlebih. Persis seperti pertanyaan Bupati Batang pada pembukaan Youth Proactive Roadshow (17 Desember 2012) di rumah dinas-nya. *"Politik yang menghasilkan materi, benar atau salah?"* ujarinya. Jawaban teman-teman di Batang pada saat itu adalah *'politik menghasilkan materi'*. Jawaban BENAR bahwa politik menghasilkan materi itu jelas menunjukkan telah tergerusnya pemikiran dan kepercayaan anak muda di Batang (dan mungkin di seluruh Indonesia) akan politik itu sendiri. Dengan kata lain, apatisme politik dan ketidakpahaman akan politik kian kronis menjangkit ke daerah-daerah. *"INGAT! Politik bukan materi, politik bukan perusahaan! Jadi politik tidak boleh menghasilkan. Kalau politik menghasilkan, itu berarti ada yang tidak beres."*

Pemuda selalu melalui fase dimana dirinya merasa gagal untuk menjadi sesuatu yang lain. Keharusan menjadi epigon dalam realitas sosial-politik yang

kurang transparan terus berkembang tanpa kita sadari mempercepat terjerumusnya anak muda ke perang dalam dirinya sendiri. Fase-fase ini berlanjut kepada fase sindrom generasi muda yang sesungguhnya dibayang-bayangi oleh generasi sebelumnya, termasuk bayang-bayang korupsi yang mengakar.

Tak hanya korupsi, kejadian historis seperti kemerdekaan Indonesia turut berperan membangun kritisme pemuda yang terpendam. Seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan, adakah yang bisa kita lanjutkan sesuai kemerdekaan ini? Apakah kami hanya pemikul batu bangunan yang telah selesai ataukah kami memiliki hak membangun yang baru dan lebih sesuai menurut kami? Demikian halnya dengan korupsi, kesenjangan antara pemuda dan korupsi, seolah meruntukan pertanyaan bahwa korupsi itu memang nyata, riil, ada, atau sedang dalam posisi bergerak dan membutuhkan kaum muda untuk memangkasnya.

Apa yang membuat adanya jarak, kesenjangan antara pemuda, dengan politik, dan korupsi? Sesungguhnya pemuda memiliki posisi berbeda dalam arah kehidupan manusia yang banyak sedikitnya sudah ditentukan oleh suatu pemikiran generasi tua yang bersembunyi di balik tradisi. Anggapan yang dipopulerkan pada zaman Orde Baru bahwa pemuda tidak memiliki andil yang berarti dalam mendukung proses kehidupan bersama dalam masyarakat harus mulai ditepis dari sekarang. Pemuda dianggap sebagai obyek dari penerapan pola kehidupan yang sudah ditentukan, dan bukan sebagai subjek yang memiliki nilai sendiri.

Sesungguhnya, pemuda sebagai subyek memiliki nilai sendiri dalam

mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Dalam kaitannya kehidupan politik di Indonesia, pemuda di era reformasi mengalami pergeseran totalitas pengabdian karena depolitisasi. Pemuda tak menyadari kewajiban mengisi akumulator generasi tua yang kian melemah akibat penyelewengan yang dilakukannya. Pengisian ulang diawali dengan memutus mata rantai korupsi dan memungut buah-buah kebijaksanaan dari pengalaman sebelumnya.

Generasi tua dan generasi pemimpin masa kini tak memiliki celah untuk menuntut bahwa mereka adalah penyelamat masyarakat, karena justru merekalah yang mengecewakan dan

meresahkan masyarakat. Generasi tua juga tidak dapat menghakimi generasi muda sebagai pelanggar pagar suci rumah tradisi yang dibangun oleh mereka.

Pagar suci rumah tradisi ini seolah melarang pemuda untuk masuk di dalamnya, atau bahkan sekedar mengintip. Sayangnya, pemuda pun turut mengikuti aturan tersebut dan melenggangkan perjalanannya tanpa menggali skeptisme untuk 'mengintip' yang seharusnya diperjuangkan. Pagar suci ini adalah depolitisasi, sementara rumah suci tradisi adalah fakta sosial politik mengatasmakan kesejahteraan rakyat yang tergambar berbanding terbalik dari realitas yang sebenarnya.

Depolitisasi Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia sekarang hanya membentuk individu-individu yang kompetitif. Pulang sekolah harus les, sibuk kegiatan-kegiatan internal. Sebagian orangtua dan lingkungan pun turut menyunat kreatifitas mereka dengan banyak aturan dan kekangan. Dengan kata lain, orang tua zaman sekarang seringkali mendorong anak-anak mereka menjadi sedemikian pragmatis. Intinya, sekolahlah dengan rajin, pandai, masuklah ke universitas-universitas negeri, atau universitas terbaik dan ternama dengan perhitungan agar cepat kerja. Alhasil, terciptalah sosok-sosok individualis yang kian mengelupaskan sisi kemanusiaanya.

Padahal, konsep kaum siswa, mahasiswa, adalah kaum berpendidikan. Pendidikan seharusnya peduli pada keseimbangan karakter individualis dan kemanusiaanya. Kalau dari sistem pendidikannya saja tidak peduli, lantas siapa yang mau

peduli? Akhirnya seperti sekarang ini, tidak ada kepedulian yang cukup.

Pengawasan kurang. Jangan kaget kalau pemerintahannya pun berjalan tanpa ada yang mengawasi dan banyak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Tak sampai disitu, warisan apatisisme yang dilahirkan pada zaman Orde Baru dikalangan anak muda perlu direfleksikan pada masa kini bahwa anak muda masih rentan dengan kewajiban-kewajiban rumah tangga dan keluarga yang masih melekat. Contoh ketika telah diwisuda, menghadapi tuntutan pekerjaan, gaji pertama yang menggiurkan, hal-hal semacam itu yang sering menghempaskannya dari realitas di sekitarnya.

Generasi ke generasi diingat dan dikenang karena perubahan dan inovasi yang ditelurkannya. Apabila generasi tak bisa melahirkan perubahan, ia akan

terhempas dari sejarah dan terlewatkan begitu saja. Sebab demikianlah hakikat sejarah. Sejarah selalu menceritakan tentang kejayaan dan kemenangan yang dilancarkan generasi yang dominan bukan yang sebaliknya. Kini, maukah generasi kita bersama-sama mengejang demi melahirkan solusi anti korupsi bersama-sama?

Kini mari kita sedikit membahas hal-hal yang seolah terlupakan oleh sejarah. Pembahasan tentang politik yang tak populer dikalangan kita. Saatnya mulai dengan pembahasan akan depolitisasi.

Depolitisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penghilangan kegiatan politik. Lantas, bagaimana dengan kata kerja mendepolitisasi? Mendepolitisasi adalah menghilangkan (menghapuskan) kegiatan politik. Contohnya adalah pelarangan mahasiswa berdemonstrasi di gedung

DPR dan mendesak agar peraturan yang dianggap akan merugikan. Bukti-bukti dari depolitisasi pemuda di masa kini adalah apatisme yang kian merambat masa kini adalah tidak berjalannya partai politik seharusnya dan tidak adanya kepedulian negara pada pendidikan politik pemuda Indonesia melalui rancangan kurikulum yang tengah berlaku.

Depolitisasi membuat pemahaman akan politik serta pengawasan terhadap partai politik kian menurun. Padahal ada beberapa hal dalam politik yang diperlukan sebagai tolok ukur pengawasan. Contohnya kita harus mengetahui fungsi partai politik, dimana menurut Prof. Miriam Budiardjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.



Dari empat fungsi ini, partai politik masa kini menurut saya tidak menjalannya dengan baik dan benar. Partai politik tidak lagi menjalankan komunikasi politik dengan masyarakat secara intens dan komprehensif. Fungsi mereka yang seharusnya memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana kebijakan pemerintah seringkali disalahgunakan justru untuk menghambat kebijakan pemerintah. Semuanya terjadi semata karena konflik kepentingan ketika kebijakan tersebut dianggap tak menguntungkan partai. Partai politik juga tak mensosialisasikan budaya politik kepada masyarakat dengan baik. Partai Politik justru memberikan nilai-nilai ideologis yang berbalut kepentingan namun selalu bias dengan implementasi di lapangan. Implementasi kebobrokan dari mulai biaya politik yang mahal hingga propaganda-propaganda yang merugikan. Tak heran seringkali terjadi pencucian uang akibat *high political cost*. Akibatnya, ketika menduduki kursi jabatan, anggota partai cenderung mengisi ulang pundi-pundi yang dihabiskan melalui korupsi. Ambil saja contoh kasus pencucian uang di Partai Demokrat yang membelit nama Angelina Sondakh, Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum meski baru sebatas desas desus. Alhasil instrumen pernyataan bahwa korupsi adalah budaya kian membumi. Sebuah keprihatinan yang kronis dengan bahaya yang laten.

Sama halnya dengan fungsi rekrutmen politik. Partai membutuhkan kader yang berkualitas dan disinilah kesempatan pemuda untuk terlibat dan mengambil keputusan keberpihakannya pada aktivitas pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, politik di negaranya. Sayangnya, partai politik sebagian besar tidak melaksanakan

kaderisasi dengan seharusnya, akibatnya kancah perpolitikan internal dan kancah politik negara berputar pada orang yang itu-itu saja. Orang-orang dengan usia yang sudah tak terlalu produktif, dan selalu itu lagi itu lagi. Tanpa disadari ada pengebirian potensi anak muda untuk berlaga.

Meskipun perbedaan antar partai memang berpotensi menimbulkan konflik, namun seharusnya dijalankan tanpa mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, janganlah heran kalau partisipasi anak muda kian melempem dan tidak bergerak lagi.

Apa peran negara sehingga terjadi apatisisme politik di kalangan anak muda? Depolitisasi berawal dari salah satu sistem yang dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk meredam aksi mahasiswa dan pemuda kaum terpelajar.

Konon, depolitisasi berawal dari NKK/BKK. Apa itu NKK/BKK? NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang dicetuskan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi diberi nama SMPT atau Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi.

Poin terpenting dari NKK/BKK yaitu mengembalikan mahasiswa ke kampus, 'menyadarkan' mahasiswa bahwa urusannya hanya belajar. Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada pergerakan. Kebijakan pemerintah ini semata untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan yang penuh gejolak dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. NKK/BKK ini dicetuskan tepat setelah meledaknya aksi Malari (Malapetaka Lima Belas Januari)



tahun 1974, yakni aksi demonstrasi besar-besaran pada zaman Orde Baru tepat ketika ada kunjungan dari Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap Jepang yang pada saat itu dianggap sebagai lintah darat dalam perekonomian Indonesia karena mengambil lebih dari 53% ekspor (71% diantaranya berupa minyak) dan memasok 29% impor Indonesia. Selain itu investasi Jepang semakin bertambah dari waktu ke waktu dan dianggap membunuh pengusaha-pengusaha kecil pribumi. Tak hanya itu, aksi ini juga turut memprotes korupsi dalam pemerintahan Soeharto dan jajarannya. Hal ini mendapat perhatian dari masyarakat khususnya kalangan mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi bersama di pusat ibukota. Pergerakan ini dipimpin oleh Hariman Siregar yang saat itu menjabat sebagai ketua DMUI (Dewan Mahasiswa

Universitas Indonesia). Aksi ini tadinya direncanakan sebagai aksi damai, namun tanpa disangka yang terjadi adalah aksi kekerasan di berbagai tempat di ibukota. Mobil, motor, dan produk elektronik Jepang semuanya dibakar, hingga gedung-gedung dan pusat perbelanjaan di Senen, Harmoni, pun turut dibakar.

Sejarah kelam ini menjadi tonggak pemikiran bahwa NKK merupakan reaksi dari kondisi politik praktis yang terlalu tinggi di kampus dan disinyalir mengkhawatirkan kondisi politik negara. Penerapan NKK adalah bentuk depolitisasi kehidupan kampus yang memotong infrastruktur politik kampus dan berbagai potensi kemunculan politik kampus. Melalui NKK ada aturan-aturan seperti skors bila mulai ada kemunculan politik dan mengerdilkan keberanian kaum intelektual untuk beraksi. Hal ini didukung pula

dengan wewenang pihak universitas yang terhimpit pemerintah. Melalui Pembantu Rektor III dan Pembentuk Dekan III pada universitas zaman itu, sangat memengaruhi dan mengontrol organisasi kemahasiswaan dimana setiap kegiatan harus mendapat izin terlebih dahulu dari rektorat. Konsep NKK ini menjadi medium penguat birokrasi kampus. Tidak ada otoritas *student government* yang ideal akibat campur tangan birokrasi kampus.

Organisasi intra dianggap organisasi yang tunduk dan tidak kritis serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melalui rektorat. Jadi jangan heran kalau akhirnya politik kampus hancur, depolitisasi kian subur, apatisme sosial, dan kemiskinan kehidupan kampus. Perhatian mahasiswa sepenuhnya tercurah pada hal-hal yang bersifat akademis saja demi mencapai kultur akademis yang baik. Kehidupan mahasiswa seolah seperti katak dalam tempurung.

Setelah tahun 1978 tidak ada gerakan besar yang dilakukan oleh para intelektual, yang disebabkan pemberlakuan NKK dan BKK oleh pemerintah secara 'paksa'. Sebenarnya kebijakan BKK pun dipergunakan untuk membekukan Dewan Mahasiswa (Dema) dan melahirkan badan perwakilan tingkat fakultas yang memberi wewenang kepada rektor serta pembantunya untuk menentukan kegiatan mahasiswa sesuai ketentuan NKK.

Depolitisasi mahasiswa di era Orde Baru melalui NKK/BKK sangat membatasi gerakan mahasiswa yang dampaknya masih terasa sampai hari ini karena terkikisnya kesadaran mahasiswa dalam politik. Gerakan mahasiswa yang dibangun pada masa itu rata-rata dilakukan secara bawah tanah dalam bentuk diskusi di ruang-ruang kuliah dan bentuk diskusi

lainnya, tidak seperti sekarang dimana *social media* memberikan banyak peluang untuk berdiskusi dan berpendapat. Namun setelah tumbangnya Orde Baru entah kemana pemuda-pemudi yang mau berkontribusi positif dalam perbaikan sistem. Pemuda enggan mengambil peran dalam kancah politik untuk mensejahterakan rakyat.

Sejak peresmian NKK/BKK mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap masalah rakyat dan bangsanya justru dianggap abnormal: selalu dibuntuti intel, bahkan bisa dijabloskan ke penjara dengan tuduhan subversif. Contoh lain misalnya, hanya karena membaca dan mendiskusikan buku-buku karya sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang dianggap 'kiri', para aktivis Kelompok Diskusi Palagan (sebuah kelompok diskusi mahasiswa) ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan subversif.

Mahasiswa yang merupakan *agent of change* memiliki kekuatan yang begitu dikhawatirkan oleh petinggi otoriter hingga tanpa disadari mereka membuat undang-undang untuk mengebiri gerakan sosial, diskusi, aksi dari organisasi, dan juga pers kampus. Kasus lain di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1977. Ada sebuah kelompok diskusi bernama GEMINI di kalangan mahasiswa FH UGM. Kelompok belajar ini merupakan anggota GMNI yang secara historis bertentangan dengan Soeharto sehingga harus bergerak di bawah tanah untuk melakukan pengkaderan. Sedemikian mencekamnya suasana kegiatan berpolitik bahkan berdiskusi pada masa itu.

Hal senada dialami pula oleh teman-teman pers kampus tepat setelah peresmian Undang-Undang melalui NKK/BKK. Setelah tenggelamnya pers kampus, muncul segera peraturan Menteri bahwa pers

Generasi (lama) yang korups
hanya dapat menurunkan
generasi (baru) yang korup
(juga). Kalau yang baru
korup, siapa yang mengajari?
Semoga kelak, kala generasi
sekarang sudah menjadi
senior, tidak menurunkan
generasi yang korup!



mahasiswa harus masuk penerbitan khusus dan pemberlakuan SIT (Surat Izin Terbit) Akibatnya tentu membatasi ruang gerak pers mahasiswa pengarahannya pada isu sosial politik di sekitarnya.

Tahun 1978, pemerintah membredel 7 surat kabar kota. Alhasil terjadilah kekosongan pers umum dan menjadi peluang bagi pers internal mahasiswa menaikkan berita dengan angle yang elegan dan cerdas. Namun, IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) selalu dirongrong usahanya dalam melakukan pendidikan jurnalistik dan diskusi. Banyak kampus yang tidak mengizinkan ruangan mereka dipakai untuk kegiatan ini. Begitu banyak upaya untuk mematikan IPMI, salah satunya dengan didirikannya Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia (BKSPMI) bertujuan mengerdilkan IPMI. Sistem mempersulit IPMI dalam menentukan status di dalam kampus, atau di luar kampus. Keduanya memiliki resiko yang berat. Apabila tetap di dalam mereka menjadi subsistem struktur birokrasi kampus, apabila di luar kampus tentu usia pers mahasiswa dijamin tak lama dan selalu menjadi incaran mata-mata.

Mahasiswa hanya diberikan hak berkegiatan memenuhi hobi mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Kini, nampaknya kampus yang semestinya melahirkan individu-individu berhati nurani terjebak dalam situasi depolitisasi, deorganisasi, dan deideologisasi. Hal tersebut masih berlangsung subur hingga sekarang dan berdampak pada minimnya pengawasan akan kegiatan politik yang disinyalir sebagai pusara korupsi. Jangan-jangan memang NKK/BKK tidak pernah menghapuskan hanya berganti jubah sehingga samar-samar tak kita kenali lagi. Padahal sesungguhnya ia

masih ada, dan berkeliaran.

Tak dapat dipungkiri kampus merupakan lahan kaderisasi tempat menggembelng kaum muda berpendidikan tinggi sebagai calon-calon penerus tongkat estafet kepemimpinan nasional. Mahasiswa harus diajak meleak politik, namun hendaknya bukan politik partisan atau sekadar kepanjangan tangan partai politik di luar kampus. Politik mahasiswa adalah sebagai kepanjangan tangan rakyat dan bangsa secara keseluruhan.

Sebetulnya apa yang dilakukan Orba dengan depolitisasi kampus dulu hanyalah siasat demi pelanggengan kekuasaan Soeharto saja. Supaya para mahasiswa dan kaum intelektual saat itu mau menjadi aktor-aktor terdidik yang penurut kepada rezim yang berkuasa. Dengan alasan itulah, organisasi-organisasi ekstra mahasiswa seperti PMKRI, HMI, GMNI, PMII, IMM, GMKI, diusir dari kampus. Sebab ormas-ormas inilah yang konsisten melakukan kaderisasi bagi para mahasiswa sehingga mereka selalu berada di bawah kontrol penguasa. Kelompok-kelompok diskusi, sebagai ajang *intellectual exercise*, juga harus diberi ruang untuk hidup dan berkembang. Pers kampus yang kritis dan profesional harus diberdayakan. *Student government* atau dewan mahasiswa harus diberi ruang hidup agar dapat menciptakan suasana kondusif bagi terjadinya dialektika pemikiran yang beragam dan menjadi wahana bagi para mahasiswa untuk melatih diri menjadi calon pemimpin bangsa dan negara di masa depan. Sejalan dengan itu, organisasi intra mahasiswa dan otoritas kampus perlu *welcome* terhadap ormas-ormas ekstra. Di sisi lain, ormas-ormas ekstra harus bisa menahan diri untuk tidak menjadikan kehadirannya sebagai pemecah belah

kampus atau sekadar perpanjangan kepentingan partai politik yang berada di luar kampus.

Korupsi di Indonesia merupakan duet dari masalah politik dan masalah ekonomi. Korupsi merongrong kekuasaan atau legitimasi pemerintah di mata kaum muda yang berpendidikan (kaum intelegensia) sehingga mengurangi produktivitas birokrasi yang seharusnya. Partisipasi masyarakat dan pemuda untuk mengawasi kian menurun. Korupsi turut pula mengurangi dukungan rakyat untuk pemerintah seperti yang terjadi kini.

Pemuda sesungguhnya dihadapkan pada permasalahan yang sama dengan mereka yang mencoba menganalisa korupsi, yakni data dan dokumen yang realibilitasnya benar dan valid tentang fakta transaksi korup yang tak terjamah akibat kepentingan untuk menjaga kerahasiaan. Kaum muda selalu berada pada titik upaya pemuasan rasa keingintahuan yang tinggi, dan ketika bertemu dengan kegagalan mengetahui sesuatu, beberapa diantaranya memilih untuk mundur dibandingkan untuk maju. Sebagian lagi terus maju mencari tahu.

Ayo Mulai Bergerak: Anak Muda Vs Korupsi!



Sudah kita pahami bersama mengenai depolitisasi dan karakteristik anak muda masa kini yang kian dinamis bersama perkembangan zaman. Tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi seperti orang tua kita, atau menjadi anti mainstream dengan ketertarikan pada hal-hal dogmatis, pada isu-isu politik, filosofis, yang bukan menjadi trend saat ini. Kalau dalam kacamata saya, sesuatu yang terlalu anti mainstream sesungguhnya terlampau mainstream. *Yes, anti mainstream is too mainstream.*

Belum terlambat untuk keluar dari kerangkeng depolitisasi. *Jangan panik*, menjadi orang yang meleak politik bukan berarti harus memasuki kancah perpolitikan kok. Menjadi politisi itu *passion*, ketika kita tak terpanggil untuk memasuki gerbangnya, lebih baik menunggu di luar dengan tetap terjaga bukan? Dengan penjagaan ketat tidak akan ada oknum-oknum jahat yang bisa menyusup dan memporak-porandakan sistem. Selain itu tidak ada kok status profesi atau kerja sebagai 'politisi'.

Anak muda begitu sibuk dengan sekolah, kuliah, dan kurikulum yang sedemikian rupa dikemas. Andaikan pendidikan anti korupsi dan politik bisa merambah dengan utuh dalam kurikulum, tentu sangat memungkinkan anak muda di perkotaan lebih peka pada isu ketimpangan sosial di sekitarnya. Secara otomatis pemuda Indonesia bisa mendapatkan pendidikan politik yang benar tanpa ada pergesekan kepentingan. Pendidikan politik dan pembahasan isu-isu terkini di sekolah (tak selalu soal politik, tetapi soal ekonomi dan budaya) adalah bentuk dari penyampaian informasi publik yang memang menjadi hak segenap warga negara.

Hal ini tentu sudah terjustifikasi *lho*.

Seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesungguhnya, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting ketahanan nasional. Keterbukaan informasi publik pun menjadi sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dua pokok inilah yang paling relevan mengapa pemuda dan kaum pelajar pun harus menerima informasi publik. Dengan informasi tersebut, kita akan terlibat untuk ikut mengawasi proses pengambilan kebijakan publik.

Mengingat pemerintah dan kebijakan dalam publik pun tak memenuhi kebutuhan akan keterbukaan informasi yang seharusnya, NGO atau *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* (di Indonesia namanya LSM alias Lembaga Swadaya Masyarakat) hadir menjadi jembatan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintahan. Dengan kata lain, NGO mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi oleh pemerintah. NGO adalah organisasi berbasis nilai (*value-based organizations*), bantuan amal (*charitable donations*) dan pelayanan sukarela (*voluntary service*). NGO sendiri semakin bertransformasi menjadi lebih profesional dengan prinsip-prinsip *altruism* (mementingkan orang lain) and *voluntarism* (kesukarelaan) masih menjadi ciri utamanya.

Peranan NGO sesungguhnya

Mengingat pemerintah dan kebijakan dalam publik pun tak memenuhi kebutuhan akan keterbukaan informasi yang seharusnya, NGO atau *NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION* hadir menjadi jembatan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (*non-profit organization*) yang tidak terkait dengan pemerintahan. Dengan kata lain, NGO mencoba untuk mengisi ruang yang tidak akan atau tidak dapat diisi oleh pemerintah. NGO adalah organisasi berbasis nilai (*value-based organizations*), bantuan amal (*charitable donations*) dan pelayanan sukarela (*voluntary service*).

diperuntukkan demi membangun suatu masyarakat dan bangsa. Ini disebabkan karena banyak pembiayaan dari perorangan, institusi dan pemerintah untuk masyarakat disalurkan melalui NGO. Beberapa bidang yang digeluti oleh NGO, antara lain; pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan, penanganan kesehatan khusus, masalah sosial masyarakat, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, masalah pengembangan daerah, dan isu perempuan.

Korupsi merupakan bagian dari bidang yang digeluti NGO, yakni kaitan dengan pendidikan masyarakat (pendidikan politik), masalah ekonomi, masalah sosial masyarakat, dan korupsi menjadi penyebab kegagalan pengembangan daerah akibat penyalahgunaan pejabat dalam otonomi daerah. *Yah*, bahkan sebenarnya korupsi sudah merambah di semua sektor kehidupan kita, jadi korupsi memang PR yang menumpuk yang membuat siapapun muridnya enggan untuk mengerjakan.

Disinilah kita mengenal Transparency International Indonesia, salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO dengan bidang antikorupsi yang terus mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, masyarakat sipil, dan tentunya kaum muda. TII yang kemarin melaksanakan Youth Proactive Roadshow kerap melakukan aksi lain seperti mereview kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran indeks korupsi melalui riset Indeks Persepsi Korupsi khususnya untuk memantau tingkat korupsi di Indonesia. Mengingat pemerintah yang sering luput dari pengawasan publik, TII mengembangkan pula Pakta Integritas

sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah. Demikianlah alasan mengapa NGO memposisikan diri mereka sebagai fasilitator bagi anak muda. Masa depan bangsa kita sesungguhnya tercermin dari masa depan yang berada di balik sel-sel mimpi anak muda.

Apakah NGO adalah satu-satunya wadah yang menyediakan gerakan sosial dan pengembangan pendidikan sosial politik bagi generasi muda? Tentu saja tidak, masih ada beberapa gerakan, organisasi, dan komunitas anak muda yang hadir untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan.

MPK memiliki hak antara lain; mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS, memberi kritik dan saran terhadap kinerja Pengurus OSIS, meminta Laporan Pertanggungjawaban dari Pengurus OSIS, mengeluarkan anggota OSIS yang tidak aktif(berkontribusi) di OSIS, menegur OSIS jika ada suatu kesalahan serta membubarkan OSIS.

Di ranah universitas, ada pula BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, atau Lembaga Legislatif Mahasiswa. Kancah universitas berusaha mempraktikan miniatur trias politika namun seringkali tidak berjalan dengan maksimal. Penyebabnya? Tentu saja depolitisasi itu sendiri dan mandulnya kinerja organisasi akibat kekangan sistem sehingga student government tidak berjalan sesuai fungsi dalam trias politika masing-masing.

Contoh kasus, seorang mahasiswa yang terlibat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa tidak diperkenankan untuk mencanangkan acara, aksi, dan kegiatan yang berbau politik. Alasannya adalah karena visi misi kampus yang sosialis bukan politis.

Padahal menurut saya, dengan keterlibatan anak muda dengan lembaganya yakni organisasi intra kampus yang maksimal ikut mengawasi kinerja kepemimpinan rektorat dan turut serta mengawasi kebijakan publik. Mengapa harus mahasiswa mengawasi kebijakan publik? Karena semua kebijakan publik akan dilaksanakan oleh masyarakat termasuk anak muda. Nah, apakah kebijakan tersebut tidak diselewengkan?

Ambil saja contoh kasus Hambalang. Menurut pemberitaan di Sindo News.com 27 Januari 2013. Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudo Husodo mengatakan, contoh yang paling terbaru dari korupsi dalam kasus Hambalang bahwa itu merupakan korupsi yang sudah direncanakan. Contohnya apa, pembangunan proyeknya, sudah diatur siapa yang merancang Hambalang, dana dari Rp100 miliar membengkak menjadi Rp1,2 triliun dan sudah didesain siapa pemenangnya. Tingginya kasus korupsi di Indonesia, disebabkan karena dalam proses melakukan korupsi, sudah dipraktikkan sejak adanya pengadaan suatu proyek, dan itu dilakukan secara terencana.

Selain organisasi intra kampus yang dikebiri melalui depolitisasi, sesungguhnya masih ada wadah lain yakni organisasi ekstra seperti GMNI, HMI, KAMMI, GMKI, dan PMKRI. Perbedaan dari organisasi intra dan ekstra ini terletak pada kepastian *change*-nya. Menurut wawancara saya dengan Pak

Siapa bilang kalau mengikuti organisasi intra dan ekstra pun sia-sia. Saya sempat mewawancarai aktivis kampus Universitas Diponegoro yang ingin tetap melanjutkan *change*-nya dengan bergabung di LSM Pattiro Semarang (Pusat Telaah dan Informasi Regional). Namanya Mbak Yuni, salah satu, officer di Pattiro. Sewaktu

zaman dia masih berkuliah di UNDIP, ia terlibat sebagai senator mahasiswa. Selain itu, Mbak Yuni ini menjabat sebagai ketua bidang komisi advokasi di wilayah UNDIP. Mantan aktivis kampus UNDIP ini mengaku mungkin pergerakan teman-teman mahasiswa di UNDIP tidak semilitan teman-teman di UI atau ITB. Mbak Yuni pun tergabung dalam organisasi ekstra yakni KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

"Saya dari mahasiswa sudah sering dengar tentang Pattiro, bahkan setiap peringatan hari Anti Korupsi, Pattiro selalu bikin acara dan melibatkan teman-teman di senat atau BEM." Ada salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pattiro pada tahun 2006 yakni pelatihan penyusunan APBD organisasi kemahasiswaan. Sosok Mbak Yuni yang idealis dan ingin mengubah masyarakat Semarang menjadi lebih sejahtera memutuskan masuk Pattiro. "Target yang sedang digenjut oleh Pattiro adalah bagaimana menurunkan presentasi kemiskinan di Semarang sebanyak 2%." Ada pula Gerdukempling atau Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan semua melibatkan stakeholder, pemerintah, CSR, akademisi, dan masyarakat. Salah satu program yang diakui nasional hingga Semarang mendapatkan penghargaan dari Kemensos berkat program ini."

Bahkan mas Aryanto Nugroho, seorang petinggi Pattiro pun adalah mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro menyatakan pendapatnya tentang organisasi ekstra kampus. Bagi beberapa orang, aksi-aksi yang dilakukan teman-teman KAMMI, PMII, GMNI, dan PMKRI mungkin akan di cap sebagai aksi 'sok ideologis', di cap politis. Padahal, satu-satunya kelebihan terkuat yang dimiliki

oleh organisasi eksternal ini adalah ideologi. Sehingga dengan ideologi tersebut, mereka memiliki target perubahan yang jelas. Sementara organisasi internal inilah yang masih perlu dihembusi roh change itu. Kalau terus menerus membebek, bagaimana bisa roh itu eksis?

Nah, sekarang siapakah sahabat baik gerakan mahasiswa yang memiliki peran penting bagi perubahan? Sahabat itu adalah pers mahasiswa. Banyak tulisan yang kritis sepanjang sejarah lahir dari tangan-tangan penulis pers mahasiswa. Pers Mahasiswa pada masa demokrasi terpimpin contohnya, bekerja sama dengan Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Pers mahasiswa selalu menunjukkan aksinya dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran sikap oposisi kepada penguasa. Inilah yang membuat penguasa gentar dan mulai menyusun cara membredel pers mahasiswa, salah satunya majalah Salemba, Universitas

Indonesia tahun 1980. Salah satu tokoh pers mahasiswa yang begitu luar biasa di mata saya pada masa Orde Lama adalah Soe Hok Gie, aktivis angkatan 66.

Pantas saja kalau Aryanto Nugroho berpesan bahwa mahasiswa sebaiknya memaksimalkan wadah kolom mahasiswa untuk menyatakan pendapatnya. Selain itu juga meraup informasi dan menambah perspektif penilaian akan suatu isu dari berbagai anak muda di tanah lain.

Selain organisasi, langkah lain menjadi *agent of change* adalah dengan membangun komunitas dan tergabung dalam diskusi penting. Contoh saja di kampus saya, di Universitas Multimedia Nusantara ada sebuah kebiasaan membuat forum bincang bersama tentang persoalan di kampus kami. Diskusi terbuka tersebut kami sebut Bincang Kantin.

Kini, pemuda harus mulai bertransformasi yakni dengan kesadaran untuk menjadi



agen yang membumikan isu-isu anti korupsi ini kepada masyarakat. Karakteristik pemuda yang telah kita bahas bersama, dan kronologis sejarah perjalanan pemuda di Indonesia dari zaman ke zaman sesungguhnya adalah bekal

untuk melanjutkan perjalanan. Pemuda memang didorong untuk menjadi ujung tombak saluran komunikasi dan sosialisasi anti korupsi di tengah masyarakat plural Indonesia yang begitu awam akan praktik korupsi di sekitarnya.

KESIMPULAN

Anak muda masa kini diterpa oleh apatisisme politik. Kecenderungan individualis seringkali mengikis kesadaran dan semangat mereka untuk bergabung dalam organisasi, kegiatan, dan gerakan sosial. Namun jangan kuatir, masih ada kegiatan-kegiatan semacam Youth Proactive Roadshow yang dapat menjadi langkah pertama untuk mulai gerakan anti korupsi. Bahkan, saya berharap melalui penjabaran tentang potensi-potensi dan wadah yang bisa diikuti seperti organisasi mahasiswa intra dan ekstra, pers kampus atau pers sekolah, komunitas dan diskusi maka pelan-pelan anak muda mulai memahami pentingnya transparansi dan pengawasan demi kelancaran proses kepemimpinan pemerintah dan upaya penyejahteraan rakyat. Sehingga janji tak lagi sekedar janji.

Meskipun apatisisme memiliki dampak yang cukup besar dan masih berkesinambungan hingga saat ini namun dengan upaya yang keras dan semangat yang terus digali saya yakin musuh apatisisme itu pelan-pelan bisa diberantas. Titik terang akan pemberantasan apatisisme politik karena kita sama-sama sudah memahami bahwa media massa memegang kendali besar dalam pembentukan mindset apatisisme akibat pemberitaan yang selalu negatif, Sistem pun turut ternyata membatasi kebebasan dan sudah sepatutnya inisiatif dan kreatifitas

menjadi andalan anak muda dalam upaya memerangi apatisisme setahap demi setahap.

Jadi, ada apa antara anak muda, politik, dan korupsi? Pertama, ada sejarah yang membalutnya dulu dan dampak yang terwariskan seperti sekarang. Kedua, ada keterikatan rohaniah satu dan lainnya namun terasingkan dan terputus akibat praktek-praktek modus-modus kepentingan politis tanpa melibatkan anak muda. Terjadinya pemangkasan kontribusi anak muda melalui berbagai kegiatan yang seharusnya bisa dilakukannya karena menyuburkan sistem feodal yang tidak mempertimbangkan posisi anak muda di dalamnya. Ketiga, apatisisme yang kian menguat dan menjadi bahaya laten karena menurunkan solidaritas kepada masyarakat, dan menipisnya pengawasan pemuda dan masyarakat sehingga memperbesar peluang korupsi. So, bagaimana solusi terbaik agar kita jangan hanya pasrah terbawa arus yang direncanakan?

Mulailah mengaktifkan sel-sel keingintahuan dan gelora muda-mu melalui kegiatan positif yang sudah kita ketahui bersama. Dimulai dengan berorganisasi di sekolah dan di kampus. *Eits*, tapi ingat, pikul tanggung jawab itu dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Berbagai wadah sudah tersedia *kok, nah* kitalah yang seharusnya mengaktifkan dan menggunakan lembaga tersebut dengan

bijaksana untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Semoga dengan membaca ini anak muda Indonesia memahami posisinya sebagai *agent of change* atau agen perubahan. Langkah awal tentu dengan merumuskan 'change' itu sendiri. *Apa*

change-nya? Tentu saja change itu adalah **fokus meminimalisir korupsi** dan **memutuskan rantai korupsi**. *Ingat*, anak muda berhak untuk jujur pada diri dan cita-citanya. Semangat! *Salam, INDONESIA! Berani Jujur Hebat!*

Daftar Pustaka

Budiarmo, Miriam. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, Fajri & Nadhifah, Niesrina. (2012). Aksi Kita: Panduan Kita Melawan Korupsi. Jakarta: Penerbit Transparency International Indonesia & ClubSPEAK Suara Pemuda Anti Korupsi

Alatas, Syed Hussein. (1986). Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES.

Lubis, Mochtar & Scott, James. C. (1993). Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Abdullah, Taufik, dkk. (1987). Pemuda dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES

Sjahrir. (1987). Pilihan Angkatan Muda: Menunda atau Menolak Kekalahan. Prisma No. 6 Tahun XVI. Jakarta: LP3ES

Syuaib, Fauzie. (1987). Organisasi Kemahasiswaan: Upaya Mencari Bentuk Baru. Prisma No. 6 Tahun XVI. Jakarta: LP3ES

Subono, Nur Iman & Armando, Ade. (1987). Angkatan Muda dan Masalah Kenegaraan). Prisma No.6 Tahun XVI. Jakarta: LP3ES

Fathoni, Moh. (2012). Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Depok: Penerbit PT. Komodo Books

Transparency International Indonesia From. <http://ti.or.id> 22 Januari 2013

NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION. Disadur dari berbagai sumber dan disajikan pada Kamp Mahasiswa Regional Sumbagut, Perkantas Medan, pada Agustus 2007. From <http://askensinaga.wordpress.com/2008/06/02/ngo-defenisi-sejarah-peranan-pengelompokan-dan-karir/> 22 Januari 2013

KASUS KORUPSI & PEMAHAMAN ANAK MUDA

Oleh: Rendi Novalia



Pendahuluan

Sebagian besar dari kita pasti setuju kalau korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan ini. Tak ingin menyebutnya sebagai budaya, mungkin saya disini akan menyebutnya sebagai kebiasaan. Bahayanya, kebiasaan ini bisa menjadi budaya ketika nilai-nilainya sudah terinternalisasi ke generasi-generasi berikutnya. Bukan sekedar peringatan, tetapi tinggal menunggu kapan akan terjadi jika tidak ada upaya pencegahan untuk mengatasi penyebaran “virus” yang semakin luas dan menyeluruh. Tidak menutup kemungkinan ketika kita gagal untuk melakukannya, maka negara ini pelan-pelan akan *digerogoti* oleh “virus” yang lama-kelamaan menyatu dengan sistem. Layaknya sebuah virus di dalam tubuh manusia, sistem imun akan menangkalnya. Tetapi ketika sistem imun sudah tidak bekerja, maka penyebaran virus akan semakin mudah dan akhirnya tubuh akan dengan mudah terserang penyakit.

Disinilah kemudian peran aktif dari kita untuk meningkatkan sistem imun agar tidak terkontaminasi oleh apa yang dinamakan virus korupsi tersebut.

Siapa sih yang mesti kita jaga dari penyakit korupsi? Tentu, semua dari kita perlu menjaga diri agar tidak turut menjadi pelaku korupsi. Tapi, tanpa merendahkan generasi-generasi yang sudah “uzur”, rasanya pemuda adalah salah satu elemen penting dari bangsa ini yang perlu diselamatkan. Tak perlu saya mengutip pendapat tokoh-tokoh besar dunia untuk menggambarkan betapa pentingnya pemuda. Karena kita tentu memiliki versi jawaban masing-masing yang mengerucut pada pentingnya keberadaan pemuda di negara ini.

Saat ini, kasus korupsi sudah begitu riuhnya di Indonesia. Tiada ada hari tanpa berita kasus korupsi. Pasrah? Cuek? Mengutuki?, mungkin ini respon sebagian besar pemuda untuk berita-berita



tersebut. Untuk mereka yang *cuek* dan pasrah mungkin perasaan ini merupakan akumulasi dari apa yang mereka rasakan. Sebuah bentuk kekesalan terhadap mereka yang korup tetapi sudah diketahui seperti apa akhir ceritanya. Juga, bisa merupakan sebuah pengalaman sehari-hari dari kehidupan mereka. Yang membawa mereka pada sebuah kesimpulan bahwa kalau pejabat di level bawah saja sudah melakukan korupsi maka tidak mengherankan jika pejabat di level atasnya akan melakukan hal yang sama. Pada akhirnya mereka hanya bersikap *cuek* dan pasrah serta memberikan kutukan kepada pelaku dan kemudian melupakannya. Padahal, seperti kata penggiat HAM, bukankan kebenaran tidak bisa terwujud kalau ada kata lupa di dalamnya.

Nah, disinilah pemuda sebetulnya mengambil bagian, selain harus sadar untuk tidak melakukan tindakan korupsi, pemuda juga harus paham terhadap kasus korupsi di sekitarnya. Jika anak muda dibiasakan untuk tidak peduli dan tidak paham pada keadaan di sekitarnya, sama saja kita membiarkan para koruptor di luar sana untuk melakukan tindakannya. *Kecuekan* dan rendahnya pemahaman terhadap korupsi itulah yang perlahan-lahan bisa menjerumuskan bangsa ini ke lubang yang semakin dalam.

Kesadaran dan pemahaman akan korupsi pun tidak seharusnya kita simpan di dalam diri kita saja. Kesadaran itu perlu kita

bagikan kepada pemuda-pemuda lain yang masih berada dalam kenyamanan “dunia” mereka. Layaknya seorang ilmuwan yang menemukan obat untuk menangkal penyakit, untuk menambah faedahnya obat itu harus dibagikan kepada orang lain. Nah, disinilah peran kita yang sudah sadar dan paham akan bahaya korupsi untuk berbagi kesadaran dan pemahaman tersebut kepada orang-orang di sekitar kita.

Korupsi sendiri telah mengambil bentuknya yang lain, mereka telah mengubah modus dan istilah yang hanya dimengerti oleh pelaku. Disinilah perlunya pemahaman dari kita untuk semakin pintar dalam menyikapi berbagai kasus-kasus korupsi di Indonesia. Paling tidak, di daerah dimana kita berada kita tahu kasus-kasus



apa yang terjadi. Dalam upaya untuk memahami hal tersebut, di dalam tulisan ini, saya akan membahas beberapa kasus korupsi yang terjadi di beberapa lokasi. Lokasi-lokasi tersebut adalah kota Makassar, kabupaten Garut, kabupaten Batang, kota Semarang dan Yogyakarta. Kenapa hanya kota/kabupaten tersebut? Dalam rangka hari anti korupsi pada tanggal 9 Desember 2012 tahun kemarin, TII dan beberapa lembaga lainnya mengadakan *roadshow* sejak tanggal 13 hingga 19 Desember 2012 ke kota/kabupaten tersebut. Sehingga fokus pembahasan ada di kota/kabupaten

tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kasus-kasus yang terjadi kota/kabupaten itu juga terjadi di kota/kabupaten lainnya di Indonesia.

Kasus-kasus itu sendiri, diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada narasumber yang ada seperti mitra lokal, peserta dan beberapa narasumber lainnya. Disertai dengan penelusuran lewat media untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. Selain itu, tulisan ini juga membahas bagaimana anak muda memandang korupsi? Serta peran yang bisa dimainkan oleh mereka?

Apa sih Korupsi itu?



Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu apa *sih* korupsi itu. Harapannya, pengertian tersebut dapat memberikan penjelasan kepada kita tentang perilaku atau tindakan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai korupsi. Menurut TII (*Transparency International Indonesia*), korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pengertian ini memberikan kita penjelasan bahwa tindakan pejabat atau mereka yang memiliki kekuasaan dan berusaha memperkaya dirinya atau kelompoknya dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki adalah tindakan korupsi.

Hampir sebagian besar lembaga di Indonesia memang sudah terjangkit virus korupsi, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak hanya di level nasional tapi juga lokal, tidak hanya yang sifatnya makro tapi juga mikro. Setiap orang tentu akan dengan mudah jika ditanyakan “siapa yang pernah mengalami kesulitan ketika mengurus KTP, SIM, STNK dll, tapi ketika ada uang, semua menjadi mudah?” Hampir pasti sebagian besar akan mengatakan pernah mengalaminya. Sudah menjadi rahasia umum memang, tapi anehnya perilaku tersebut tetap terpelihara.

Ironis, tapi seperti itulah keadaan saat ini. Hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia pernah mengalaminya. Hanya beberapa tempat mungkin yang berusaha untuk melakukan reformasi agar tidak melakukan hal yang serupa. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri pada tahun

¹ <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=3272> (Senin, 14 Januari 2012)

2012 pernah melakukan survey integritas sektor publik di 60 pemerintahan daerah dan sekitar 5640 orang responden di tingkat pemerintah daerah. KPK menggunakan beberapa indikator untuk memperoleh angka-angka tersebut. Salah satunya, kemudahan dalam pembuatan KTP, SIUP dan IMB. Dari survey tersebut diperoleh hasil bahwa ada 16 daerah yang masih berada di bawah nilai standar yang ditetapkan KPK (standar KPK 6) diantaranya Pemkot Semarang, Pemkot Depok, Pemkot Bekasi dan beberapa kota lainnya.¹

Sulitnya membuat KTP, SIUP dan IMB adalah satu dari sekian banyaknya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu, seperti apa kasus korupsi yang terjadi di kota/kabupaten yang menjadi tujuan *roadshow*?

Korupsi di Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2004, pemerintah pusat memberikan “kelonggaran” kepada daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Hak yang diberikan oleh pusat kepada daerah tersebutlah yang kini kita kenal sebagai otonomi daerah. Sederhananya, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara mandiri untuk kesejahteraan rakyat tanpa ada campur tangan pemerintah pusat lebih dalam. Namun pada perkembangannya seperti apa yang dikatakan oleh Vedi R. Hadiz, desentralisasi menciptakan “bos-bos lokal” di daerah-daerah otonomi.

“Bos-bos lokal” tersebut akan menciptakan kerajaan-kerajaan sendiri

di daerah-daerah tersebut. Maka tidak mengherankan jika kemudian kita menemui pemimpin di daerah tertentu yang merupakan anak dari mantan bupati atau istri dari mantan bupati dan seterusnya. Dampak lain dari otonomi daerah adalah kegaduhan dalam menentukan kepala daerah yang memimpin. Tidak aneh juga jika setiap pilkada berlangsung, ada saja ketidakpuasan dari pihak-pihak yang kalah atas hasil pilkada yang berlangsung. Lalu apa hubungannya dengan korupsi?

Perlu rasanya saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo ketika acara *roadshow* berlangsung disana, yaitu menjadi kepala daerah atau pemimpin bukan pekerjaan. Apa maksudnya? Selama ini banyak kepala

“

Hampir sebagian besar lembaga di Indonesia memang sudah terjangkit virus korupsi, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak hanya di level nasional tapi juga lokal, tidak hanya yang sifatnya makro tapi juga mikro.

”



daerah atau pemimpin yang salah persepsi mengenai tugas yang diemban oleh mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan saat ini adalah sebagai pekerjaan. Menjadi pemimpin adalah amanah yang diberikan oleh rakyat, amanah untuk mensejahterakan rakyat di tempat dia memimpin. Sementara yang banyak terjadi adalah, pemimpin daerah menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri maupun kelompoknya. Mereka menjadi “gila” kekuasaan dan berbuat apapun untuk mendapatkannya. Politik uang pun dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah terpilih, usaha untuk mendapatkan modal yang dikeluarkan dalam pemilukada adalah target utama dalam masa kepemimpinannya. Tidak mengherankan makanya jika banyak diberitakan kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi akibat *mark up* (menaikan anggaran dari yang seharusnya) proyek di sektor pendidikan, kesehatan dll, atau

spesifikasi fisik bangunan tidak sesuai dengan anggaran yang ada dan banyak lagi.

Di Garut, sebagai calon independen (tidak dicalonkan oleh partai politik) Aceng Fikri juga tidak bebas dari kasus korupsi. Berbeda dari calon yang berasal dari partai politik, seorang calon independen agar dapat maju dalam sebuah pilkada harus memperoleh dukungan awal dari sejumlah besar warga di daerah tersebut. Jika si calon independen bisa menang dalam pilkada tersebut artinya mereka mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat. Maka seharusnya dia bekerja sepenuhnya untuk rakyat bukan untuk partai politik. Apa yang dilakukan oleh Aceng Fikri justru sebaliknya, disamping ramai dengan kasus nikah sirinya, Aceng juga terlibat kasus korupsi. Dari wawancara dengan G2W (*Garut Governance Watch*) diperoleh fakta bahwa ternyata dia telah melakukan korupsi sebesar 500 miliar.²

Setelah ditelusuri lebih jauh dari media, ternyata Aceng Fikri terlibat dalam kasus-

kasus proyek fiktif. Menurut kabar yang diberitakan oleh media tempo, salah satu kasus yang melibatkan Aceng Fikri adalah kasus korupsi pengadaan alat tulis kantor. Ternyata, setelah dicek, proyek tersebut fiktif dan anggaran proyek tersebut diduga dialihkan untuk biaya pengamanan sang bupati.³ Tidak hanya Aceng Fikri, bupati sebelumnya yaitu Agus Supriyadi juga adalah terpidana kasus korupsi. Jadi mantan bupati hingga bupati yang menggantikannya juga terlibat dalam kasus korupsi.

Sama halnya dengan di Garut, mantan bupati Batang juga terlibat dengan kasus korupsi. Hanya saja di kota ketiga tujuan *roadshow* ini memiliki bupati pengganti yang *concern* dalam usaha mencegah korupsi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saat ini Batang dipimpin oleh seorang bupati yang bernama Yoyok Riyo Sudibyo. Dia menjabat sebagai bupati menggantikan Bambang Bintoro. Mantan bupati ini terlibat dalam kasus korupsi yang akhirnya menjebloskannya ke penjara. Bahkan lucunya, balaikota tempat mantan bupati ini bertugas dahulunya sempat dijadikan “kebun binatang” pribadi. Bambang Bintoro sendiri terlibat dalam kasus asuransi bagi anggota DPRD Batang. Pak Yoyok sebagai pengganti bupati terdahulu nampaknya tidak ingin melakukan hal yang sama. Bupati yang bisa dikategorikan masih muda ini berusaha mengubah sistem dalam usaha mencegah korupsi. Bahkan apa yang dilakukan oleh bupati ini mendapat apresiasi dari Pak Bram seorang anggota DPRD dari PDIP. Meskipun

Pak Bram di parlemen berperan sebagai oposisi pemerintah, tapi untuk kinerja Pak Yoyok, beliau memberikan apresiasi.

Tanpa bermaksud untuk memihak, tapi tidak salah apabila kinerja positif mendapat tanggapan positif juga dari kita. Menurut Pak Bram, bupati baru yang masih menjabat sekitar 8 bulan ini berusaha untuk mengubah sistem manajemen birokrasi. Juga, tiap satu hari dalam seminggu, beliau memberikan kesempatan kepada warganya untuk mencurahkan *uneg-uneg* mereka. Tentu hal tersebut perlu diberikan apresiasi, karena pemimpin lain yang ada saat ini seakan memiliki jarak dengan warga yang dipimpinnya. Sehingga mereka tidak mengetahui apa *sih* permasalahan yang terjadi di bawah.

Perubahan sendiri akan terlaksana dengan baik apabila *top-down*nya memiliki kesadaran untuk berubah. Di Batang, *top*-nya (pemimpin) sudah memiliki kesadaran untuk itu, *nah* sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana *down*-nya (yang dipimpin) juga memiliki pikiran yang sama. Takutnya, perubahan yang hanya berpusat di *top* hanya menciptakan resistensi dari *down*-nya. Sehingga perubahan hanya menjadi wacana yang menjadi *boomerang* bagi pemimpin itu sendiri. Tapi saya yakin, pemimpin yang sudah memiliki inisiatif untuk memberantas korupsi telah menjalani setengah perjalanan untuk sampai pada tujuannya.

Di Semarang pun kasusnya tidak jauh berbeda dengan dua kabupaten sebelumnya. Bahkan walikota yang menjabat sudah menjadi tersangka kasus

²Hasil wawancara dengan Kang Yamin anggota G2W di bidang korupsi politik

³<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/05/058445976/Bupati-Aceng-Juga-Dibelit-Dugaan-Korupsi> (Senin, 14 Januari 2012)

korupsi. Semarang sendiri dipimpin oleh Soemarmo Hadi Saputro, dia menjadi tersangka kasus korupsi APBD Semarang yang juga melibatkan Sekda dan beberapa anggota DPRD. Saat ini, Semarang dipimpin oleh pejabat sementara yang dulu menjadi wakil dari Soemarmo yaitu Hendi Hendrar Prihadi. Apa yang dilakukan oleh pejabat sementara yang memimpin saat ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yoyok. Dia berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi di pemerintahannya.

Berkat dorongan dari LSM dan masyarakat, penanggung jawab sementara (PJS) yang sekarang tengah bertugas telah menandatangani Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi (RADPK) dan zona anti korupsi bersama KPK dan lembaga lainnya. Sebagai salah satu implementasi dari komitmennya tersebut, Semarang kini sudah memiliki RAPBS *online* atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah *online*. Dengan adanya RAPBS, setiap orangtua siswa atau siapapun yang

ingin mengetahui anggaran sekolah dapat melihatnya secara *online* di *website* yang telah di buat. Keberadaan sistem tersebut akan menciptakan transparansi sehingga peluang pihak sekolah untuk melakukan tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa perubahan tidak hanya perlu di dorong dari pemimpinnya tapi juga dari yang dipimpin. Menanggapi hal ini, Dini Inayati selaku direktur Pattiro (mitra lokal TII di Semarang) menyatakan bahwa di Semarang para birokratnya sendiri yang justru mendorong untuk melakukan perubahan. Semoga saja usaha pemberantasan korupsi di daerah tersebut dapat mencapai hasil yang maksimal. Meskipun nilai yang diberikan KPK terhadap kota Semarang terkait dengan survey integritas meningkat, tetapi nilainya masih dibawah standar yang ditetapkan KPK. Oleh karena itu masih banyak pembenahan yang dilakukan disana-sini oleh seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Korupsi Kesehatan

Istilah “korupsi tidak pandang bulu” adalah ungkapan yang tepat untuk beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Bahkan di dunia kesehatan pun, perlahan-lahan namun pasti, korupsi mulai menjalar. Hal ini saya temukan dalam diskusi di Yogyakarta. Dalam sebuah diskusi, ada beberapa fakta yang kita tidak sadari selama ini dalam dunia kesehatan. Salah satunya adalah kewenangan seorang dokter dalam memberikan obat kepada pasiennya. Ketika sakit, hal pertama yang dilakukan oleh sebagian besar dari kita adalah pergi ke dokter. Tetapi, seringkali keadaan kita yang lemah karena ‘penyakit’ menutup mata dan pikiran kita untuk selalu

kritis terhadap apa yang diberikan kepada kita. Sehingga tanpa kita sadari, oknum dokter akan memberikan beragam obat kepada kita dengan jumlah yang banyak meskipun penyakitnya hanya flu.

Oknum dokter pun terkadang hanya akan memberikan kita obat-obat dengan *merk* tertentu (harganya mahal) di tiap resep yang diberikan. Tidak salah memang, karena obat tersebut juga dapat mengobati penyakit yang kita alami. Tapi tahukah kita kenapa hal tersebut bisa terjadi? Beberapa dokter biasanya sudah memiliki “kontrak kerja” dengan perusahaan-perusahaan obat dengan *merk* tertentu. Isi “kontrak kerja”-nya adalah,

si oknum dokter akan memperoleh sejumlah uang dengan menyertakan obat dengan merk tersebut dalam resep yang diberikan kepada pasien. Nah, dengan itu selain memperoleh uang dari pasien, oknum dokter tersebut juga akan memperoleh obat dari perusahaan obat tersebut.

Di dalam ilmu politik, ada beberapa hal yang menjadi sumber kekuasaan, salah satunya adalah informasi atau pengetahuan. Seseorang yang memiliki dan menguasai informasi atau pengetahuan dapat dikatakan memiliki kekuasaan. Seorang dokter dapat dikatakan memiliki kekuasaan karena dia memiliki informasi atau pengetahuan lebih mengenai dunia kesehatan. Ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk memperkaya diri si dokter maka dapat dikatakan bahwa dokter tersebut telah melakukan korupsi.

Selain beberapa oknum dokter yang melakukan tindakan korup, beberapa instansi juga turut serta dalam kasus korupsi di bidang kesehatan. Di Garut, berdasarkan informasi dari mitra lokal TII yaitu G2W (*Garut Governance Watch*), terdapat masalah pelayanan kesehatan kepada warga khususnya dalam hal Jampersal (Jaminan Persalinan). Bahkan, sebagian besar warga disana tidak mengetahui apa itu jampersal. Untuk mereka sendiri yang tahu mengenai bantuan tersebut dan ingin mengurusnya akan dikenakan pungutan. Padahal syarat untuk mendapatkan layanan tersebut cukup dengan menyertakan identitas saja. Disinilah sekali lagi kita melihat betapa korupsi begitu merugikan siapa saja. Bahkan seorang bayi pun enggan rasanya untuk terlahir ke dunia ini jika mengetahui untuk lahir saja harus dilibatkan dalam kasus korupsi.

Indah Tak Berarti Bebas Korupsi

Pernahkah kita melihat gedung-gedung pelayanan publik atau sentra pemerintahan yang megah di berbagai tempat di Indonesia? Bangunan-bangunan tersebut tentu menarik perhatian kita, tapi tahukah kita seberapa besar anggaran untuk membangun gedung tersebut?

Atau bisakah kita menjamin kalau di dalam gedung itu tidak ada kasus korupsi yang terjadi?

Di tahun 2012 yang lalu hingga saat ini, Indonesia dihebohkan dengan kasus Hambalang yang melibatkan banyak

pihak. Sebelum kasus tersebut terungkap ke permukaan, mungkin di akhir pelaksanaan proyek tersebut kita hanya bisa mengagumi besarnya keberadaan pusat olahraga tersebut. Tapi siapa sangka, jika ternyata di balik megahnya proyek tersebut ada kasus-kasus korupsi dibalik pembangunannya.



DEMI KEAMANAN DAN KENYAMANAN, DIHIMBAU KEPADA PENGUNA JASA UNTUK MENGGUNAKAN ANGKUTAN RESMI BANDAR UDARA INT'L SULTAN HASANUDDIN

Atau tahukah teman-teman dengan pembangunan perpustakaan Universitas Indonesia yang baru? Siapa sangka di balik kekaguman mahasiswa terhadap perpustakaan megah tersebut ada dugaan tindakan korupsi dibalik pembangunannya. Atau yang sudah tidak asing di telinga kita, beberapa anggota legislatif yang mendiami gedung MPR/DPR yang megah itu ternyata terlibat di dalam kasus-kasus korupsi.

Sedikit kasus diantara kasus-kasus besar lainnya yang belum terungkap tersebut memberikan satu kesimpulan bagi saya bahwa indah tidak selalu bebas korupsi. Indah dalam hal ini tidak selalu dalam artian fisik bangunan tetapi juga terkait dengan pelayanan di dalamnya. Inilah yang saya alami di Makassar, *roadshow* pertama dari beberapa kota lainnya. Siapa yang tidak tahu bandara Sultan Hassanudin di Makassar? Bandara megah yang dibangun pada tahun 1935 dan masih bernama Lapangan Terbang Kadieng ini berhasil memperoleh dua penghargaan pada tahun 2012 yaitu pelayanan prima kategori unit layanan jasa terminal penumpang bandar udara dan posisi pertama indeks kepuasan pelanggan. Banyak pihak yang memang memuji pelayanan di bandara ini, karena memang pelayanannya yang prima. Disamping bandaranya yang bagus, bandara ini pun ternyata memiliki pelayanan yang baik terhadap penumpang. Tapi seperti apa yang saya kemukakan

sebelumnya bahwa “indah” tidak selalu bebas korupsi.

Di lingkungan bandara ini ternyata juga terdapat kasus korupsi, terutama dalam hal transportasi. Disini kita perlu sepakat terlebih dahulu bahwa sebagai apapun keadaannya ketika ada kasus korupsi di dalamnya kita tidak lantas harus diam. Perlu ada kesadaran dari diri kita bahwa korupsi merugikan banyak pihak karena mengambil hak-hak mereka. Di setiap bandara pada umumnya memiliki transportasi resmi.

Dikatakan resmi karena mereka memiliki ijin yang sah dari pihak bandara. Tujuannya agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi penumpang yang menggunakannya. Pihak bandara pun mengetahui hal tersebut dengan memasang spanduk di dalam bandara. Tapi siapa yang mengira jika ternyata ada sejumlah taksi-taksi “gelap” yang berkeliaran di bandara Sultan Hassanudin. Hal ini saya ketahui dari salah seorang supir taksi resmi yang setiap harinya ada di bandara Sultan Hassanudin tersebut.

Menurut keterangan supir taksi yang saya tidak ketahui namanya, taksi-taksi gelap tersebut harus menyetorkan uang sejumlah 20 juta kepada pihak bandara. Besaran uang yang diberikan tersebut akan menjamin mereka untuk beroperasi di dalam bandara. Jelas, tindakan tersebut akan memiliki dampak negatif bagi beberapa pihak. *Pertama*, taksi resmi akan kehilangan penumpang karena taksi-taksi

“gelap” lebih dahulu yang memperolehnya. *Kedua*, keberadaan taksi gelap tersebut menciptakan ketidakteraturan. Sebelum ada taksi gelap, angkutan resmi di bandara akan menunggu gilirannya untuk memperoleh penumpang. Tapi dengan adanya taksi gelap tersebut, taksi resmi akan kehilangan penumpang. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau setiap kita keluar dari bandara akan ada saja orang-orang yang akan menghampiri kita untuk menawarkan jasa angkutan.

Kasus korupsi dengan pola seperti ini mungkin tidak hanya terjadi di bandara Sultan Hasanudin tapi juga di bandara-bandara

lainnya di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi di sektor publik lainnya di Indonesia. Di Indonesia, untuk mengurus perijinan bukan perkara yang mudah dan cepat. Perijinan yang mestinya memakan waktu seminggu bisa jadi *molor* hingga sebulan karena berbelit-belitnya birokrasi. Kalaupun mau cepat dan mudah, biasanya seseorang harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu. Di dalam kasus taksi gelap bandara Sultan Hasanudin, petugas bandara yang menerima sejumlah uang tersebut jelas-jelas melakukan tindakan korupsi karena menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Mengakarnya Korupsi di Indonesia

Setelah kita mengetahui beberapa kasus-kasus korupsi diatas, pasti muncul pertanyaan lanjutan di pikiran teman-teman “kenapa sih korupsi itu terjadi dan terus tumbuh subur di Indonesia?”. Pertanyaan ini yang juga ada di pikiran saya ketika mendengar banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut memang tidak

mudah, karena akan ada banyak faktor yang melatarbelakangi tumbuh suburnya korupsi di Indonesia. Tapi, di dalam pandangan saya, secara umum korupsi bisa berkembang karena ada individu yang mendukungnya, entah itu sikap maupun sifat. Mungkin bisa diperdebatkan, tapi saya adalah salah satu orang yang beranggapan bahwa kita tidak bisa menyalahkan sistem. Seburuk apapun



sistem yang ada, ketika orang yang menjalankannya tepat dan bersih maka sistem itu akan berjalan dengan baik.

Di dalam sistem kesehatan di Garut misalnya, sistem mengharuskan pengurusan Jampersal tidak dipungut biaya. Tapi karena memang mental korup dari individu sudah ada, tetap saja warga dipungut biaya. Dengan kata lain, individu lah yang menentukan kehendaknya sendiri untuk mau atau tidak dalam melakukan korupsi. *Toh*, manusia bukan robot kan?, manusia punya *free will* atau kehendak bebas untuk menentukan hidupnya. Masakan manusia mau begitu saja ikut kemana sistem mengarahkannya, kan tidak? Nah, disinilah alasan kenapa saya bisa mengatakan bahwa individulah yang menentukan tumbuh kembangnya korupsi itu sendiri. Tapi, tidak ada salahnya disini saya menyampaikan beberapa alasan yang setidaknya bisa memperluas perspektif kita tentang kenapa korupsi ada. Andi Hamzah misalnya mengumpulkan beberapa pendapat yang menyebabkan seseorang untuk melakukan korupsi di Indonesia.⁴ *Pertama*, kurangnya gaji atau pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. *Kedua*, manajemen

yang kurang baik dan kontrol yang kurang efisien dan efektif. *Ketiga*, modernisasi. Terkait tentang penyebab ketiga ini, Andi Hamzah mengutip Huntington yang mengatakan bahwa modernisasi membawa perubahan-perubahan nilai dasar atas masyarakat dan membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. *Keempat*, latar belakang budaya dan kultur bangsa Indonesia.

Melanjutkan penyebab keempat, Boesono Soedarso menyatakan bahwa saat ini masyarakat cenderung memberikan toleransi tindakan-tindakan korupsi. Menurutnya, jika masyarakat memiliki semangat seperti halnya mahasiswa melakukan demonstrasi anti korupsi maka korupsi tidak akan kita kenal lagi.⁵ Tapi kenyataannya, masyarakat sekarang cenderung memaklumi korupsi sebagai *way of life* mereka. Tentu kita tidak mau jika masyarakat (khususnya pemuda) menjadi kaum *corruption apologist* yang memandang korupsi sebagai minyak pelumas sistem ekonomi yang tidak berjalan efisien akibat tak berfungsinya birokrasi dan peraturan pemerintah yang tumpang tindih.⁶ Inilah yang menjadi ketakutan bagi kita semua, apalagi jika pemuda memaklumi korupsi selayaknya angin lalu.

⁴ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007. Hlm 13-20.


⁵ Boesono Soedarso. *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009. Hlm 12

⁶ Wijayanto, "Memahami Korupsi" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie, ed. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009. Hlm 8


Bagaimana Anak Muda Memandang Korupsi ?

Dari hasil wawancara dengan beberapa peserta serta dari hasil pengamatan saya selama acara *roadshow* berlangsung di beberapa kota/kabupaten, sebagian besar pemuda menyadari bahwa korupsi adalah


tindakan hina. Mereka menyadari bahwa korupsi adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi tentu saya tidak bisa menggeneralisir bahwa semua anak disana paham



**MEREKA MENYADARI
BAHWA KORUPSI
ADALAH MENGAMBIL
SESUATU YANG BUKAN
HAKNYA UNTUK
KEPENTINGAN DIRINYA
SENDIRI. TAPI TENTU**



**SAYA TIDAK BISA
MENGGENERALISIR
BAHWA SEMUA ANAK
DISANA PAHAM AKAN
KORUPSI ITU SENDIRI.**



**PERTANYAANNYA
KEMUDIAN, JIKA
MEREKA TAHU KORUPSI
SEPERTI ITU, APAKAH
MEREKA JUGA TAHU
KASUS-KASUS KORUPSI
YANG TERJADI DI
SEKITAR MEREKA?**

akan korupsi itu sendiri.

Pertanyaannya kemudian, jika mereka tahu korupsi seperti itu, apakah mereka juga tahu kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar mereka? Saya tanyakan hal ini kepada peserta di sela-sela berlangsungnya acara *roadshow*. Ternyata diantara mereka juga ada yang mengetahui kasus korupsi di sekitarnya.

Di Makassar misalnya, dalam sesi kelompok seorang siswi SMA (yang saya lupa siapa namanya) mengatakan kepada saya kasus korupsi yang terjadi di sekolahnya terkait dengan seorang oknum⁷ guru. Sengaja saya tidak menampilkan fakta ini dibagian kasus-kasus korupsi, karena saya ingin memperlihatkan bahwa ada *kok* anak muda yang peka dan sadar akan kasus korupsi di sekitarnya pada bagian tulisan ini.

Menurut siswi tersebut, di sekolahnya ada oknum (*again*) guru yang meminta sejumlah uang kepada beberapa siswanya. Siswa yang dimintakan uang adalah siswa yang tidak memperoleh standar nilai yang sudah ditetapkan guru. Beberapa dari teman-teman tentu juga pernah mengalami hal ini ketika masih di bangku sekolah atau bahkan ketika di perguruan tinggi. Ketika nilai teman-teman tidak mencapai standar yang ditetapkan, maka teman-teman biasanya akan mengikuti ujian remedial. *Nah*, disinilah oknum guru yang mengajar di sekolah siswi tersebut memanfatkannya untuk memperoleh sejumlah uang. Dia akan meminta uang kepada siswa yang mengikuti remedial tersebut. Sebagai “imbalannya”, siswa tersebut tidak lagi mengikuti ujian remedial yang sudah ditetapkan oknum guru tersebut.

Secara tidak langsung, anak-anak usia

sekolah tersebut diberikan pengajaran dini untuk “yuk mari kita melakukan korupsi”. Guru mestinya adalah teladan bagi murid-muridnya, dia harus bisa memberikan contoh yang baik untuk kemajuan muridnya. Bukankah ada pepatah yang mengatakan “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Kita tentu tidak mau jika di dalam pikiran anak-anak muda tersebut nantinya tertanam perilaku korup. Maka dari itu, ada baiknya jika masih ada oknum guru yang melakukan tindakan seperti ini atau tindakan-tindakan aneh lainnya untuk segera berhenti.

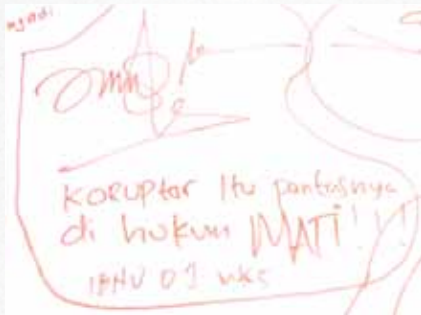
Selama *roadshow* -di dalam acara yang berlangsung- biasanya peserta akan memberikan testimoni di dalam sebuah spanduk besar. Di dalam spanduk tersebutlah mereka akan mencurahkan *uneg-uneg* mereka tentang korupsi.

Beberapa testimoni yang ada pada gambar disamping dan di atas adalah salah satu contoh bentuk ekspresi anak muda terhadap korupsi. Mereka menyadari bahwa korupsi adalah perilaku buruk dan salah satunya sampai pada satu kesadaran bahwa koruptor pantasnya dihukum mati. Berikut adalah beberapa pendapat lainnya mengenai korupsi yang berhasil saya peroleh lewat wawancara. Muhammad Badrul seorang siswa Man 1 Garut yang masih berusia 15 tahun mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil uang milik orang lain yang sebenarnya digunakan untuk rakyat. Serupa dengan Badrul, Afi seorang siswi di Batang dan Agung seorang mahasiswa di Semarang yang hadir dalam acara *roadshow* juga mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya.

⁷ Lagi-lagi saya harus mengeluarkan kata “oknum” ini, jadi teringat Youth Proactive Night, kapan kita bisa mengatakan seseorang oknum dan kapan mengatakannya sebagai anggota (intremezoe aja, gak penting juga haha)

Dua orang lainnya juga mengetahui kasus-kasus korupsi apa saja yang terjadi di wilayahnya, mulai dari kasus korupsi yang menimpa walikota Semarang hingga kasus penggelapan untuk pembangunan jalan di Garut. Ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin memberikan pendidikan tentang korupsi dan menggiat-

kan gerakan anti korupsi. Mungkin setelah mengetahui kasus korupsi tersebut, mereka tidak tahu apa yang akan mereka perbuat kemudian. Peluang inilah yang mestinya digunakan untuk lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang antikorupsi untuk masuk dan meningkatkan peran mereka dalam gerakan anti korupsi.



testimoni peserta di Makassar (atas) dan Garut

Membangkitkan Peran Pemuda dalam Gerakan Anti Korupsi

Sebelum *roadshow* di lima kota berlangsung, pada tanggal 9 Desember 2012 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, TII melangsungkan acara *Youth Proactive Night*. Selain *music performance*, acara tersebut juga diisi dengan *stand up comedy*. Bagi

teman-teman yang hadir dan menjadi bagian dalam acara tersebut (dan kalau masih normal) pasti tertawa tidak henti-hentinya ketika para *comic* melancarkan guyonan mereka tentang banyak hal termasuk tentang korupsi.



Presentasi kreatif gerakan anti korupsi di Makassar dan Garut, Batang, Semarang dan Yogyakarta

Selama ini para pemuda menganggap bahwa diskusi tentang korupsi hanya ada di ruang-ruang-ruang yang eksklusif dan formal. Yang dibayangkan adalah acara yang dilakukan di dalam ruangan dengan 1 hingga 2 orang narasumber, seorang moderator dan sejumlah peserta yang dengan setia mendengarkan. Setelah pemaparan selesai, peserta pulang teratur, mendapatkan buku dan selanjutnya? LUPA. Nah, disinilah sebetulnya diperlukan pendekatan lain untuk mengubah paradigma membosankan yang sudah melekat dalam diri mereka ketika mendiskusikan korupsi dan salah satu caranya adalah lewat TERTAWA.

Mungkin kesannya lewat guyonan-guyonan sepele tentang korupsi, kita meremehkan bahaya korupsi itu sendiri. Tapi justru disinilah poinnya, karena tertawa tidak selamanya lelucon tanpa arti. Lewat guyonan yang mengundang tawa itu peserta akan tahu, oh..ini *toh* korupsi, apa sih yang mereka lakukan? kenapa sih mereka melakukan itu? Apa yang mereka bisa lakukan untuk mencegah korupsi?

Kota/kabupaten yang menjadi tujuan *roadshow* sendiri memiliki pemuda yang kreatif dalam usaha mencegah praktek korupsi. Mereka bisa menceritakan apa sih peran dan kontribusi mereka nantinya

dalam gerakan anti korupsi.

Di Makassar misalnya, seorang siswi mengatakan untuk membuat komunitas kejujuran di lingkungan sekolahnya. Komunitas kejujuran tersebut lah yang nantinya akan memberikan contoh bagi sekitarnya untuk berlaku jujur dalam tiap tindakannya. Di lokasi lainnya seperti Yogyakarta, BEM FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) mereka memiliki tema besar untuk program yang akan mereka jalankan yaitu *fight against poverty*. Di dalam tema besar itu sendiri ada dua program salah satunya adalah Ekonomi Bebas Korupsi (EBK). Program itu sendiri merupakan sebuah kekhawatiran terhadap fenomena yang terjadi saat ini, terutama terhadap penyitaan kekayaan para koruptor.

Selama ini penegak hukum lebih banyak menghukum pelaku korupsi itu dengan hukuman penjara serta menyita harta hasil korupsinya. Tapi, para mahasiswa di UGM ini memiliki pemikiran yang berbeda. Mereka menilai bahwa ada hal lain yang dikorbankan dan mesti diganti oleh para pelaku korupsi. Teman-teman yang sudah belajar ekonomi dasar pasti tahu yang dinamakan *opportunity cost*. Jadi sederhananya, *opportunity cost* atau dalam bahasa indonesianya

itu disebut biaya peluang. Biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan ketika kita memilih alternatif lain dalam sebuah tindakan. Contoh mudahnya, seseorang misalnya punya dua pilihan tindakan terhadap uang yang dimilikinya. Pertama, dengan uangnya individu tersebut dapat membuka usaha restoran atau pilihan kedua dia bisa membelanjakan uangnya untuk membeli mobil. Jika individu tersebut memilih untuk membeli mobil maka tentu dia akan mengorbankan keuntungan dari usaha restoran yang dibukanya. Nah itulah *opportunity cost*.

Menurut Andre (ketua BEM FEB), dengan mengambil contoh korupsi dalam pembangunan jembatan, penegak hukum cenderung hanya menyita harta yang dikorupsi oleh pelaku. Padahal ada biaya lain yang dikorbankan dari korupsi pembangunan jembatan tersebut. Ketika pembangunan jembatan tidak selesai atau terlambat, ada distribusi barang yang terganggu, arus lalu lintas tidak lancar yang tentu ada biaya untuk itu semua. Seharusnya penegak hukum juga mempertimbangkan hal ini dengan kata lain program ini mendukung konsep "pemiskinan koruptor".

Berbeda dengan kota/kabupaten lainnya,



untuk mitra-mitra lokal di daerah Makassar, Garut, Batang dan Semarang tidak memiliki program yang khusus bagi pemuda. Sehingga ide-ide kreatif dari pemuda dalam usaha gerakan anti korupsi tidak bisa diaplikasikan. Meskipun memang tiap mitra lokal punya program dalam pemberdayaan masyarakat, tapi program tersebut tidak secara khusus menyasar kepada pemuda. Di Garut misalnya G2W punya forum warga, Pattiro di Semarang memiliki CC (*Community Center*), LPI di Semarang, Laskar Batang di Batang pasti memiliki program-program untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi mereka tidak punya program khusus untuk pemuda, walaupun di dalam program-program tersebut turut menyertakan pemuda di dalamnya.

Latar belakang itulah yang mendorong TII menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai tujuan *roadshow* pada tanggal 13-19 Desember 2012. Lewat cara-cara menarik dan “ramah” bagi pemuda inilah yang membuat pemuda sadar untuk peduli terhadap permasalahan korupsi dan terlibat dalam gerakan anti korupsi. Harapan lainnya adalah para mitra lokal tersebut bisa meneruskan dan membuat program yang khusus untuk membina pemuda di daerahnya. Seperti

yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pemuda punya ide-ide kreatif dibandingkan dengan generasi-generasi yang sudah “uzur”. Itulah yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam usaha melakukan pendekatan kepada pemuda lainnya agar tidak ikut menjadi bagian dari perilaku korupsi.

Pendekatan yang berusaha dibangun diantaranya dapat membuat jaringan dengan pemuda lainnya agar bergabung dan bisa sama-sama memiliki kesadaran untuk turut serta dalam gerakan anti korupsi. Biasanya kita sendiri tidak sadar bahwa ada teman-teman disekitar kita yang masih nyaman dengan dunia mereka. Sementara kita sendiri sudah *berkoar-koar* untuk melakukan perubahan dalam skala nasional. Maka saya pikir jaringan terdekatlah yang perlu dibangun, utamanya untuk ikut dalam usaha gerakan anti korupsi. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, entah itu dengan tidak berbohong, tidak menitip absen ketika kuliah, ketika makan di kantin harus bayar dan hal-hal kecil lainnya. Bukankah segala sesuatu dimulai dengan hal yang kecil, dan bukankah hal kecil yang masif dilakukan bisa menjadi *trend* bagi pemuda di sekitarnya.

Kesimpulan

Ternyata dari pembahasan di atas, korupsi masih menjadi bagian yang melekat dari daerah-daerah di Indonesia khususnya Makassar, Garut, Batang, Semarang dan Yogyakarta. Di pemerintahan daerah misalnya, masih banyak kepala daerah yang menjadi pelaku dari korupsi itu sendiri. Mereka lupa akan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin yang seharusnya. Sehingga tidak ada rasa malu untuk memanipulasi sejumlah proyek agar uangnya masuk ke kantong

pribadi. Maka tak ayal jika bangunan indah hasil proyek pun tidak lepas dari yang namanya korupsi, bahkan bangunan indah dengan pelayanan yang prima pun tidak lepas dari cacat korupsi.

Tapi tidak semua pemimpin seperti mereka, diantara tumpukan kerikil ternyata masih ada intan yang berkilau. Masih ada pemimpin yang berusaha untuk membersihkan daerahnya dari korupsi dengan melakukan sejumlah perubahan agar daerah

yang dipimpinnya bebas dari korupsi. Tak hanya menyentuh pejabat, ternyata dokter dan guru pun punya peluang untuk itu. Dengan pengetahuan dan informasi yang mereka miliki mereka bisa menyalahgunakannya untuk memperkaya dirinya dengan cara-cara yang mungkin tidak kita pikirkan.

Dari berbagai pendapat, kita bisa mengetahui kenapa *sih* korupsi itu bisa melekat dan tumbuh subur di negara indah ini. Pertama adalah karena individunya dan kedua sistem yang mendukungnya. Tapi menurut saya individu lah yang mengambil porsi yang besar yang menjadi akar tumbuh suburnya perilaku korup. Individu-individu di dalam masyarakat cenderung bersikap cuek terhadap perilaku korup tersebut dan menganggapnya sebagai *way of life*. Apa yang bisa kita lakukan kemudian dari kenyataan tersebut adalah menyelamatkan

mereka dari penyakit tersebut, dan kuncinya ada di dalam diri pemuda. Gerbang menuju kemakmuran bangsa ini hanya dapat dibuka oleh kunci yang dipegang oleh pemuda. Maka tidak boleh tidak, pemuda harus menjadi bagian dari gerakan untuk memberantas korupsi.

Pembangunan kesadaran inilah yang dilakukan TII dalam rangkaian acara Hari Anti Korupsi. Di dalam acara tersebut sebenarnya diperlihatkan bahwa pemuda adalah insan yang kreatif, hanya saja saluran untuk kreativitas tersebut tidak tersedia. Maka inilah yang di dorong oleh TII agar ke depannya pemuda dan organisasi di daerah bisa saling bersinergi dan memulai hal-hal kecil untuk memberantas korupsi. Tak usah jauh berpikir, berlakulah jujur dalam setiap tindakan, bukankah BERANI JUJUR ITU HEBAT?!



Kita dan Masa Depan Indonesia: Menabur Integritas, Menuai Transparansi

Oleh: Steve Harison

Catatan Youth Proactive Roadshow 2012 bersama TI Indonesia

Pendahuluan

“Lawan Korupsi! (*Fight Corruption!*)”, semangat itulah yang seharusnya semakin kita galakkan sekarang ini. Betapa menyedihkannya, saat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di Asia,¹ begitu kontras dengan predikat bahwa Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan *investment grade* yang baik dihadapan para investor bisnis kelas dunia.² Bayangkan saja, Indonesia merupakan pemimpin pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara saat ini dengan kondisi makroekonomi yang dapat dikatakan stabil namun pembangunan ekonominya berjalan secara tidak merata dan adil.³ Bagaimana tidak? Jakarta masih mendominasi perputaran uang dan roda bisnis di negeri yang bentang wilayahnya seluas Inggris Raya di Barat hingga Hungaria di Timur Eropa. Kestabilan makroekonomi yang selama ini dijadikan jargon oleh pemerintahan saat ini dalam menghadapi krisis ekonomi global yang berkepanjangan

ternyata telah memapankan berlangsungnya krisis moral yang tak kunjung sembuh sejak reformasi 1998 dimana para pemegang kekuasaan dan pejabat di negara ini yang begitu tergiur untuk menambah harta kekayaannya secara ilegal dengan melakukan praktik korupsi.

Persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap korupsi dapat dikatakan masih beragam. Ada yang mengatakan bahwa korupsi itu sungguh perbuatan tercela dan merupakan salah satu indikator utama kerusakan moral, namun ada pula yang sekedar mengatakan korupsi sebagai salah satu ‘cara pemerataan ekonomi’ karena pada praktiknya di kalangan masyarakat Indonesia, kekayaan hasil korupsi biasanya dibagi-bagikan kepada kerabat dan keluarga para pelaku korupsi.⁴ Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri,

¹Indonesia mendapat peringkat 118 dari daftar *Corruption Perception Index* (CPI) 2012 yang dikeluarkan oleh Transparency International pada 9 Desember 2012 sebagai Hari Peringatan Anti-Korupsi internasional. CPI Indonesia mendapat nilai 3,0, naik dari tahun 2011 yang bernilai 2,8 namun turun dari peringkat 100 pada 2011 menjadi 118 pada tahun 2012. Lebih lengkap lihat www.antaranews.com/berita/347667/indonesia-rangking-118-negara-bebas-korupsi , diakses pada 22 Januari 2013.

²Lebih Lengkap lihat www.bloomberg.com/news/2012-01-18/indonesia-sovereign-debt-rating-is-raised-to-investment-grade-by-moody-s.html , diakses pada 23 Januari 2013.

³ Lebih jelas lihat www.newyorktimes.com/2012/08/07/business/global/indonesia-surprises-with-surge-in-economy.html , diakses pada 23 Januari 2013

⁴Pernyataan ini dikutip dari wawancara pribadi penulis dengan salahsatu pejabat publik tingkat nasional yang tidak mau disebutkan namanya pada Desember 2012.

KORUPSI ADALAH PERILAKU PEJABAT PUBLIK, BAIK POLITIKUS MAUPUN PEGAWAI NEGERI, YANG SECARA TIDAK WAJAR DAN TIDAK LEGAL MEMPERKAYA DIRI ATAU MEMPERKAYA YANG DEKAT DENGAN DIRINYA, DENGAN CARA MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN PUBLIK YANG DIPERCAYAKAN KEPADA MEREKA.

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵ Karena itulah, dalam tataran universal, korupsi adalah suatu pelanggaran baik secara moral maupun hukum yang mengorbankan dan merugikan kepentingan masyarakat yang bersifat luas dan berjangka panjang demi kepentingan yang bersifat sempit dan berjangka pendek.

Di Indonesia, fenomena korupsi masihlah belum dapat dikatakan sudah menurun karena justru semakin banyak kasus yang diungkap selama periode 2009-2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan serta

mafia anggaran Nazaruddin Syamsudin, Anggota DPR dari Partai Demokrat adalah 2 kasus yang paling menyita perhatian publik karena publik semakin menyadari bahwa ada aktor intelektual yang jauh lebih berpengaruh dalam kasus-kasus korupsi tersebut.⁶ Kedua kasus ini menimbulkan persepsi dan opini kuat di masyarakat bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang banyak secara mudah haruslah berada di dalam atau setidaknya dekat dengan lingkaran birokrasi ataupun kekuasaan publik. Keyakinan yang salah ini harus segera diminimalisasi dan diantisipasi dengan sosialisasi dan kampanye publik mengenai betapa pentingnya menjunjung tinggi integritas dan kejujuran bagi masa depan bangsa dan negeri kepulauan terbesar di dunia ini.



⁵ Dikutip dari www.transparency.org/whatwedo?gclid=CPWCj_PegLUCFQ_hQgod4iAAnw, diakses pada 22 Januari 2013.

⁶ Lebih lengkap lihat www.transparansi.or.id/berita/nazaruddin-jangan-diberi-nafas-harus-dibuat-seperti-gayus/, diakses pada 22 Januari 2013



Kini politik tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam keberlangsungan suatu negara karena dampak globalisasi yang membawa dimensi ekonomi, sosial dan budaya menjadi semakin sejajar dengannya, namun, dalam konteks Indonesia, politik masihlah menjadi primadona yang untuk dibahas, jika bukan diperebutkan oleh para elitis di negeri ini. Secara jujur, politik masihlah membawa dampak yang lebih luas dan signifikan bagi masyarakat Indonesia daripada bidang militer, ekonomi, sosial, ataupun budaya, mengingat negeri ini sedang berada dalam tahap transisi demokrasi. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia kedepannya dapat menjadi salah satu negara yang maju dan terpadang di dunia jika tidak terdapat integritas pada para pemimpin politik, pejabat publiknya, serta seluruh rakyatnya? Mereka yang memiliki integritas lah yang akan menjadi

teladan bagi masyarakat untuk turut serta mengubah paradigma dan perilaku yang berbasis korupsi menjadi yang berorientasi transparansi.

Adalah klise pada saat kita mengatakan bahwa pemuda adalah generasi penerus bangsa dan merekalah yang menentukan masa depan suatu negara, namun ungkapan tersebut seharusnya dikoreksi untuk konteks Indonesia. Pemuda yang berintegritas, berprestasi dan berjiwa patriotik lah yang akan menentukan masa depan Indonesia yang lebih maju dan gemilang, yang akan mampu mensejajarkan nama besar negeri ini dengan negara maju lainnya pada 2030 seperti yang ditargetkan.⁷ Untuk itulah, diperlukan penanaman nilai-nilai universal kepada seluruh pemuda di berbagai lapisan masyarakat seperti demokrasi, anti-korupsi, anti-diskriminasi, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, dan lainnya.

⁷ Merujuk pada pernyataan Wakil Presiden RI, Boediono, lihat www.investor.co.id/home/wapres-generasi-muda-kunci-pembangunan-berkelanjutan/20798 diakses pada 20 Januari 2013.

⁸ Roadshow diawali dengan penyelenggaraan Youth Proactive Night pada 9 Desember di Salihara-Jakarta, lalu 12-13 Desember di Makassar, 16 Desember di Garut, 17 Desember di Batang, 18 Desember di Semarang, dan terakhir pada 19 Desember di Yogyakarta.

“Berani Jujur? Hebat!” Itulah slogan yang diluncurkan pada 9 Desember 2012 untuk memperingati dimulainya peringatan Hari Anti-Korupsi sedunia pada tahun ini di Indonesia. Pada dasarnya jujur adalah salah satu karakter dasar manusia yang baik, namun saat ini, kejujuran justru harus dibentuk mengingat lingkungan sosial saat ini lebih permisif terhadap ketidakjujuran hingga muncul terminologi “*white lie*” yaitu berbohong untuk kebaikan. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi memperkaya diri secara materi a.k.a tindak korupsi, di Indonesia, dikenal peran ‘*whistle blower*’ yaitu saksi ataupun tersangka yang secara berani jujur untuk membeberkan kasus pidana korupsi yang dialaminya kepada publik sehingga muncul keterbukaan informasi dan transparansi yang pada akhirnya akan memberantas tindak korupsi hingga menyeret aktor-aktor utamanya yang selama ini selalu sulit untuk diungkap secara eksplisit.

Sadar atau tidak sadar, pada saat ini menjadi orang baik itu sulit dan keberadaannya pun semakin langka, slogan “Berani Jujur? Hebat!” telah membuktikan bahwa kini kejujuran dianggap merupakan suatu

pencapaian tersendiri yang akan diapresiasi oleh orang lain.

Kalau kamu jujur kamu dipuji hebat, telah terjadi pergeseran makna yang menunjukkan bahwa kini kejujuran bukanlah lagi karakter dasar manusia melainkan suatu pilihan hidup. Kalau kita yang masih muda sudah berani jujur pasti di masa tuanya kita akan hidup tenang karena tidak menanggung beban kebohongan apapun. Serupa dengan tema yang penulis angkat yaitu menabur integritas menuai transparansi, jadi disini arti dari integritas adalah keteguhan untuk mencapai kebenaran, kejujuran adalah salahsatu ciri utamanya sedangkan arti transparansi sendiri ialah keterbukaan yang disertai penuh tanggung jawab. Jika kamu ingin ikut mengendalikan kemudi masa depan bangsa ini, jadilah pemuda yang berintegritas, yang berani jujur sejak usia belia sehingga pada saat nantinya kamu mendapatkan kepercayaan publik untuk memegang wewenang atau jabatan tertentu, kamu tidak akan tergiur untuk merusak kondisi bangsa dan negara dengan tindak pidana korupsi.

Youth Proactive Roadshow “Berani Jujur? Hebat!” yang dilakukan Transparency International Indonesia selama hampir 2 minggu pada bulan Desember 2012 lalu di 6 kota di Indonesia dengan dukungan banyak pihak berupaya untuk menggalakkan kampanye publik mengenai arti penting sebuah kejujuran bagi masa depan pembangunan Indonesia yang bersih dari perilaku korupsi.⁸ Roadshow ini bersifat “dari kaum muda, oleh kaum muda, untuk kaum muda”, sehingga

sepenuhnya berorientasi pada bagaimana caranya memperbaiki kualitas bangsa dan negara ini dengan memberdayakan pemuda-pemudi seperti kita ini untuk bersatu menjadi tidak hanya *agent of change* namun juga *agent of advancement* terutama untuk mengantisipasi krisis moral dan kepercayaan yang sedang terjadi di berbagai penjuru negeri kita tercinta ini. Perjalanan menyampaikan pesan dan amanat “Berani Jujur? Hebat!” menjadi salahsatu tinta emas dalam memberikan pencerahan kepada kalangan muda-mudi di 6 kota tersebut mengenai betapa

pentingnya menghindari perilaku korupsi dan menciptakan transparansi sehingga mereka-mereka yang berpartisipasi didalamnya menjadi sosok yang berintegritas dan membawa manfaat positif bagi lingkungan disekitarnya. Bagaimana dengan kamu ? Siapkah menjadi muda-mudi Indonesia yang berintegritas?

Artikel ini akan menggambarkan tentang dinamika peranan integritas dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat terutama kaum muda dalam menyikapi upaya-upaya pemberantasan korupsi.



Definisi Integritas dan Konstektualitas di Indonesia.

Alkisah, pada zaman kekaisaran kuno China, kelompok Barbar Utara dari Mongolia selalu menyerang China, itulah mengapa dibangun sebuah tembok besar yang begitu panjang dan tinggi agar tidak terjadi perang, sehingga kedamaian yang selama itu didambakan pun tercipta. Pada 100 tahun pertama pembangunan Tembok Besar tersebut, telah terjadi penyerangan sebanyak tiga kali dari musuh namun tidak berhasil, sehingga muncul keyakinan kuat bahwa tidak akan ada yang mampu memanjat, menghancurkan ataupun mendobraknya. Namun pada periode berikutnya penjaga pintu gerbang Tembok Besar itu disuap dan musuh pun berhasil masuk begitu mudahnya untuk melakukan penyerangan. Masyarakat China mungkin memang telah berhasil membangun Tembok Besar yang menjadi bukti keunggulan peradabannya untuk menghalau serangan musuh, namun ternyata gagal membangun integritas sebagai penjaga utama keunggulan peradaban tersebut. Seandainya, penjaga pintu gerbang tersebut memiliki integritas yang tinggi, ia tentu tidak akan menerima suap itu yang tidak hanya menghancurkan diri sendiri namun juga orang lain yang begitu banyak.⁹ Begitu pun saat ini, dimana orang-orang mengorbankan integritasnya

hanya demi mewujudkan ambisinya secara instan, padahal meskipun terdapat pengorbanan dan harga yang harus dibayar jika menjunjung integritas, namun akan lebih banyak risiko dan akibat fatal yang terjadi jika integritas itu dikorbankan. Secara sederhana, kenikmatan sesaat berujung pada penderitaan berkepanjangan. Menurut Samuel, seorang rohaniawan Kristen dan aktivis sosial berbasis di Palangkaraya, ada 6 makna turunan integritas, sebagai berikut:¹⁰

- ✓ Integritas berarti komitmen dan loyalitas: teguh menghadapi setiap tantangan.
- ✓ Integritas berarti tanggung jawab: melakukan kewajiban dengan kemampuan terbaiknya untuk menuju kesuksesan.
- ✓ Integritas berarti dapat dipercaya, jujur, dan setia:
- ✓ Integritas berarti konsisten: berani mengambil keputusan secara tegas dan tepat berdasarkan pertimbangan yang bijak dan fakta yang akurat.
- ✓ Berintegritas berarti mengendalikan dan mendisiplinkan diri: menjalankan sikap hidup yang teratur dan melakukan “yang seharusnya” bukan “yang diinginkan”.
- ✓ Berintegritas berarti berkualitas: merelakan orang lain untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap diri kita.



⁹Disarikan dari “Makna Sebuah Integritas”, Samuel T. Gunawan, <http://artikel.sabda.org/node/1045>, diakses pada 13 Januari 2013.

¹⁰ *Ibid.*



Figur 1. Komponen-komponen Integritas

Definsi lain dari integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan serta kode etik, walaupun dalam keadaan yang sesulit apapun, yang bisa kita sederhanakan menjadi "satu kata satu perbuatan".¹¹ Integritas juga berarti mengkomunikasikan maksud, ide, dan perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung sekalipun dalam negosiasi dengan pihak dan keadaan yang sebenarnya.¹² Indikatornya yaitu memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik (termasuk jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya); melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai (*values*) dan keyakinannya (*believes*) (termasuk berbicara tentang sesuatu yang tidak etis meskipun akan menyakiti orang-orang disekitarnya); bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukannya (termasuk secara

terbuka mengakui kesalahan dan berterus terang walaupun dapat merusak hubungan baik); serta bertindak berdasarkan nilai meskipun risiko atau konsekuensinya besar (termasuk bersedia untuk mundur karena melakukan praktik kotor dan melanggar etika juga menentang orang-orang yang berkuasa demi menegakkan nilai.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Sedangkan arti kata jujur sendiri yakni lurus hati, tidak berbohong, tulus, ikhlas. Kejujuran dan integritas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan, dan saling melengkapi sehingga seseorang yang jujur pasti berintegritas begitu pun sebaliknya. Inilah yang sangat sulit

¹¹ Lihat juga "Aksi Kita: Panduan Melawan Korupsi", hlm. 15, Transparency International Indonesia. Jakarta: Oktober 2012.

¹² Berdasarkan www.indosdm.com/kamus-kompetensi-integritas-integrity, diakses pada 13 Januari 2013.

ditemukan di Indonesia saat ini.

Bahkan Presiden Indonesia kita saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa integritas (*integrity*) adalah salahsatu dari 3 hal utama yang harus dimiliki disamping kapasitas (*capacity*) dan jejak rekam bersih (*clean track records*) yang menjadi kriteria bagi presiden Indonesia selanjutnya.¹³ Namun tantangan ini juga sebenarnya juga dihadapi oleh banyak negara maju dimana kasus korupsi disana lebih bersifat institusional dan terstruktur, tidak hanya sekadar suap atau gratifikasi yang merupakan bentuk umum di Indonesia.¹⁴

Integritas menjadi langka karena banyak pejabat publik di negeri ini justru menjadikan integritas sebagai “komoditas dagang (jual beli)” baik dengan sesama pejabat publik, pelaku ekonomi, hingga dengan masyarakat biasa. C.S. Lewis, seorang filsuf-teologis dari Universitas Cambridge-Ingggris menyatakan bahwa kerusakan moral manusia akan menentukan kredibilitas sebuah institusi politik seperti demokrasi. Pada konteks Indonesia, perpaduan antara penegakan hukum yang relatif lemah dan budaya hedonistik semakin memperparah fenomena menyebarnya perilaku memperkaya diri

sendiri melalui penggelapan dana publik alias korupsi.¹⁵ Selain itu, berdasarkan konsep Jurgen Habermas, seorang sosiologis politik terkenal, maka di Indonesia lebih berlaku *instrumental rationality* yang menjadikan rakyat sebagai objek numerikal untuk peraihan suara hanya pada saat pemilihan umum dibandingkan *communicative rationality* yang menjadikan rakyat sebagai mitra sejajar yang saling bertanggungjawab dalam memapankan sistem politik. Inilah yang melatarbelakangi sistem politik kita sekarang yang miskin akan integritas dan kejujuran, mengingat nilai dan prinsip politik transaksional telah begitu menghegemoni didalamnya.

Meskipun secara keseluruhan, sistem politik di Indonesia dapat dikatakan belum memiliki tingkat integritas yang baik namun secara perlahan tetapi pasti mulai bermunculan *public figures* yang memiliki integritas yang relatif baik di mata masyarakat sehingga pada akhirnya akan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk kembali menemukan integritasnya.

Kondisi politik di Indonesia pasca reformasi 1998 hingga kini dapat dikatakan masihlah belum stabil mengingat tidak adanya *integrated platform* dan *national philosophy* yang direvitalisasi sehingga

¹³ Lebih lengkap lihat “SBY Sets His Criteria for Next President”, Pitan Daslani, The Jakarta Globe, January 4, 2013, www.thejakartaglobe.com/home/sby-sets-his-criteria-for-next-president/564555, diakses pada 13 Januari 2013.

¹⁴ Bahkan Walikota New York, Michael Bloomberg hingga mengadakan konferensi tingkat tinggi khusus pada 6-9 Juni 2012 lalu di New York yang bertemakan “*Public Integrity: Anti-Corruption Strategies, Economic Development, and Good Governance*”. Secara ringkas, para walikota dari berbagai belahan dunia diundang ke New York untuk membagikan *best practices and experiences* mereka dalam memberantas korupsi dan menciptakan *good governance*, transparansi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lihat www.nyc.gov/html/unccp/scp/html/summit/integrity_summit.shtml, diakses pada 27 Januari 2013.

¹⁵ Lebih jelas lihat “Story of Christmas Offers Genuine Example of Servant Leadership for Indonesian Politicians”, Aleksius Jemadu, The Jakarta Globe, December 24, 2012, www.thejakartaglobe.com/columns/story-of-christmas-offers-genuine-example-of-servant-leadership-for-indonesian-politicians/563332#, diakses pada 13 Januari 2013.

integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaaan; kejujuran.

jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tulus, ikhlas.

Kejujuran dan integritas adalah **dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan, dan saling melengkapi** sehingga seseorang yang jujur pasti berintegritas begitu pun sebaliknya.

muncul begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, inilah saatnya generasi muda bergerak untuk memperbaikinya dan menstabilkan kembali sistem politik kita dengan integritas dan

moralitas yang benar. Generasi muda yang dibina dengan baik tentu akan menghasilkan para pemimpin bangsa yang baik pula, jika integritas ditabur pun maka sistem politik pun akan transparan dan akuntabel pula.



Figur 2. Korelasi Politik dan Integritas di Indonesia

Youth Proactive Roadshow: Gambaran Dinamika Integritas Masyarakat Indonesia.

Youth Proactive Roadshow yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia bersama mitra lainnya dapat dikatakan sebagai salahsatu kunci untuk menangkap gambaran mengenai dinamika integritas para pemuda Indonesia yang kami temui di 6 kota tersebut. Selama penyelenggaraan Roadshow, segmen acara yang paling utama adalah Workshop Integritas dimana para peserta akan diberikan informasi dan pengarahan mengenai problematika korupsi dan rancangan solusi berdasarkan ide dan kreativitasnya. Selain itu para peserta juga dibagi kedalam beberapa kelompok agar lebih mudah untuk bersosialisasi dan beraspirasi

serta tertantang untuk berkolaborasi mendapatkan pemahaman terbaik dalam memberantas korupsi.

Pada Youth Proactive Night yang diselenggarakan pada 9 Desember 2012 lalu, saya berkesempatan mewawancarai 2 muda-mudi yang menjadi peserta. Mereka adalah Ekky dan Ochi yang mana keduanya berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung santai selama hampir 17 menit itu, banyak hal yang saya dapati terutama mengenai sudut pandang mereka mengenai korupsi dan problematika yang dihadapi di daerahnya. Mereka mengakui bahwa tingkat partisipasi kalangan pemuda dalam pemberantasan korupsi di salah

satu provinsi paling kaya di Indonesia itu masihlah belum semasif dan seaktif seperti rekan-rekan muda di Pulau Jawa, meskipun begitu tingkat antusiasme terhadap isu pemberantasan korupsi tetap meningkat. Mereka menilai bahwa secara umum tingkat integritas di Kalimantan Timur masihlah rendah dikarenakan masih saratnya praktik korupsi dan minimnya transparansi. Praktik korupsi marak dilakukan antara pihak birokrasi dengan korporasi terutama dalam kasus pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi lahan pertambangan, hal ini diperparah dengan rendahnya transparansi dan keterbukaan informasi publik yang disebabkan oleh media pers lokal yang terlalu didominasi oleh kepentingan bisnis dan belum mencapai 'integritas'nya sebagai penyambung lidah rakyat yang selama ini kita yakini. Menurut Ekky dan Ochi, para pemuda di Kalimantan Timur sebenarnya sangat potensial untuk dilibatkan dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi di daerahnya, hanya saja hambatan utamanya adalah kurangnya akses informasi dan pasifnya lembaga masyarakat sipil disana untuk mengarahkan dan membina kalangan pemuda dalam isu tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat integritas para pemuda di Kalimantan Timur masihlah sangat potensial untuk

dikembangkan dan diberdayakan sehingga akan terjadi perbaikan sosial-politik menuju *clean and good governance* yang tentunya akan membawa pembangunan Kalimantan Timur yang lebih baik dan berkualitas.

Berbeda dengan Youth Proactive Night, maka pada Youth Proactive Roadshow, kami dapat secara langsung meninjau dan membuktikan langsung seberapa jauh integritas para muda-mudi lokal itu dalam melawan fenomena korupsi melalui sesi Integrity Workshop yang menjadi segemen utama kami dalam setiap roadshow. Pada hari pertama roadshow yang diselenggarakan di SMAN 1 Garut pada 16 Desember 2012. Antrian panjang untuk registrasi acara menggambarkan antusiasme para peserta yang hampir seluruhnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Terlihat bahwa kaum muda Garut menginginkan suatu semangat perubahan yaitu semangat menjunjung kejujuran sebagai langkah awal pemberantasan korupsi. Berdasarkan pengamatan langsung, semangat menjunjung tinggi integritas kaum muda Garut dapat dikatakan baik mengingat semua kelompok peserta dalam sesi Integrity Workshop menunjukkan performa yang memuaskan baik secara pemahaman maupun kreativitas. Para peserta berusaha

menghayati dengan seksama nilai kejujuran sebagai langkah awal pemberantasan korupsi. Begitu pula sewaktu roadshow kami diselenggarakan di Batang, kreativitas para peserta dalam menjunjung nilai-nilai anti-korupsi terbukti baik, hanya saja tingkat partisipasinya kurang semeriah di Garut. Berbeda dengan Garut dan Batang, para peserta di Semarang

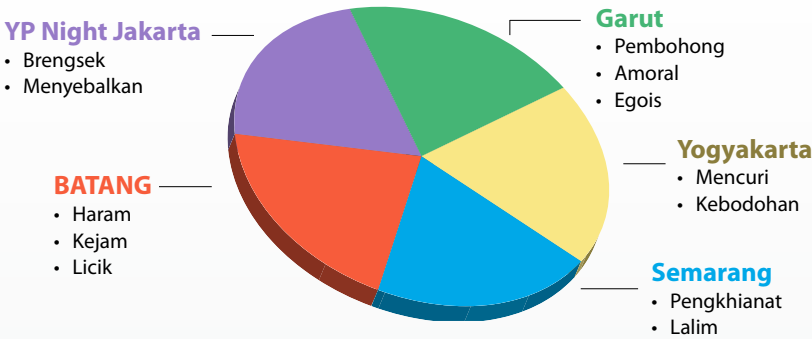


dan Yogyakarta lebih bersikap serius dalam mengikuti sesi Integrity Workshop, namun tetap kritis dalam mengungkapkan beragam ide dan kreativitasnya.

Secara detail, pertama saya ingin

menyoroti mengenai persepsi mengenai korupsi dari beberapa peserta di setiap kota.¹⁶

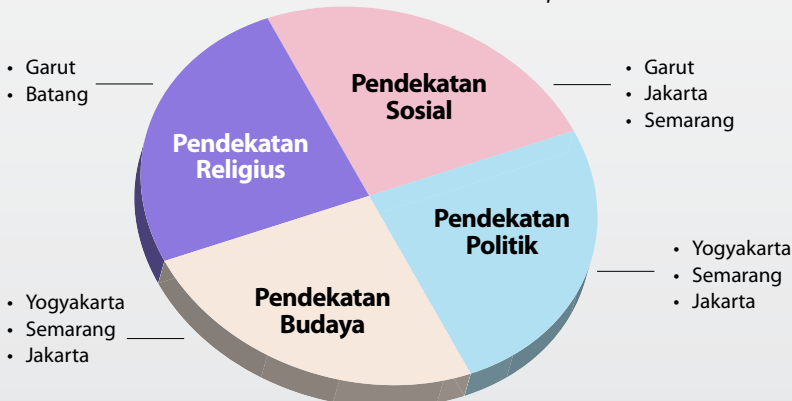
** Menurut kalian, satu kata yang mewakili perilaku korupsi?*



Dari beragam pandangan mereka tentang korupsi, para peserta telah mengerti bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela serta mencerminkan kemunduran moralitas dan akhlak bagi suatu negara bangsa karena yang melakukannya adalah yang memiliki kekuasaan terhadap publik. Bahkan beberapa dari mereka secara tegas mengatakan bahwa perilaku korupsi merefleksikan suatu kesombongan karena mengabaikan keberadaan Tuhan Yang Maha Hadir.

Kedua, saya juga menggali paradigma para peserta mengenai bagaimana solusi yang mereka usulkan agar tingkat korupsi itu dapat diminimalisasi terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Maksudnya adalah untuk mengetahui sejauh mana mereka mau dan mampu menciptakan integritas berdasarkan konteks lingkungan disekitarnya.

** Menurut kalian, pendekatan apakah yang cocok agar integritas masyarakat terbangun dengan baik dalam memberantas fenomena korupsi?*



¹⁶ Hasil ini diolah dari hasil wawancara khusus yang direkam antara penulis dengan para partisipan dan narasumber terpilih di setiap kota terselenggaranya Youth Proactive Roadshow.

Dari diagram tersebut terlihat bahwa di masing-masing kota karena memiliki karakternya masing-masing, maka diperlukan pendekatan yang berbeda-beda pula dalam membangun integritas masyarakatnya. Di Garut, misalnya, kaum muda disana masih lebih terfokus pada pendekatan religius dan sosial, mengingat karakter daerahnya yang masih transisional antara kota dan pedesaan, sedangkan di Batang pendekatan religius masih jauh lebih berpengaruh karena masyarakatnya masih berkeyakinan kuat bahwa secara dominan korupsi terjadi karena rendahnya akhlak dan keimanan pelakunya meskipun begitu pendekatan pendidikan merupakan potensi yang relatif baik disana.¹⁷

Berbeda dengan Garut dan Batang yang belum berkembang sebagai kota metropolitan, maka pendekatan religius tidaklah terlalu populer dalam membangun integritas masyarakat Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang dalam pemberantasan korupsi. Masyarakatnya yang heterogen serta kaum mudanya yang dinamis dan berpikiran kritis mendorong pendekatan sosial, politik, dan budaya lah yang menentukan bagaimana integritas dapat diciptakan di lingkungan masyarakat Jakarta, Yogyakarta dan Semarang. Hanya saja, khusus untuk Yogyakarta, pendekatan sosial tidak terlalu signifikan lagi dibutuhkan karena nilai dan norma sosial yang ada di masyarakatnya, terutama kejujuran, relatif telah mapan dibandingkan kondisi di Semarang dan

Jakarta. Sementara itu, pendekatan budaya mutlak diperlukan bagi kota besar di 3 kota metropolitan tersebut karena nilai-nilai modern dan globalisasi yang ada disana telah membuat nilai-nilai anti-korupsi dapat diinformasikan melalui fasilitas modern seperti internet dan telekomunikasi serta disosialisasikan melalui acara kreatif dan menggunakan aksi budaya populer. Terakhir, pendekatan politik yang memang lebih kompleks dan melibatkan aktor-aktor dari institusi dibandingkan individual sangatlah dominan terjadi di kota metropolitan seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang dimana kelompok kepentingan yang mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk kemudian mengkoordinasikan dengan pihak pemerintah dan birokrasi berwenang. Sejauh ini, untuk konteks Indonesia, pendekatan politik masihlah jauh signifikan pengaruhnya dibandingkan pendekatan lainnya, terlihat dari para peserta Integrity Workshop di setiap kota yang tidak hentinya mengkritisi tingkah laku pejabat-pejabat yang korup. Bahkan di Semarang, penulis sempat mewawancarai salahsatu pejabat pegawai negeri sipil pemerintah kota Semarang, Bapak Sapto yang menegaskan bahwa di lingkungan pegawai negeri sipil pun terdapat Pakta Integritas, dimana pihak pemkot Semarang telah bekerjasama dengan KPK, BPK, Kejaksaan Negeri dan secara internal untuk penegakan hukum bagi seluruh pegawai mulai dari jabatan tinggi hingga rendah

¹⁷ Pendekatan religius memanglah dasar bagi semua orang untuk kembali kepada amanah bahwa korupsi adalah perilaku tidak jujur dan menciderai prinsip agama terutama di Indonesia yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia dan mengakui eksistensi Tuhan. Banyak negara Muslim justru semakin terancam dengan fenomena korupsi yang masif dan semakin menganggap bahwa korupsi itu dosa biasa dengan alasan karena Tuhan itu Maha Pemaaf. Meskipun begitu seharusnya integritas itu menjadi suatu budaya dalam masyarakat karena jika seseorang tidak memiliki integritas maka dia tidak memiliki harga diri dan hanya memiliki status sosial yang rendah. Disarikan dari <http://thestar.com.my/columnists/story.asp?file=/2010/1/27/columnists/ikimviews/554486> , diakses pada 27 Januari 2013.

**BUDAYA TAAT HUKUM
DAN MENJUNJUNG ETIKA
HARUS DITEGAKKAN
PADA GENERASI MUDA
KITA NAMUN INI HARUS
DICONTOHKAN TERLEBIH
DAHULU OLEH GENERASI
YANG LEBIH TUA, KARENA
INTINYA APALAH MAKNA
SEBUAH PERUBAHAN
JIKA TIDAK ADA FIGUR
TELADAN DIDALAMNYA.**



agar mematuhi peraturannya termasuk tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun yang tergolong praktik korupsi.¹⁸ Selain itu, sedang dibangun tradisi inspeksi terhadap institusi-institusi yang rawan akan manipulasi pelayanan terhadap masyarakat seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan lainnya agar masyarakat dapat merasakan transparansi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah kotanya. Contoh tersebut tentu menjadi bukti bagi publik untuk bersama-sama membangun integritas secara sinergis antara masyarakat sebagai pemberi amanah dan pegawai negeri sebagai pemegang amanah.

Gambaran besar yang penulis dapatkan mengenai dinamika integritas di 5 kota tersebut adalah pembangunan moralitas dan integritas haruslah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah menyerap dan mempraktikkan nilai-nilai anti-korupsi pada kehidupan sehari-harinya. Pemuda di Garut dan Batang lebih memprioritaskan bagaimana mereka meningkatkan keimanan dan akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai penangkis utama berlaku korupsi, namun kaum muda di Jakarta dan Yogyakarta misalnya memilih untuk lebih aktif dalam bergabung dengan organisasi non-pemerintah untuk menyampaikan aspirasi mereka dan bergabung dalam pergerakan publik yang diusungnya. Menurut penulis sendiri, kondisi integritas para muda-mudi di 5 kota

tersebut memanglah bervariasi, namun terdapat satu kekhawatiran yang muncul karena masih ada saja sikap permisif dan cara pandang yang agak 'toleran' dengan perilaku korupsi misalnya dalam pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah yang tidak transparan pelaporannya, beberapa siswa masih mengatakan bahwa hal tersebut 'masih wajar' jika kita mengingat biaya transportasi, uang makan, uang lelah, dan lain-lain. Fenomena '*logical tolerance to corrupt*' inilah yang menurut penulis harus kita antisipasi karena dari hal semacam inilah bibit tindakan korupsi muncul dan tumbuh. Anak muda haruslah memiliki integritas yang menganggap bahwa jika ada hal seharusnya bersifat transparan namun pada kenyataannya tidak transparan maka itulah yang disebut korupsi, integritas dimana jerih payah yang sesuai prosedur adalah kunci keberhasilan akan kesuksesan yang sebenarnya pada setiap hal. Budaya taat hukum dan menjunjung etika harus ditegakkan pada generasi muda kita namun ini harus dicontohkan terlebih dahulu oleh generasi yang lebih tua, karena intinya apalah makna sebuah perubahan jika tidak ada figur teladan didalamnya. Secara umum, integritas akan tercipta saat masyarakat terutama kaum muda menyadari permasalahan yang terjadi disekitarnya, mengidentifikasi langkah-langkah menuju solusinya, dan berkomitmen untuk beraksi optimal memecahkan problematika tersebut.

¹⁸ Penulis melakukan percakapan khusus dengan Bapak Sapto yang bertugas dalam Satuan Pengendalian Internal (SPI) Pemerintah Kota Semarang pada 18 Desember 2012 di Aula utama Balai Kota Pemerintah Kota Semarang. Beliau menunjukkan Peraturan Inspektur Kota Semarang Nomor 700/378/2011 yang terpasang di kantor beliau di lantai 8 gedung Balai Kota dan juga papan slogan anti-korupsi di setiap dinding lantai gedung tersebut.



TRANSPARENCY INTERNATIONAL



Indonesia

the global coalition against corruption

Peran TI Indonesia dan Mitra Lokal: Sang Penabur Integritas.

Dalam demokrasi, peran masyarakat sipil sangatlah vital dalam menentukan seberapa sehat kualitas sistem politik (demokrasi) tersebut berimplikasi positif terhadap masyarakat. Lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anti-korupsi kini semakin menjadi populer dimata masyarakat setelah selama 2 tahun belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami jatuh bangun akibat perlawanan kuat dari institusi politik lainnya yang dicurigai penuh dengan praktik korupsi seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa Kementerian Negara. LSM anti-korupsi yang berbasis di Jakarta seperti Transparency International (TI) Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Gerakan Indonesia Bersih, dan lainnya memiliki banyak fungsi terkait dengan implementasi pendekatan-pendekatan terutama pendekatan politik untuk membangun integritas dalam isu pemberantasan korupsi seperti telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan pada satu tahun lalu, Presiden SBY mengadakan dialog langsung dengan para perwakilan dari puluhan mitra LSM anti-korupsi di Istana Negara untuk

membicarakan dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dan penanganan kasus-kasus hukum tindak pidana korupsi di berbagai penjuru Indonesia.¹⁹ Ini menunjukkan betapa pentingnya peran LSM anti-korupsi yang berfungsi ganda yaitu memberikan output kepada masyarakat sekaligus memberikan input kepada pemangku kebijakan. Namun, urgensi yang patut dipikirkan solusinya saat ini adalah bagaimana caranya mencegah generasi muda dan generasi masa depan Indonesia agar tidak kembali berkubang di dalam praktik korupsi, ini tentu menjadi tugas yang harus turut diemban oleh mitra LSM ini.

LSM nasional maupun LSM lokal yang bergerak dalam isu pemberantasan korupsi haruslah bersinergi dan berkolaborasi untuk menjadi *key player* bagi terciptanya integritas di hadapan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan dan kepemimpinan. Dalam hal ini, dukungan masyarakat sangatlah penting mengingat respon yang diberikan masyarakat terhadap prakarsa dan gagasan para mitra LSM lah yang akan membantu kelancaran terbangunnya integritas tersebut.

¹⁹ Lebih lengkap lihat <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/26/01520818/LSM.Antikorupsi.Tagih.Janji.Presiden>, diakses pada 27 Januari 2013.

Transparency International (TI) Indonesia sendiri telah berkiprah sangat aktif dalam menabur integritas seperti mendirikan CLUB SPEAK (Suara Pemuda Anti Korupsi) sejak 2010, kemudian menerbitkan buku “Aksi Kita: Panduan Kita Melawan Korupsi”, menyelenggarakan banyak acara dan diskusi seputar langkah pemberantasan korupsi dan sosialisasi nilai-nilai anti-korupsi kepada anak muda dan masyarakat, hingga terjun langsung ke berbagai kota di Indonesia untuk menjalin kerjasama baik dengan mitra LSM lokal maupun birokrasi pemerintah lokal dalam meningkatkan *capacity-building* di bidang pemberantasan korupsi.

Sebagai LSM yang berbasis di Jakarta, TI Indonesia lebih banyak memiliki kemudahan di berbagai akses seperti pendanaan, kualitas sumber daya manusia, serta jejaring dengan berbagai institusi tentu menjadi magnet bagi para mitra lokal untuk bekerjasama dalam program sosialisasi nilai-nilai anti-korupsi dan pembangunan integritas bagi masyarakat di daerahnya.

Peran mitra lokal sendiri sebenarnya cukuplah sentral dalam mengawal dinamika integritas masyarakatnya hanya saja terkadang kepercayaan diri untuk menggalang dukungan publik masihlah belum semapan LSM-LSM yang berbasis di Jakarta. Selain itu, masih terdapat perbedaan pula dalam hal memprioritaskan pendekatan manakah yang paling cocok untuk diterapkan di masyarakatnya. Misalnya, jika memang di Garut telah terjadi kasus korupsi APBD yang sebesar puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah di masa kepemimpinan Bupati Aceng Fikri,

mengapa pemuda Garut tidak melakukan pergerakan melawannya? Mengapa mitra lokal seperti Garut Governance Watch (G2W) tidak memprakarsai sebuah mobilisasi massa untuk menyampaikan aspirasi mengenai keadilan dan kesejahteraan masyarakat? Mereka tentu tidak diam dalam memberantas korupsi hanya saja pendekatan yang diprioritaskan masihlah berfokus pada pendekatan sosial yang lebih memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui insiatif Forum Desa yang berbasisan kekeluargaan dan bukanlah pendekatan politik seperti yang biasa diorganisasikan secara profesional oleh para LSM berbasis di Jakarta. Contoh lain, seperti PATTIRO yang merupakan mitra lokal kami di Semarang, justru lebih memilih untuk menerapkan pendekatan politik yakni dengan mendesak pihak pemerintah kota dan dinas pendidikan kota Semarang untuk segera meluncurkan Rencana Anggaran Pemasukan dan Belanja Sekolah (RAPBS) online untuk menciptakan transparansi dalam pelaporan anggaran sekolah negeri, terutama untuk para murid dan orangtua yang kerap kali mempertanyakan pungutan-pungutan di sekolah. Prakarsa RAPBS online ini adalah yang pertama di Indonesia dan merupakan bagian dari Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi (RAPPK) Pemerintah Kota Semarang yang diluncurkan pada 26 Desember lalu dimana telah meliputi 346 SD, 41 SMP, 16 SMA dan 11 SMK.²⁰ Pendekatan politik ini dilakukan karena PATTIRO Semarang mengetahui urgensi transparansi anggaran pendidikan yang kini semakin rawan dimanipulasi oleh oknum sekolah ataupun dinas pendidikan sehingga gagasan ini direalisasikan

²⁰ Lebih lengkap lihat www.antarajateng.com/detail/index.php?id=72130, diakses pada 27 Januari 2013.

demikian pemberantasan korupsi dalam hal pengelolaan biaya pendidikan yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Bahkan PATTIRO Semarang melengkapi pendekatan politik ini dengan pendekatan sosial yaitu bekerjasama dengan jejaring OSIS dan Komite Sekolah untuk membantu memantau implementasi RAPBS online tersebut.

Secara garis besar, untuk membangun integritas di masyarakat diperlukan suatu figur teladan yang mampu memberikan inspirasi bagi warganya entah dari pihak pemerintah ataupun pihak lembaga masyarakat sipil. Kesuksesan membangun integritas akan sangat tergantung pada

bagaimana ‘Sang Penabur Integritas’ yakni dalam hal ini TI Indonesia dan para mitra lokal memainkan perannya secara fleksibel, sinergis, dan optimal baik dengan masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan nilai-nilai anti-korupsi dan integritas yang mencakup kejujuran. Meskipun sebenarnya, pemerintahlah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang seharusnya mengambil inisiatif dan tanggung jawab dominan untuk melaksanakan sekaligus mengawasi pelaksanaan pendidikan anti-korupsi di negeri ini.²¹ Pemerintah harus proaktif di dalam mendorong generasi muda untuk menghindari korupsi dan membangun integritas.



²¹ Perlu dicatat bahwa pendidikan anti-korupsi telah secara formal ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk masuk kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sejak 22 Februari 2012 silam. Lihat www.edukasi.kompas.com/read/2012/02/22/08211880/Pendidikan.Antikorupsi.Masuk.Kurikulum, diakses pada 1 Februari 2013.

Kesimpulan

Indonesia bukanlah negara miskin, negeri ini kaya akan sumber daya alam dan mineral, kaya akan tanah subur dan iklim yang baik, kaya akan sumber daya manusia dan kreativitas, kaya akan nilai sejarah dan peradaban yang luhur, maka dari itu, masa depan Indonesia seharusnya sangatlah cerah. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang sangat merugikan negara-bangsa dan memiskinkan masa depan negeri yang sesungguhnya kaya ini. Kemiskinan adalah akar dari berbagai kejahatan dan jika kemiskinan itu 'dikipasi' oleh kasus korupsi para pejabat yang menggelapkan anggaran publik, maka tak urung fenomena 'terorisme sosial dan budaya' akan menyeruak sehingga akan muncul kebencian rakyat terhadap pemerintahnya sendiri. Jika saja, fenomena korupsi dapat diminimalisasi hingga ke tingkat nadir maka tentu hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, serta penghidupan yang layak niscaya akan mudah diakses oleh seluruh masyarakat negeri ini terutama lebih dari 100 juta warga yang masih tergolong kelas sosial-ekonomi bawah. Untuk mencegah negeri tercinta ini jatuh kedalam lubang penuh kesuraman dan ketidakpastian, maka sudah waktunya bagi generasi muda Indonesia untuk mengawali perubahan dengan memacu

semangat dan membulatkan tekad untuk membangun integritas yang murni baik secara individual dan sosial demi pembangunan tanah air yang bebas dari korupsi dan penuh transparansi.

Generasi muda Indonesia memang tersebar di ribuan pulau yang tersebar di Indonesia, terdiri dari berbagai etnik, suku, budaya, dan bahasa, namun masing-masing dari kita seperti pelita yang sedang berusaha menerangi bahtera yang hampir kehabisan energi cahaya di tengah lautan yang penuh ombak dan angin. Semangat perjuangan, menjunjung kejujuran, dan kemampuan memecahkan permasalahan adalah inti integritas, integritas inilah yang akan membawa perbaikan negara bangsa ini mencapai targetnya sebagai negeri yang adil, makmur, aman, dan sentosa. Integritas akan tercapai jika sistem pendidikan kita diubah dan diperbaiki total sehingga menghasilkan generasi muda yang menghargai prosedur dan jerih payah bukan budaya instan dan jalan pintas. Kitalah yang menentukan masa depan negeri kita sendiri, oleh sebab itu mari menjadi orang yang memiliki integritas dan berkontribusilah kepada negeri ini dengan penuh harga diri yang tinggi dengan semangat rela berkorban demi kepentingan orang banyak dan bukan demi kepentingan pribadi.

Jujurism(e): Antikorupsi dalam Otak

Oleh: Usep Hasan Sadikin

"Korupsi adalah kebohongan relasi tanpa keterbukaan yang menguntungkan satu pihak seiring mengorbankan pihak lain dengan menyelewengkan kepercayaan bersama."

Jujurisme, ideologi antikorupsi

Pertama kali dengar kata "korupsi", saat aku sekolah dasar kelas empat. "Korupsi itu mencuri uang banyak.

Mengeruk. Mengkorup," kata guruku. Berdasar pemahamanku sekarang, tak tahu kenapa tak ada penekanan "dana publik" atau "uang negara" dalam pengertian korupsi dari guruku. Mungkin agar otak anak SD bisa mengerti. Tapi, mengingat ia salah satu guru yang suka tilap uang kaos olahraga dan kelas renang, pasti ada yang tak beres di otaknya. Saat korupsi hanya dimaknai jumlah yang besar, apa lagi tak menyertai penekanan "milik orang banyak".

Negeri kaya ini dibanjiri keringat rakyat seiring berita koruptor yang tak dijerat ke pengadilan. Kasus Eddy Tansil (Rp 1,5 triliun, kurs prakrisis '98) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Rp 138 triliun). Tokoh masyarakat Banten, Tryana Sjam'un bilang, jika semua uang itu dibelikan kerupuk, maka akan menutupi nusantara. Uang negara, yang banyak katanya, beserta mereka, yang mengambilnya, tak

pernah bisa ada. Lalu, reformasi pecah! Sebabnya, karena repot nasi. Kenapa? Tokoh reformasi, Amien Rais berorasi menjawab: korupsi kolusi dan nepotisme. "Berantas KKN," teriaknya yang hanya mengantarkan ke kursi MPR.

Dari KKN muncul KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Produk dari pemerintahan reformasi yang gagal mengadakan suplai legislatif rezim korup sebelumnya, Golkar. KPK lahir beralasan, segala lembaga penegak hukum tak bisa berantas korupsi. Ya, bukan rahasia umum, KUHP, kasih uang habis perkara. UUD, ujung-ujungnya duit. Pun banyak dari kita tahu saat aparat keadilan merupakan istilah lain dari pagar makan tanaman. Jika semua tahu, aku bingung kenapa



Korupsi itu
mencuri uang
banyak. Mengeruk,
Mengkorup...
kata guruku.

KPK tak mulai dengan berantas korupsi dari penegak hukumnya? Yang aku tahu muncul “Antasari Azhar”, “Nasruddin” lalu “Rani”. *Infotainment* mengaburkan masalah dengan “cinta segitiga”.

Korupsi terasa jauh dimengerti. Yang pasti, masih ada hari-hari di isi dengan proses penerimaan pegawai negeri sipil

menyertai uang pelicin. Akreditasi lembaga pendidikan menggunakan pengadaan fiktif dan sogok. Guru-guru mendukung jual-beli soal dan jawaban ujian nasional. Kasus Eddy Tansil dan BLBI, belum (atau mungkin tak akan) diadili. Kini bertambah, skandal Bank Century (Rp 6,7 triliun).

Kulturalisasi antikorupsi

Jauhnya pemahaman pada korupsi pun dialami masyarakat. Korupsi dianggap sebagai permasalahan pejabat elite yang ditindak melalui hukum dan lembaga formal. Masyarakat luas tak bisa mengakses pemahaman korupsi dan merasa jauh dari keterlibatan pemberantasannya. Gerakan antikorupsi coba membumikan bahasa(n) korupsi melalui pendekatan populer.

Bentuknya dengan budaya pop sebagai penyampai hingga aksi antikorupsi keseharian.

Dari kulturalisasi itu aku jadi tahu gerakan antikorupsi. Sebagai penyuka band Efek Rumah Kaca, aku datang di suatu konser anak muda 11 Desember 2010. “Eh, elo suka ERK kan, Sep. Dateng yuk ke Bulungan!” ajak Afra, teman saat aku fokus sebagai aktivis feminisme di Jurnal Perempuan. Tak tahu apa-apa aku kalau itu konser antikorupsi. Yang aku tahu (katanya) ada pelantun “Mosi Tidak Percaya” manggung, bukan di layar kaca.

Yup! Ada Cholil cs di konser itu. Speak Fest, Suara Pemuda Antikorupsi Festival. “Oh ada toh wadah anak muda untuk melawan korupsi” komentarku. Tentu saja tak lebih antusias dibandingkan ikuti ERK lalala “Balerna”. Aku pun baru tahu ada band Superman is Dead, yang fans-nya, The Out-SID-er, mengisi ¾ ranah pijak GOR Bulungan. “Koruptor Anjing!” Mereka teriak, merasa dirugikan

koruptor. Kesadaran solidaritas yang tak cukup kuat karena di sekolah praktek nyontek, sogok dan menjadi “anak baik-baik” menjadi karakter rata-rata pemuda. Tak beda jauh dengan ego oligopoli melawan monopoli. Jangan-jangan ini soal seberapa besar anda untung atau dirugikan? Yang pasti tak ada tindak lanjut dari Speakfest. Antikorupsi, malam itu juga menguap “Di Udara”.

2011, Speakfest diadakan lagi. Kali ini yang mengajak Lia Toriana dari Transparency International Indonesia. Di H+1 “Hari Antikorupsi Sedunia (9/12)”, 10 Desember. Lebih gegap gempita pengumuman dan kemasannya. Tapi tanpa SID. Sepi, tak ada The Out-SID-er. Speakfest ditutup ERK, antikorupsi kembali menguap “Di Udara”. Akumulasinya menjenuhkan langit dengan awan, turunkan “Hujan di Bulan Desember”.



Ilusi gerakan antikorupsi

Dari situ aku menilai, kulturalisasi antikorupsi lebih banyak yang merupakan ilusi.

“Antikorupsi” di ruang publik menjadi “politiker” di dalam “masyarakat encer”— meminjam istilah Robertus Robert, Manusia Politik (2010). Ramai gegap gempita, habiskan banyak dana tapi sepi isi dan taji menggerakkan. Aksi antikorupsi dilakukan sebatas meringankan bahasa(n) korupsi di tengah masyarakat yang apolitis. Wacana antikorupsi yang bersetubuh budaya pop malah menjadi hasutan halus kepada masyarakat. Korupsi katanya salah. Koruptor katanya jahat. Kita harus jujur. Lalu?

Ini yang dinamakan Richard Brodie sebagai “meme”. Perluasan antikorupsi menjadi virus akal budi yang menghasut halus. Slogan “Berani Jujur Hebat” diterima tapi minim proses berpikir reflektif dan filosofis. Kulturalisasi melalui transformasi pembahasa(a)n permasalahan korupsi yang elitis kepada masyarakat alit tak menyertai kulturalisasi makna “korupsi” secara radikal. Dampaknya, sosialisasi yang populer tak seiring dengan kesadaran menggerak baik diri dan kolektif.

Meme (anti)korupsi disebabkan ilusi kedua gerakan antikorupsi yaitu formalisme makna korupsi. Makna korupsi sebatas persoalan penyalahgunaan jabatan formal negara beserta kewenangan terkait uang negara. Bila kaitannya dengan keuangan di

keluarga atau masyarakat, itu bukan korupsi.

Ketentuan Pasal 3 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Konvensi PBB tentang Perlawanan Korupsi pun mengartikan korupsi cenderung formal. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tak wajar dan tak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam kamus, makna korupsi pun formalistik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi adalah

Hingga kini
"antikorupsi" tak
bisa utuh dipakai
pada ranah kultural.
Padahal masyarakat
merupakan poros
suplai orang-
orang di struktur
lembaga. Dampaknya
ada jarak berarti
antara substansi dan
teknis. Hadirnya sela
antara keidealan
prinsip dan realitas.
Putusnya kasus per
kasus untuk bisa
tuntas dikaitkan
dengan satu
perspektif.

penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. *Black Law Dictionary* mengartikan korupsi, suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

Pembatasan “korupsi” melalui pengertian formalistik itu hanya bisa diterapkan di struktur formal lembaga. Antikorupsi coba memperluas makna korupsi penyelewengan wewenang yang merugikan orang banyak. Kulturalisasi antikorupsi coba mengaitkan kesadaran di elite kepada alit dengan menyatakan “jujur adalah langkah awal berantas korupsi”. Pengaitan ini tak cukup. Pemaknaan “antikorupsi” menyertai konsepnya belum disesuaikan secara kultural.

Hingga kini “antikorupsi” tak bisa utuh dipakai pada ranah kultural. Padahal masyarakat merupakan poros suplai orang-orang di struktur lembaga. Dampaknya ada jarak berarti antara substansi dan teknis. Hadirnya sela antara keidealan prinsip dan realitas. Putusnya kasus per kasus untuk bisa tuntas dikaitkan dengan satu perspektif. Apa iya, tukang nyontek bila menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga tak tipu tilap dana wisma atlet? Apa iya, orang yang menerobos lampu merah bila menjadi presiden akan sama dengan Haji Muhammad Soeharto, presiden terkorup sedunia? Apa iya substansinya berbeda, antara penyelewengan dana sosial dengan perselingkuhan relasi personal?

Ilusi ketiga, korupsi dianggap sebagai permasalahan utama di Indonesia. Masyarakat terbawa pemahaman, pemerintahan yang bersih menjadi

kebutuhan mendesak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya permasalahan menyertai konsep ide perlawanan yang lain, dikesampingkan. Sebut saja, kejahatan hak asasi manusia pada tragedi 1965 dan 1998 di mana gerakan HAM membutuhkan dukungan banyak pihak. Atau permasalahan lingkungan beserta pengrusakan alam oleh perusahaan tambang dan perkebunan yang berdampak hilangnya hak rakyat terhadap tanah. Juga kekerasan seksual yang disebabkan budaya dan pikiran patriarki di mana feminisme seperti kehabisan kata untuk bertutur.

Maka muncullah nama-nama kaliber nasional yang dianggap sebagai pejuang dan atau bersih dari korupsi. Melalui polling sejumlah akademisi dan masyarakat, mereka dianggap mampu menjadi presiden yang baik, salah satunya dianggap bisa berantas korupsi. Ada nama Yusuf Kalla, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan Dahlan Iskan.

Semua nama itu merupakan pengusaha yang bermasalah bagi ide keadilan masyarakat dan negara. JK, Prabowo, Bakrie merupakan pengusaha tambang yang merombak tata guna lahan yang mengesampingkan hak hidup rakyat. Ketiganya pun merupakan bagian dari Golkar masa lalu yang menyuplai legislatif pemerintahan korup dan otoriter Orde Baru dengan dosa kemanusiaan. Agak beda dengan tiga lainnya, Dahlan sang pengusaha media ini merupakan pelaku poligami. Superiornya wacana antikorupsi di publik beserta slogan “Berani Jujur Hebat” seakan tak acuh pada keadilan korban di permasalahan lain.

Ilusi keempat dari gerakan antikorupsi adalah, transparansi sebagai bagian



penting dari variabel antikorupsi ternyata didasari konsep yang bertujuan pada efisiensi pemerintahan dan perusahaan (pengusaha). Terutama ini terjadi di negara-negara ekskolonialisasi yang kini menjadi bagian dari “dunia ketiga”.

Pada zaman penjajahan, praktek korupsi diciptakan penjajah secara sistemik dalam bentuk birokrasi. Ini berlangsung selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik penjajah, untuk menjalankan daerah administratif

tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya. Tujuannya mengambil sumber daya alam nusantara secara efisien. Harga untuk mengambil keuntungan menjadi rendah. Tak perlu perang serta bisa menjaga dan mengawasi teritorial.

Birokrasi merupakan sistem layanan publik yang menyertakan variabel monopoli dan diskresi dalam kerjanya. Karena itu, kerja layak birokrasi dituntut publik dengan variabel transparansi dan akuntabilitas. Jika variabel tuntutan publiknya minim cenderung korup. Ini oleh Kilgert dirumuskan [$C = D + M - A - T$]. Tapi kolonialisasi ekonomi menutup akses akuntabilitas dan transparansi. Tujuannya, agar relasi birokrat lebih intim menguntungkan kepada pengusaha, bukan pada rakyat.

Bisa diketahui dari sejarah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang dalam bahasa Indonesia adalah Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC atau pemerintahan kolonial sebagai lembaga telah membentuk tradisi korupsi. Ini terjadi sebelum Indonesia mengenal sistem pemerintahan modern. Ketika itu VOC dengan kolonial mengganti penggajian tradisional dengan sistem pajak atas tanah dan hasilnya.

Kolonialisasi beserta motif ekonomi berganti menjadi globalisasi menyertai gerak perusahaan multinasional. Keadaannya, birokrat yang diciptakan kolonial tumbuh ratusan tahun berkarakter korup. Jelas ini hambatan bagi pengusaha multinasional juga nasional. Pejabat pemerintah yang tak acuh dengan aturan serta tanggung jawab melayani rakyat menyelewengkan wewenang untuk

memperkaya diri. Secara struktur relasi dan ukuran finansial, korupsi lebih merupakan permasalahan transaksi pengusaha dengan pejabat, bukan soal masyarakat yang tak jujur.

Kita bisa menemukan kecenderungan itu dari indeks persepsi korupsi (IPK) dari Transparency International Indonesia 2010. Di situ tertera peringkat daerah-daerah di Indonesia berdasar IPK-nya. Persepsi berasal dari pengusaha/perusahaan, bukan masyarakat dari ranah kultural. Narasi besar antikorupsi di Indonesia adalah bagaimana menciptakan iklim pasar dan persaingan usaha yang sehat. Bagaimana kepentingan pemodal bisa efisien berjalan.

Dasar tersebut beserta konteksnya sulit dijadikan konsep pemikiran untuk membentuk pribadi dan masyarakat berkarakter antikorupsi. Karena tujuan utama kampanye antikorupsi lebih untuk kepentingan pengusaha yang bertujuan mencari keuntungan. Ini yang menurut Donny Gahral Adian (Kompas, 12-2012) sebagai “opini menjadi nama lain ekonomi”. Perubahan tak pernah

benar-benar menyerahkan keadilan kepada rakyat. Ternyata intinya, birokrasi korup membuat dunia usaha tak dapat berkembang baik. Kelas pengusaha tentu saja menginginkan pemimpin yang (seakan-akan) berintegritas tinggi.

Sebut saja! JK yang melupakan kejahatan masa lalu bersetubuh dengan ormas kekerasan untuk kekuasaan (“Jagal”, Joshua Oppenheimer, 2012); si penjahat lingkungan dan kemanusiaan di Sidoarjo bernama Aburizal Bakrie; tukang culik bernama Prabowo; dan sang tukang kawin bernama Dahlan Iskan. Semuanya, pengusaha!

Pengertian korupsi yang formalistik menyatu dengan aturan mencapai kekuasaan yang konstitusional. Tradisi antipositivisme filsafat hukum menilai negatif keadaan ini. Pengertian keterbukaan dalam sistem dan akses berkuasanya harus juga menyertakan keterbukaan kultural. Jika relasi formal-kultural tertutup, demokrasi menjadi politik ekonomistik yang memandang kekuasaan sebagai investasi. Pada gilirannya ini memicu korupsi sebagai kompensasi investasi (Donny Gahral, 2006).

Belajar dari feminisme

Gerakan antikorupsi perlu belajar pada feminisme. Rosemarie Putnam Tong melalui “*Feminist Thought*” memberitahukan, gerakan pemikiran keadilan relasi tubuh awalnya memaknai permasalahan perempuan sebatas diskriminasi peran di ranah publik yang formal. Perempuan tak bisa mengenyam pendidikan formal, bekerja formal dan tak bisa memilih di pemilu untuk pemerintahan formal berkala. Penekanan perempuan berpartisipasi di ranah formal dikenal sebagai perspektif feminisme liberal.

Di perjalanan, perjuangan tersebut dilengkapi perspektif feminisme radikal.

Gerakan perempuan menyadari, ketidakadilan kesempatan dan peran di ranah formal lebih disebabkan budaya patriarki di masyarakat. Dominasi lelaki terhadap perempuan dalam dinamika masyarakat membentuk dan melanggengkan sektor formal sebagai milik lelaki. Perempuan, tempatnya sektor informal di ruang domestik. Artinya, jika patriarki masih kuat, tak akan membentuk masyarakat dan pemerintahan adil.

Dari radikalisasi itu, feminisme menjadi perspektif seksualitas. Kebertubuhan jenis kelamin di tengah budaya patriarki mer-ekam ilmu pengetahuan berdasar pengal-

Jika relasi formal-kultural tertutup, demokrasi menjadi politik ekonomistik yang memandang kekuasaan sebagai investasi. Pada gilirannya ini memicu korupsi sebagai kompensasi investasi (Donny Gahral, 2006).

aman sebagai korban. Kesadaran terhadap praktek dominasi relasi memproyeksikan keadilan relasi yang hanya bisa dicapai dari kesetaraan tubuh berkelamin.

Radikalisasi itu pun melahirkan kesadaran tak kedapnya sekat privat dan publik yang sebelumnya dipelihara perspektif HAM. Pejabat publik yang sebelumnya dibesarkan dalam asuhan domestik patriarki, ternyata melahirkan kebijakan penyelesaian perkosaan dengan melarang payudara dan vagina keluar rumah. Perempuan tak perlu datang ke bilik suara atau duduk di parlemen karena dinilai perannya lebih penting dengan menyusui anak atau bersiap layani penis yang lelah berpolitik.

Dari feminisme lah kita disadarkan, politik tak hanya soal sosial dan struktural pemerintah. Ini yang ditegaskan Hannah Arendt sebagai politik otentik (Agus Sudibyo, 2012).



Politik yang sebenarnya bukan yang berada di panggung politik. Segala pilihan personal kita ternyata mempengaruhi ranah sosial, berpolitik. Lalu tubuh beserta alat kelaminnya (seksualitas), sebagai hal yang paling personal, adalah detektor keadilan relasi antar personal dan personal-publik. Ibu yang mengalami langsung keringnya ASI serta susu dan sembako yang mahal tahu pasti, keadilan tak menjamahnya. Perempuan yang dipukul, diselingkuhi, dipoligami, diperkosa atau dicerai (sepihak) merasakan sakitnya dominasi kekerasan.

Ini bukan cuma soal struktural pemerintah. Bukan juga soal sosial saja. Tapi ini lebih pada soal apa yang dialami tubuh lalu atau dan ditanam di otak. Jauhnya keadilan pada kenyataan negara dan masyarakat dimulai karena kita tak adil di dalam pemikiran.

Secara semiotik "feminisme" (bukan *human-isme*) adalah kata ganti dari "keadilan relasi" antar manusia. Ini lahir karena pengalaman kolektif kaum perempuan yang menyimpulkan, masyarakat patriarki yang menjadikan kuasa kekuatan otot (*muscle*) sebagai kendali keteraturan telah menciptakan ketidakadilan.

Antitesis maskulinitas masyarakat lalu dihadapkan sebagai perlawanan terhadap sistem sosial yang tak setara. Dipilih kata feminisme sebagai upaya perlawanan terhadap masyarakat maskulin. Tujuannya: keadilan.

Lalu, kata apa yang pas dijadikan lawan dari kata "korupsi"?

Jujurisme: ideologi antikorupsi

Kulturalisasi gerakan antikorupsi telah menyatakan kata "jujur" sebagai langkah awal berantas korupsi. Selanjutnya, kita perlu memberanikan diri menempatkan

"jujur" sebagai lawan dari "korupsi". Korupsi dimulai dari otak yang bermasalah. Pada dasar dan mula, pemikiran yang tak adil dalam takdir manusia sebagai makhluk

personal sekaligus sosial lah yang mendorong diri kita korup.

Korupsi adalah kebohongan relasi tanpa keterbukaan yang menguntungkan satu pihak seiring mengorbankan pihak lain dengan menyelewengkan kepercayaan bersama. Korupsi intinya merupakan kejahatan relasi antar yang internal dengan yang eksternal. Saat ada relasi antar ruang atau pihak yang menyertai kepentingan bersama dan kepercayaan lalu terjadi tertutupan dan penyelewengan untuk keuntungan atau kepentingan satu pihak, maka itulah korupsi.

Pengertian korupsi tersebut akan tetap sesuai diterapkan pada segala ranah. Bisa di ranah personal, sosial, kultural, formal dan struktural. Betul, terjadi korupsi pada lembaga

dan jabatan formal menyertai uang negara. Tapi permasalahan utamanya, kumpulan personal bernama masyarakat punya pemikiran korup. Standar nilai di masyarakat berasal dari tiap personal yang berperan sebagai agen sosial. Tiap personal yang menjadi agen sosial mempunyai standar nilai bagi dirinya yang kemudian disebarkan lalu menjadi standar nilai di masyarakat.

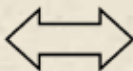
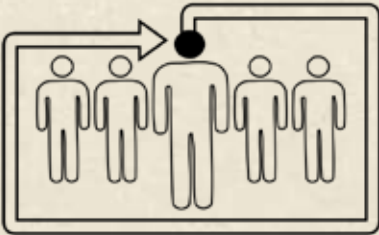
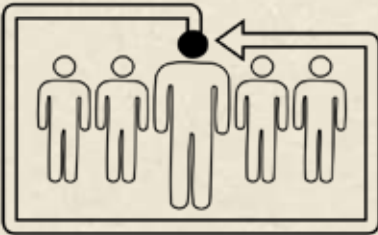
Ideologisasi merupakan radikalisasi dari usaha kultural. Sekali lagi, permasalahanya ada dalam otak setiap diri pada masyarakat. Pemikiran menyuplai nilai koruptif untuk berbohong melalui ucap dan tindak yang mengisi lembaga dan jabatan negara. Alih-alih kita mau membersihkan negara dari korupsi kita malah tak membersihkan supplainya di masyarakat, mulai dari otak kita.

JUJUR / KORUPSI

Internal ↔ Eksternal

Personal ↔ Sosial/Lembaga ↔ Kultural

Pejabat ↔ Institusi/Pemerintah ↔ Hukum/Negara



Personal Sosial/Lembaga Kultural

Pejabat Institusi/Pemerintah Hukum/Negara

Pemikiran

Sistem

Pemikiran

Sistem

Keterangan → : Alur ↔ : Relasi

Dari sini didapat dasar dan konsepsi pemikiran antikorupsi. Ideologi. Menggunakan “jujur” sebagai antitesis dari “korupsi”, maka ideologi antikorupsi adalah jujurisme. Jika feminisme secara radikal mempunyai prinsip berslogan “*personal is political*”, jujurisme mempunyai “*personal is social*”. Femenisme berobsesi menciptakan keadilan melalui jaminan negosiasi berelasi dalam sistem kehidupan. Jujurisme berobsesi menciptakan keadilan melalui akses antar personal dan sosial untuk menjamin penghargaan terhadap kejujuran sebagai sistem.

Dari konsep kesesuaian antar personal dan sosial di mana keadilan relasi adalah personal=sosial, jujurisme menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tak adil terhadap esensi manusia sebagai makhluk personal sekaligus sosial. Ini kejahatan mencuri melalui kebohongan dengan menyelewengkan kepercayaan. Angelina Sondakh berlaku luar biasa jahat karena berbohong dengan menyelewengkan kepercayaan untuk mencuri uang publik dengan motif keuntungan memperkaya. Ini berbeda dengan pencuri singkong yang dimensi

kejahatannya sangat sederhana dengan motif bertahan hidup.

Pemaknaan ini berbeda dengan HAM yang menilai korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena memberantas hak asasi banyak manusia. Atau pemakanan moralis yang menilai korupsi kejahatan luar biasa karena sama dengan kemunafikan di mana orang munafik merupakan bahan bakar api neraka.

Jujur sangat penting karena merupakan nilai luhur di atas moralitas, atau moral paling utama. Jujur diupayakan karena benar. Ini bukan soal dampak. Meski mungkin berdampak baik bila dilakukan atau berdampak buruk bila dikesampingkan. Ini soal bagaimana mengupayakan yang internal=eksternal. Yang personal=sosial. Yang privat=publik. Kesesuaian.

Sekat antar internal-eksternal ini dimungkinkan sebagai akses yang terbuka tuntas jika dibutuhkan dan tak dipermasalahkan. Kepercayaan menyertai Keterbukaan. Sebaliknya, kita bisa terbuka jika kita percaya.

Kata “jujur” pun maknanya akan sesuai jika diturunkan dengan kata-kata lain yang berlawanan dengan kata-kata turunan makna dari kata “korupsi”.

JUJUR=ANTIKORUPSI	KORUPSI=BOHONG
Benar	Salah
Terbuka	Tertutup
Sesuai	Bias/Bertolak Belakang
Percaya	Ragu
Setia	Selingkuh
Berani	Takut
Bertanggungjawab	Masa bodoh
Altruis	Egois
Kepentingan bersama	Keuntungan
Damai	Konflik (diri)

Kenapa pakai kata “jujur” bukan “*honest*”? Jawabannya, karena syarat ideologi, bisa diterapkan secara personal, sosial, kultural dan struktural dan sangat mungkin mendunia (universal). Biasanya ideologi dipilih istilahnya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Tapi, penamaan pun tak jarang lahir dari konteks tempat. Karena konsepsi pemikiran antikorupsi ini lahir di Indonesia maka dipilihlah “jujur”, kata dari bahasa Indonesia.

“Jujur” dari jujurisme pun bisa langsung menandakan Indonesia merupakan negara serta masyarakat yang mempunyai permasalahan korupsi akut. Selain itu, “jujur” dari jujurisme diusahakan menjadi perspektif yang berhasil mengatasi permasalahan di Indonesia kemudian bisa menginspirasi dunia; menjadi ideologi.

Ideologi antikorupsi bernama jujurisme akan mengisi kekosongan gerakan

antikorupsi yang belum mempunyai ideologi. Padahal, ideologi merupakan syarat sebuah gerakan massa untuk bisa diterima semua orang dan mendunia. Agar komune perubahan berpotensi universal, syaratnya adalah berideologi.

Kita bisa bandingkan gerakan antikorupsi dengan gerakan berideologi seperti HAM (liberalisme/humanisme), kesetaraan gender (feminisme), antipemerintah (anarkisme) atau Islamisme. Kita bisa merinding melihat konsistensi payung hitam “Kamisan” di depan istana. Empatik muncul mengalir seiring penuturan korban KDRT yang mengikatkan solidaritas aktivis perempuan. Pikir akan tak habis pusing saat menyaksikan asketisnya kaum anarkis yang hidup tanpa ambisi menguasai komoditi dan posisi. Atau kaum Islamis fundamental yang siap serahkan waktu, harta, darah, raga dan jiwa untuk mendirikan khilafah islamiyah.



Antara HAM dan Moral(is)

Disimpulkan gerakan antikorupsi jauh dari militan dan radikal. Karena tak berideologi, antikorupsi malah meminjam HAM dan atau moral agama (khususnya Islam). Ini disebabkan antikorupsi di Indonesia yang

terorganisir di konteks menjelang reformasi. Secara simbol, musuh gerakan antikorupsi adalah “Soeharto”. Pemerintahan sentralistik Orde Baru yang otoriter selama 30-an tahun menempatkan Bapak Pembangunan

Dua kubu tersebut sering berkonflik mengenai hukuman mati. Paling aktual, program Debat di TV One (1/10/2013) menggambarkan seteru kubu HAM dan moralis. Dari sini terlihat, tak ada pegiat antikorupsi berideologi. Yang ada orang HAM yang aktif di isu korupsi membahas hukuman mati. Atau orang Islamis memahami, korupsi hanya bisa hilang dengan hukuman mati. Konflik disebabkan, salah satunya, karena gerakan antikorupsi tak berideologi. Belum ada konsep berpikir filosofis yang dijadikan acuan bersama dalam berpendapat dan bertindak.

sebagai presiden terkorup sedunia (\$ 15-35 milyar, TI 2004). Rezim korup ini sejalan dengan rumusan [C= D+M-A-T] dari Kilgert.

Ada tiga inspirasi besar yang menggerakkan mahasiswa dan aktivis dalam menggulingkan rezim Soeharto. Pertama, agama (Islamisme). Kedua, HAM. Ketiga, sosialisme. Dalam polarisasi gerakan dua inspirasi besar itu bernama kubu kaum moralis (Islamis), kaum HAM dan kaum kiri. Gerakan antikorupsi bertolak dari moral atau HAM—atau memadukan keduanya. Sedangkan gerakan kiri tak menggubris permasalahan korupsi karena korupsi lebih dinilai sebagai permasalahan sekunder setelah ketidakadilan kelas dan askes modal.

Aktivis antikorupsi berdasar HAM ciri ekspresi aspirasinya adalah menolak hukum mati koruptor. Nyawa koruptor tak bisa dicabut manusia yang lain. Kritik muncul. Pemisahan ranah privat-publik dari liberalisme sebagai ideologi HAM, justru menciptakan celah mungkin lahir atau tak terditeksinya korupsi. Daya transparansi dan akuntabilitas, dibatasi. Kenyataannya, sangat mungkin korupsi terjadi menyertai laporan keuangan yang baik.

Di seberang kalangan HAM ada kalangan Islamisme. Prinsipnya menilai, korupsi sebagai kejahatan karena moral

menilai korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan. Ini bukan soal dampak atau akibat. Variabel transparansi dan akuntabilitas kurang ditekankan di sini. Konsepsi moral saja yang menekankan bahwa korupsi itu jahat, tak cukup untuk bisa menciptakan sosial, kultur dan struktur antikorupsi. Ini bisa dibuktikan dari fakta, negara-negara yang berdasarkan moral agama di masyarakatnya, malah negara bertingkat korupsi tinggi. Di Indonesia, departemen agama pun tingkat korupsinya tinggi. Franz Magnis Suseno (2012) sampai menyimpulkan korupsi malah menjadi “*way of life*” mengganti agamanya sendiri. Jika ada niat dan keyakinan untuk korupsi, pasti ada jalan.

Dua kubu tersebut sering berkonflik mengenai hukuman mati. Paling aktual, program Debat di TV One (1/10/2013) menggambarkan seteru kubu HAM dan moralis. Dari sini terlihat, tak ada pegiat antikorupsi berideologi. Yang ada orang HAM yang aktif di isu korupsi membahas hukuman mati. Atau orang Islamis memahami, korupsi hanya bisa hilang dengan hukuman mati. Konflik disebabkan, salah satunya, karena gerakan antikorupsi tak berideologi. Belum ada konsep berpikir filosofis yang dijadikan acuan bersama dalam berpendapat dan bertindak.

Pemuda sebagai jujuris

Saatnya ilusi antikorupsi dan bias dasar moral dan HAM dijelaskan masif. “Berani Jujur Hebat” dikoreksi dengan “Jujur is Me!”. Kita terlebih dahulu harus melakukan kesadaran, kritik dan refleksi terhadap pemikiran diri kita sendiri. Sebelum mengajak orang lain atau menyatakan ke publik untuk jujur, apakah

otak kita bisa mendorong kesesuaian pikir, kata dan sikap personal dan sosial?

Ideologi jujurisme, secara personal, alur pembentukannya sebagai berikut:

1. Meyakinkan diri, personal=sosial merupakan sikap mencapai keadilan dualisme manusia;
2. Mengumpulkan kejadian masa lalu



saat kita mengalami pembohongan dan melakukan kebohongan;

3. Meminta maaf dan menceritakan kebohongan kita pada pihak yang pernah kita bohongi lalu mempublikasikan sebagai pengetahuan dan penguatan diri dan komunitas antikorupsi;
4. Mengumpulkan permasalahan kebohongan atau korupsi di keluarga, masyarakat, sekolah, organisasi, pemerintah baik di keseharian maupun di berita;
5. Analisa permasalahan menggunakan perspektif jujurisme;
6. Proyeksikan keadilan melalui konsep pemikiran diri dan bersama bahwa personal=sosial;
7. Mempraktekan. Berpikir-kata-tindak jujur dalam keseharian di setiap tempat. Jika tidak, dihukum dengan menceritakan dan mempublikasikan kebohongan yang dilakukan.

Setelah jujurisme di-*install* ke otak pemuda, setiap dirinya harus

mendeklarasikan sebagai “jujuris”— orang yang berideologi jujurisme— kepada lingkungannya dan publik. Hal ini merupakan komitmen serta kendali diri dan luar diri kita ber-pikir, kata dan tindak sebagai orang yang berpegang pada jujurisme.

Menyatakan diri pegiat/aktivis “antikorupsi” kurang berdampak pada perubahan diri dan masyarakat. Korupsi yang dimaknai formal struktural hanya mempermasalahkan atau mengingatkan seorang “antikorupsi” jika menduduki jabatan pemerintah lalu menyelewengkan uang negara. Seorang “antikorupsi” tak bisa ditagih komitmennya dalam keseharian. Seandainya pegiat antikorupsi berbohong, menyontek, menjiplak berita, selingkuh, atau selewengkan uang organisasi, tak bisa diperkarakan di publik karena tak terkait dengan persoalan negara. Padahal secara kultural itu persoalan sosial, bukan hanya personal.

Maka penting menyatakan diri sebagai “jujuris” pada lingkungan dan publik.



www.wilnymonfreeworld.com

Pada lingkungan bisa di keluarga, di sekolah, di masyarakat tempat tinggal, di tempat kerja dan lainnya. Di dunia maya bisa di biodata singkat akun twitter atau facebook misalnya. Sikap ini memberitahukan, mengajak dan membentengi diri kita dengan komitmen.

Pada siapa kita *install* jujurisme? Jawabannya kaum pemuda. Kepada yang tua kita tak prioritaskan. Karena kita bertindak menyertai langkah strategis dan keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran. Jika ada slogan “Semua Boleh Naik, Koruptor Harus Turun!”, jujurisme menggantinya dengan “Pemuda Harus Naik, Koruptor Harus Turun!”. Koruptor memang kata ganti dari orang tua.

Beberapa tahun setelah reformasi, ada wacana dukung dan pilih pemimpin muda. Alasannya, karena yang muda lebih sehat dan pro-perubahan. Tapi selain itu, alasan politik kuasanya adalah, pemimpin muda bebas dari keterkaitan antara pemerintahan korup Orde Baru.

Yang tua adalah pelaku dan terlibat dalam rezim yang bertahan 30-an tahun secara otoriter (monopoli) dan tertutup menyertai kejahatan. Sehingga orang tua=koruptor.

Lalu, untuk bisa menjadi gerakan masif, jujurisme harus berjejaring dengan semua lembaga yang juga menyertai ideologi. Dan tentu saja dengan lembaga gerakan antikorupsi yang belum mempunyai ideologi. Me-*install* jujurisme di setiap otak personal dan organisasi sosial. Sehingga ada kesatuan antara wacana dan kerja, struktur dan kultur.

Ke depannya gerakan antikorupsi berideologi. Jujurisme. Berpikir, berkata dan bertindak sebagai antikorupsi. Tak hanya di ruang sosial tapi juga di kehidupan personal. Jujur *is me!* []

USEP HASAN SADIKIN ~ Jujuris, pegiat Jujurisme.net

jujurismE.net
anticorruption ideology movement

Referensi:

Buku

- Buku Hitam Ujian Nasional, Habe Arifin, Resist Book, Yogyakarta 2012;
- Demokrasi Kami, Donny Gahral Adian, Koekoesan, Depok 2006;
- *Feminist Thought*, Rosemarie Putnam Tong, Jalasutra, Yogyakarta 2010;
- Korupsi, Demokrasi & Pembangunan Daerah, Salahudin, Lapinda Bidos NTB dan Buku Litera, Yogyakarta 2012;
- Malunya Jadi Orang Indonesia, Frans Magnis Suseno dkk, Taman Pustaka Kristen, Yogyakarta 2012;
- Manusia Politik—Subjek Radikal dan Politik Emansipasi di Era Kapitalisme Global Menurut Slavoj Zizek, Robertus Robert, Marjin Kiri, Tangerang 2010;
- Memahami untuk Membasmi, KPK, KPK, Jakarta 2008;
- Memberantas Korupsi di Indonesia, Dyatmoko Soemodihardjo, Shira Media, Yogyakarta 2012;
- Mengukur Korupsi di Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi 2010, Frenky Simanjuntak dkk., Transparency International Indonesia, Jakarta 2010;
- Politik Otentik—Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt, Agus Sudibyo, Marjin Kiri, Tangerang 2012;
- Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Richard Robinson, Komunitas Bambu, Depok 2012;
- Virus Akal Budi, Richard Brodie, KPG, Jakarta 2005;

Tesis

- Perempuan dan Korupsi, Nindita Paramastuti, Pusat Kajian Gender Pasca-Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2012;
- Perempuan dan Politik Pasca-Orde Baru, Didik Supriyanto, Pasca-Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta 2010;

Jurnal

- Berantas Korupsi - Jurnal Perempuan 72, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 2012;
- Opini Harian Cetak
- Opini, Rakyat dan Demokrasi, Donny Gahral Adian, Kompas Cetak, 4 Desember 2012;

Film

- The Act of Killing (Versi Indonesia, "Jagal"), Joshua Oppenheimer, 2012
- Opini Dunia Maya
- Korupsi Mengakar di Zaman Kolonialisme, <http://little-economist.blogspot.com/2011/03/korupsi-mengakar-di-zaman-kolonialisme.html>
- Korupsi Birokrasi: Sebuah Warisan Kolonial, <http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/22/korupsi-birokrasi-sebuah-warisan-kolonial/>
- Memberantas Korupsi Tanpa Hukuman Mati, Emerson Yuntho, 3-10-2012
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/10/03/memberantas-korupsi-tanpa-hukuman-mati-498282.html>
- LSM Antikorupsi yang Mencintai Koruptor, Adi Supriadi, 4-10-2012
- <http://hukum.kompasiana.com/2012/10/04/lsm-anti-korupsi-yang-mencintai-koruptor-498495.html>

Galeri Foto

You Tube <https://www.youtube.com/user/YouthProactive>

YOUTH PROACTIVE NIGHT







BATANG







SEMARANG



YOGYAKARTA



SUPPORTED BY:



